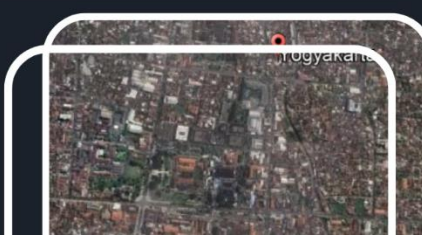
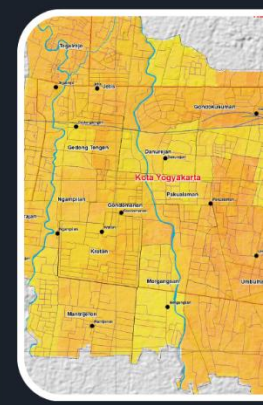




RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024 - 2026



KATA PENGANTAR

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta dalam kurun 3 tahun yaitu tahun 2024 hingga 2026. Dokumen rencana penanggulangan bencana disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kajian risiko bencana periode 2022-2026. Dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan multi pihak dari pemerintah, non pemerintah, media massa, akademisi dan komunitas Masyarakat.

Kami berharap agar dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta 2024-2026 dapat menjadi panduan dalam implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, terarah, dan terintegrasi sesuai dengan visi dan misi dalam penanggulangan bencana.

Secara khusus kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta berkontribusi dalam proses pembuatan dokumen ini. Semoga Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat memberikan manfaat bagi Upaya penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta,2024

Walikota
Kota Yogyakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta dalam kurun 3 tahun yaitu tahun 2024 hingga 2026. Dokumen rencana penanggulangan bencana disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kajian risiko bencana periode 2022-2026, penilaian kapasitas daerah, RPJMD dan histori kejadian bencana. Berdasarkan dokumen KRB Kota Yogyakarta tahun 2022-2026, terdapat 7 (tujuh) potensi ancaman bencana di Kota Yogyakarta dengan tingkat risikonya masing-masing. Tingkat risiko kelas Tinggi untuk bahaya banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempabumi, dan kegagalan teknologi. Sedangkan kelas Sedang untuk bencana Kekeringan Meteorologi dan kelas Rendah untuk bahaya letusan gunungapi. Prioritas bencana yang akan ditangani Kota Yogyakarta dianalisis berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan menunjukkan bahwa prioritas bencana yang ditangani Kota Yogyakarta ialah cuaca ekstrim, gempabumi, dan banjir.

Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 3 tahun ke depan. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan. Berdasarkan hasil penilaian dan kesepakatan yang dilakukan pada diskusi terfokus serta dihadiri oleh Tim Teknis RPB yang terdiri dari perwakilan berbagai badan dan dinas terkait, maka disepakati bahwa isu strategis dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta adalah (1) Penyelenggaraan PB kolaboratif belum optimal; (2) Meningkatnya Risiko bencana seiring penurunan kualitas lingkungan; (3) Lemahnya perencanaan kedaruratan

dan pemulihan; (4) Lemahnya kualitas partisipasi dan mandiri masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana; serta (5) Meningkatnya kerentanan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Pariwisata yang berisiko bencana.

Pernyataan rumusan program dan kegiatan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan sasaran. Apabila terdapat program yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan sasaran, maka diperlukan perbaikan dalam proses penyusunan program.

Penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta memiliki tujuan agar (1) Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana; (2) Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana; (3) Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel; (4) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal; (5) Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Sebagai Rencana Aksi Daerah (RAD) menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 3 (tiga) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. RAD dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan berdasarkan masing-masing OPD, baik terkait secara langsung dengan bencana maupun tidak.

Peran para pihak yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media di Kota Yogyakarta dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peran tersebut pada ranah mengimplementasikan aksi-aksi yang disepakati dalam dokumen RPB. Selain itu, memastikan inisiatif para pihak dalam program pengembangan ketangguhan merujuk dan

atau mendukung tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Yogyakarta.

Beberapa poin penting dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang perlu diperhatikan sebagai rujukan perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta antara lain adalah:

1. Karakteristik dan risiko bencana yang ada di daerah mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang juga diacu dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kedua dokumen ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang harus menjadi pertimbangan saat perencanaan pembangunan dan teknis lainnya di daerah;
2. Program dan rencana aksi penanggulangan bencana yang memuat berbagai hal yang perlu dilakukan agar daerah dapat adaptif terhadap potensi bencana, terutama potensi bencana prioritas;

Lokasi kegiatan penanggulangan bencana ini menjadi pertimbangan bagi penentuan lokasi dalam indikasi program rencana spasial tata ruang wilayah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	2
C. KERANGKA PIKIR.....	3
D. KEDUDUKAN DOKUMEN RPB DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN.....	19
E. LANDASAN HUKUM.....	23
F. RUANG LINGKUP.....	25
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH.....	27
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	27
B. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN KOTA YOGYAKARTA.....	41
C. RISIKO BENCANA KOTA YOGYAKARTA.....	46
D. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI.....	52
E. MASALAH POKOK.....	54
F. RUMUSAN ISU STRATEGIS.....	56
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	61
A. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	61
B. KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA.....	75
C. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	119
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM.....	126
A. TUJUAN DAN SASARAN.....	126
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	133
C. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA.....	143
BAB V RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA.....	148
BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	150
A. PEMADUAN PARA PIHAK.....	150

B. Pemanduan Rencana Penanggulangan Bencana dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	152
C. Pemantauan dan Evaluasi.....	155
BAB VII PENUTUP.....	159

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta.....	30
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 2. 3 Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah di Kota Yogyakarta.....	33
Tabel 2. 4 Tinggi Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Air Laut Berdasarkan Kemantren Tahun 2021	33
Tabel 2. 5 Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta - Sleman, Termasuk di Dalamnya Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta	35
Tabel 2. 6 Klasifikasi Neraca Air Total Kota Yogyakarta Tahun 2019	37
Tabel 2. 7 Kondisi Suhu Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	38
Tabel 2. 8 Kondisi Suhu Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	39
Tabel 2. 9 PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	40
Tabel 2. 10 Kejadian dan Akibat Bencana	42
Tabel 2. 11 Data Kejadian Bencana di Kota Yogyakarta periode 1867 – 2023	44
Tabel 2. 12 Tingkat kecenderungan berdasarkan kejadian	45
Tabel 2. 13 Persandingan Tingkat Risiko dan Tingkat Kecenderungan	45
Tabel 2. 14 Rekapitulasi Bahaya di Kota Yogyakarta.....	46
Tabel 2. 15 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Yogyakarta.....	47
Tabel 2. 16 Potensi Kerugian Bencana di Kota Yogyakarta.....	48
Tabel 2. 17 Hasil Kajian Ketahanan Kota Yogyakarta.....	49
Tabel 2. 18 Hasil Kajian Kesiapsiagaan Kemantren di Kota Yogyakarta	49
Tabel 2. 19 Hasil Kajian Kapasitas Bencana di Kota Yogyakarta	51
Tabel 2. 20 Tingkat Risiko Bencana di Kota Yogyakarta.....	51
Tabel 2. 21 Matrik Prioritas Risiko Bencana.....	53
Tabel 2. 22 Pembobotan Masalah Pokok	57
Tabel 2. 23 12 (duabelas) isu pokok yang menjadi prioritas di Kota Yogyakarta	58
Tabel 2. 24 Isu Strategis	59
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	73
Tabel 3. 2 Peran Pra Bencana.....	77
Tabel 3. 3 Peran Saat Bencana	80
Tabel 3. 4 Peran Pasca Bencana	83
Tabel 3. 5 Peran Organisasi saat pra bencana, darurat, pasca bencana	84
Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahunan RPB Kota Yogyakarta 2024-2026	132
Tabel 4. 2 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, dan Strategi.....	134
Tabel 4. 3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	137
Tabel 4. 4 Program Penanggulangan Bencana.....	143
Tabel 6. 1 Peran Pentahelix, Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	151
Tabel 6. 2 Format Monitoring Dan Evaluasi	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana	3
Gambar 1. 2 Manajemen Risiko Bencana	11
Gambar 1. 5 Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana	17
Gambar 1. 6 Diagram Posisi dan Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan.....	23
Gambar 2. 1 Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041	29
Gambar 6. 1 Hubungan RPB Kota Yogyakarta 2024-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	154

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DSP	Dana Siap Pakai
KRB	Kajian Risiko Bencana
NGO	Non-Government Organization
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDRP	Pre-Disaster Recovery Plan
PMI	Palang Merah Indonesia
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAD	PRB Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
RAN PRB	Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
RDTR	Rencana Detil Tata Ruang
Renas PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RenOps	Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPKD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah

RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTRWD	Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
TNI	Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.

Data dan Informasi Bencana Indonesia adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.

Dokumen Perencanaan Pemulihan Pra-Bencana (Pre Disaster Recovery Plan - PDRP) adalah suatu dokumen perencanaan yang disusun pada saat normal (belum terjadi bencana) di daerah berpotensi bencana, yang meliputi penyusunan skenario perkiraan terjadinya bencana hingga sampai kepada prakiraan tingkat kerusakan dan kerugian, prakiraan kebutuhan dan tindakan teknis dan manajerial untuk pemulihan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan.

Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya upaya pengurangan risiko bencana (PRB).

Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.

Kapasitas (capacity) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana

Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

Kesiapsiagaan (preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari; Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan.

Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.

Penanggulangan bencana (disaster management) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.

Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang rawan terhadap bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kota Yogyakarta memiliki indeks risiko SEDANG dengan skor 69.46.

Hasil Kajian Risiko Bencana tahun 2022 - 2026, Kota Yogyakarta memiliki tujuh potensi ancaman bencana, antara lain: (1) Banjir; (2) Cuaca Ekstrim; (3) Wabah Penyakit; (4) Kegagalan Teknologi; (5) Kekeringan Meteorologi; (6) Gempa Bumi; (7) Letusan Gunung Api;. Dari tujuh potensi ancaman bencana, bahaya cuaca ekstrim dan gempabumi memiliki risiko tinggi, letusan gunungapi memiliki risiko rendah, dan bahaya lainnya memiliki risiko sedang.

Berdasarkan kajian risiko diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2024-2026 sebagai langkah untuk melakukan Upaya pengelolaan bencana yang terencana, sistematis dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi aktual dan kompleksitas bahaya di wilayah Kota Yogyakarta.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini berfungsi untuk memandu pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam menentukan langkah-langkah dalam melakukan upaya penanggulangan bencana yang mengancam di wilayah Kota Yogyakarta.

Selain itu Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36

dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 6. Pemerintah daerah diharuskan memiliki perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan pengkajian risiko bencana.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta 2024 – 2026 dilaksanakan oleh Tim Penyusun yang anggotanya berasal dari berbagai perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, perwakilan organisasi non pemerintah dan para pihak terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

B. TUJUAN

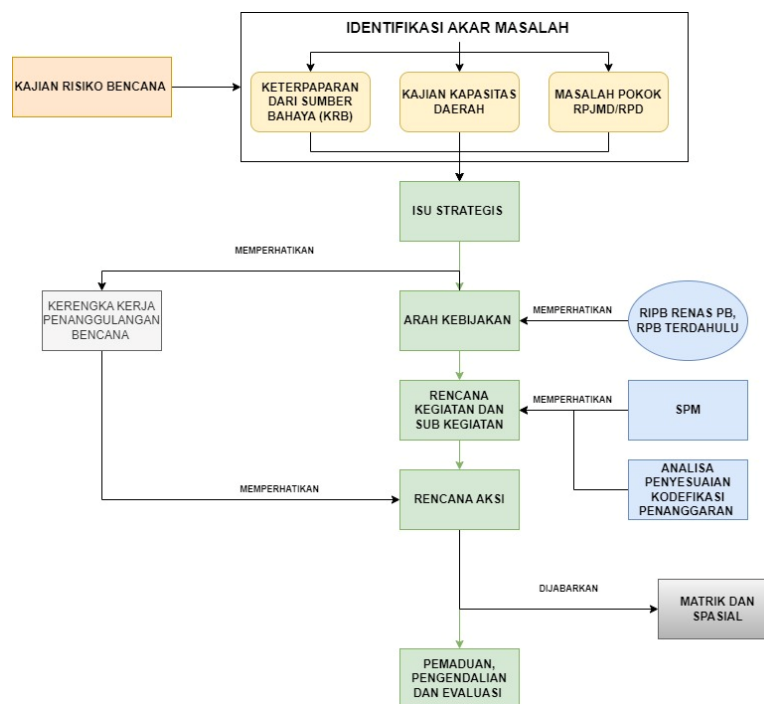
Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta adalah untuk:

1. Menyediakan rencana yang terpadu, terarah, terukur dan menyeluruh di seluruh tahapan penanggulangan bencana;
2. Sebagai bahan pepaduan dalam rencana pembangunan secara berkala di Kota Yogyakarta meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026 – 2030, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta;
3. Memberikan dasar panduan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi multipihak dalam pembangunan di Kota Yogyakarta.
4. Menyediakan dokumen yang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bagi multipihak di Kota Yogyakarta.

C. KERANGKA PIKIR

1. Manajemen Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan proses dinamis yang berkembang dari fungsi manajemen klasik: perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai organisasi yang perlu bekerjasama sepanjang siklus fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kerangka manajemen tersebut adalah manajemen risiko bencana, manajemen darurat bencana, dan manajemen pemulihan pascabencana.



Gambar 1. 1 Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana (Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021)

Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan adalah manajemen risiko bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada tahap pascabencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.

1. Kualitas RPB ditentukan oleh proses penyusunan RPB yang dikoordinasikan oleh BPBD. Dalam pelaksanaannya dibentuk tim teknis untuk mengorganisasikan, memfasilitasi, menyiapkan rancangan dokumen, dan memastikan substansi dokumen. Tim Teknis adalah perwakilan beberapa OPD yang berkaitan dengan kebencanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Proses perumusan prioritas risiko bencana yang ditangani dengan melakukan analisis pada komponen:
 - a. Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
 - b. Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan / atau merujuk pada DIBI BNPB

Analisis kedua komponen dengan menyandingkan Tingkat risiko Bencana dengan kecenderungan bencana. Berdasarkan tingkat risiko dan sejarah kejadian, diperoleh hasil keterangan tingkat kerawanan dan tingkat kecenderungan.

Setelah dilakukan prioritas bahaya yang ditangani, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi masalah pokok.

Identifikasi masalah masalah-masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana di daerah dengan menentukan 3 (Tiga) masalah pokok (*underlying factor*) untuk setiap komponen gabungan berikut ini:

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas.
 2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB).
 3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana.
3. Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 3 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isu strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum terkait penanggulangan bencana dan pembangunan, sehingga bisa dijabarkan dalam beberapa sasaran, program, dan kegiatan dengan indikator-indikator yang spesifik. Isu strategis RPB dibatasi dalam 3 – 5 pernyataan isu strategis.

Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur

2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
 3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
 4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
 5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana.
4. Kerangka kerja atau *framework* jika diterjemahkan secara harfiah adalah struktur pendukung di mana sesuatu dapat dibangun. Kerangka yang merupakan struktur pendukung harus kokoh menopang sesuatu yang akan dibangun. Kerangka tersebut terdiri dari beberapa komponen antara lain prinsip, kebijakan, dan proses manajemen. Terdapat pemahaman juga bahwa kerangka kerja merupakan seperangkat komponen yang menyediakan landasan untuk mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan manajemen yang kuat. Komponen- komponen tersebut terbuka, saling memperkuat dan berkaitan. Sementara itu, dalam kerangka kebijakan mengacu pada tahapan bencana terdapat kerangka pengelolaan bencana pra bencana, penanganan darurat bencana, dan pemulihan pasca bencana. Secara teknis, prosedur kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen dokumen perencanaan, antara lain; rencana penanggulangan bencana, rencana mitigasi bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana kontijensi, rencana operasi (kedaruratan) dan rencana pemulihan.
5. Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan yang harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, definisi tujuan yang

dimaksud adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 tahunan. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis). Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis, karena tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 3 tahun ke depan, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat positif yang mencakup ide besar. Dengan demikian, rumusan jumlah tujuan tidak harus sama dengan jumlah rumusan isu strategis, melainkan bisa menjadi lebih sedikit atau lebih banyak. Misalnya, terdapat 5 isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, bisa dirumuskan dalam 5 pernyataan tujuan atau menjadi hanya 3 pernyataan tujuan RPB, apabila ada kedekatan isi isu strategis tersebut. Sebaliknya, apabila isu strategisnya terlalu besar cakupannya, maka bisa dipilah dari 2 pernyataan tujuan, misalnya.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sehingga sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 3 tahun pelaksanaan RPB.

Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Dengan kata lain, apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan RPB, maka sebagian besar masalah yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Masing-masing sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Sebaiknya satu tujuan dicapai dengan dua atau tiga sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator sasaran.

6. Penyusunan Program dan Rencana Aksi yang disinkronisasi dengan SPM. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu

strategis yang telah dirumuskan. Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*).

7. Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana. Rencana aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
- b. Pada tingkat provinsi, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan dengan BPBD

- c. Rencana Aksi Daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi. Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra OPD dan Renja OPD.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan

pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Evaluasi adalah membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat efisiensi, efektif, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. sehingga evaluasi merupakan kegiatan untuk menganalisis kesenjangan (*gap*), dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai).

2. Manajemen Risiko Bencana.

Pada tahap prabencana, sebelum bencana terjadi yang dihadapi adalah risiko bencana. Manajemen risiko bencana adalah upaya untuk mengenali atau memahami faktor-faktor risiko, menganalisis risiko yang ditimbulkan hingga pada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengelola kemungkinan dampak yang terjadi.

Manajemen risiko bencana terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yakni:

1. pengkajian risiko bencana
2. pengelolaan atau penanganan risiko bencana

Pengkajian risiko bencana suatu upaya mengidentifikasi faktor-faktor risiko (dalam hal ini bahaya dan kerentanan), kemudian menganalisis untuk mengetahui tingkat besaran risikonya, hingga pada mengevaluasi risiko mana yang perlu diprioritaskan untuk ditangani. Hasil dari kajian risiko bencana, ditampilkan dalam bentuk angka indeks risiko bencana hasil perhitungan dan dalam bentuk peta risiko bencana.

Manajemen Risiko



Gambar 1. 2 Manajemen Risiko Bencana

Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa pengertian Risiko bencana dimaknai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. (UU 24/2007).

Pengkajian Risiko Bencana merupakan kegiatan untuk mengetahui Risiko Bencana yang dilakukan untuk:

- Mengetahui tingkat dan sebaran (secara spasial/peta): Ancaman bencana Kerentanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Risiko bencana;
- Menghitung kemungkinan dampak/paparan risiko bencana: termasuk Jumlah jiwa yang berada di wilayah berisiko bencana Jumlah nilai fisik bangunan di wilayah berisiko bencana (yg menjadi tanggungan pemerintah); Jumlah nilai potensi ekonomi di wilayah berisiko bencana; Jumlah luas lahan lingkungan di wilayah berisiko bencana;
- Mengetahui tingkat kemampuan/kapasitas pemerintah dalam mengelola risiko bencana.

Adapun Penanganan Risiko Bencana merupakan tindak lanjut dari hasil

kajian risiko yang merekomendasikan pilihan tindakan yang harus dilakukan terhadap setiap risiko yang dikenali. Apakah risiko itu harus dihindari/dicegah, atau dikurangi, atau dialihkan atau diterima?

Penanganan risiko bencana ini umumnya hanya dikenal sebagian praktisi kebencanaan dalam pengertian **pencegahan dan mitigasi**. Padahal ada 4 (empat) pilihan dalam menghadapi risiko yang dihadapi, yakni:

1. **Pencegahan** atau menghindari risiko, yakni apabila risikonya sangat besar melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapinya.
2. **Mitigasi** atau mengurangi risiko, yakni apabila risikonya masih dalam batas kemampuan masyarakat untuk menghadapinya.
3. **Pengalihan risiko**, yakni membagi risiko yang harus menjadi beban masyarakat dengan pihak lain yang dapat meringankan.
Misal: mengasuransikan aset publik kepada perusahaan asuransi.
4. **Penerimaan risiko** yakni menerima risiko yang mampu diatasi sendiri oleh masyarakat, biasanya merupakan risiko kecil dan sisa dari opsi-opsi sebelumnya yang sudah dilakukan.

Secara menyeluruh konsep manajemen risiko bencana dikenal sebagai Konsep Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*), yang selanjutnya dikembangkan sesuai perkembangan. Seperti yang kita kenal *Hyogo Framework for Action (2005-2015)* dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)*.

3. Manajemen Kedaruratan Bencana

Penanggulangan bencana pada intinya adalah manajemen kedaruratan bencana, karena keadaan darurat bencana menuntut tindakan yang segera menghadapi situasi yang mengancam jiwa manusia atau masyarakat. Sehingga tidak salah jika kebanyakan orang menganggap penanggulangan bencana identik dengan penanganan darurat.

Manajemen kedaruratan bencana dimaknai serangkaian kegiatan yang

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Kedaruratan (*emergency*), menurut UNHCR (2000) terdiri dari 2 fase, yakni: kesiapsiagaan (*emergency preparedness*) dan penanganan darurat (*emergency response*). Kesiapsiagaan meskipun keberadaanya ada pada tahap prabencana, akan tetapi pola manajemennya adalah manajemen kedaruratan. Oleh karena itu UNDRR, dalam *Sendai Framework* (2015) menyebutnya lengkap sebagai *preparedness for effective response*.

Kesiapsiagaan darurat meliputi kegiatan-kegiatan terkait:

- sistem peringatan dini
- perencanaan kontinjensi
- penyiapan sumber daya
- pelatihan, geladi dan simulasi

Penanganan darurat meliputi kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan dalam kluster atau gugus tugas untuk efektifitas penanganan dan rentang kendali komando dan koordinasi, yakni:

- Pencarian dan Penyelamatan;
- Pengungsian dan Perlindungan;
- Kesehatan;
- Logistik;
- Pekerjaan Umum dan Utilitas;
- Pendidikan;
- Pemulihan Dini.

Berbeda dengan kedua manajemen yang lain dimana fungsi koordinasi sangat diperlukan, maka dalam manajemen darurat ditambah lagi satu

fungsi yakni fungsi komando. Oleh karena itu pengorganisasian dalam manajemen darurat ini menganut pada sistem komando penanganan darurat bencana. Saat ini sistem tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016, yang pada dasarnya mengacu **pada *Incident Command System (ICS)* yang diterapkan di banyak negara.**

4. Manajemen pemulihan Pasca Bencana

Manajemen pemulihan pasca bencana adalah kegiatan penanggulangan bencana pasca bencana yang menitikberatkan pada faktor-faktor yang dapat memulihkan dan membangun kembali keadaan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan yang terkena bencana. Tujuannya agar lembaga, prasarana dan sarana pascabencana dapat berfungsi dan dibangun kembali secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dengan menonjolkan faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau pemulihan dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan didefinisikan sebagai kerangka pemulihan pasca bencana atau pasca bencana.

Setiap kejadian bencana mempunyai 2 (dua) dampak utama yakni terhadap masyarakat dan ekonomi, yakni berupa:

- kerusakan (total atau sebagian) dari aset fisik dan
- penurunan aktivitas ekonomi pada daerah terdampak.

Manajemen pemulihan bertujuan untuk mengembalikan dampak kerusakan akibat bencana serta perbaikan ekonomi daerah yang terdampak. Oleh karena itu pemulihan pasca bencana ini sangat tergantung dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diderita, dan mengkaji kebutuhan yang diperlukan untuk memulihkannya. Manajemen Pemulihan yang menekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan aman (*build back better and saver*).

Untuk menghitung besarnya kerusakan dan kerugian itu Bank Dunia telah diminta oleh Negara anggotanya untuk membantu merumuskan dan mendanai pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi pascabencana. Kemudian Bank Dunia menggunakan metodologi pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana yang dikembangkan oleh UN-ECLAC (1972). Metodologi yang kemudian dikenal dengan *Damage and Losses Assessment* (DaLA), yang kemudian dikembangkan menjadi *Post Disaster Need Assessment* (PDNA) atau yang sekarang disebut Kajian kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna).

Kajian akibat dan dampak bencana meliputi kajian terhadap infrastruktur, sosial, dan ekonomi, serta peningkatan risiko bencana. Selanjutnya, dirumuskan kebutuhan pemulihan terhadap sektor (1) infrastruktur; (2) perumahan dan pemukiman, (3) Sosial; (4) ekonomi; (5) lintas sektor. Program yang akan dilaksanakan pada tahap pemulihan ini sangat tergantung pada hasil kajian kerusakan dan kebutuhan serta kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh daerah yang terdampak.

ASEAN telah memberikan panduan untuk manajemen pemulihan pascabencana, antara lain diperlukan kesiapan berupa:

- a. Kebijakan dan Perencanaan untuk pemulihan;
- b. Menetapkan kelembagaan yang akan menangani pemulihan
- c. Pengkajian pascabencana (PDNA)
- d. Pengerahan sumberdaya dan pembiayaan untuk pemulihan;
- e. Pelaksanaan, koordinasi, komunikasi dan pemantauan

Secara teknis untuk pelaksanaan pemulihan pasca bencana di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh BNPB, yang terakhir adalah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

5. RPB Dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana

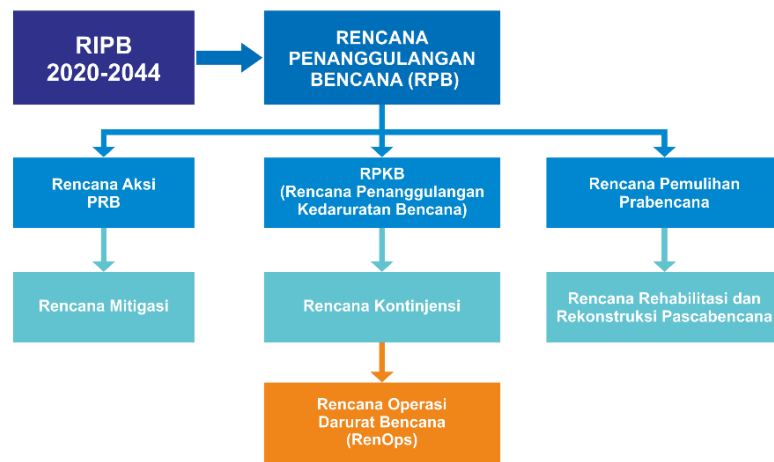
Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik. Rencana, dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai ‘kerangka kerja’ (*framework*) dan ‘rencana’ (*plan*). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis). Rencana menyangkut lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana, berapa targetnya, berapa pendanaannya, apa *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis).

Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia telah diwujudkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang. RIPB memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Renas PB merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana berjangka waktu 5 tahun. Renas PB disusun dan ditetapkan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.

Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, RPB merupakan acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dalam setiap

tahapan siklus bencana (Gambar 3). Hubungan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 3 Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana

1. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

Merupakan dokumen yang memuat tentang rencana aksi/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Dokumen Renaksi PRB ini memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan satu kesatuan dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di mana dokumen renaksi PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional.

Rencana-rencana aksi PRB tersebut telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program-program nasional lainnya.

Bagi organisasi non pemerintah, dokumen renaksi PRB merupakan sebuah komitmen dalam upaya PRB.

2. Rencana Mitigasi Bencana

Merupakan rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau instansi tertentu bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, biasanya rencana mitigasi ini tidak disebut secara eksplisit sebagai mitigasi bencana tetapi disebut sesuai dengan tujuan pembangunan atau

pelaksanaan proyek tertentu. Beberapa contoh rencana mitigasi antara lain adalah Rencana Pengendalian Banjir Jakarta, Rencana Reboisasi dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Rencana Penguatan Lereng Penahan Longsor, dan Rencana Pembuatan Tempat Evakuasi Sementara.

3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)

Rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.

4. Rencana Kontingensi (Renkon)

Merupakan suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

5. Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps)

Suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana/hasil kaji cepat untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.

6. Rencana Pemulihan

Rencana Pemulihan (*Pre Disaster Recovery Planning/PDRP*) adalah segala upaya yang direncanakan untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan bencana sebelum bencana terjadi.

Konsep PDRP dibangun berdasarkan pengakuan bahwa banyak yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi untuk memfasilitasi perencanaan pemulihan setelah bencana dan meningkatkan hasil

pemulihan. PDRP berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan pelajaran pasca bencana yang dipetik ke dalam perencanaan untuk peristiwa bahaya di masa depan. Perencanaan untuk pemulihan, sebelum bencana terjadi, memungkinkan pemerintah dan mitra untuk membangun konsensus mengenai tujuan dan strategi pemulihan, mengumpulkan informasi penting untuk menginformasikan keputusan pemulihan, menentukan peran dan tanggung jawab dan mengembangkan kapasitas implementasi yang diperlukan untuk mengelola operasi pemulihan secara efisien.

7. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Rencana yang disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah kejadian bencana. Penyusunan rencana pemulihan (*recovery plan*) ini berdasarkan atas hasil penilaian kerusakan dan pengkajian kebutuhan pascabencana. Ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terdiri dari sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial, tata pemerintahan, keuangan, dan perbankan. Berjangka jangka waktu selama 3 tahun, dokumen ini memuat tentang kondisi wilayah dan kejadian bencana, hasil Jitupasna, prinsip, kebijakan dan strategi; dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana termasuk penanggung jawab setiap program pemulihan, kemampuan sumber daya dan pendanaan.

D. KEDUDUKAN DOKUMEN RPB DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana.

RPB disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dengan tujuan: (1) agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik dan (2) untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah waktu 5 (lima) tahun. RPB dapat ditinjau sebelum habis jangka waktunya. Peninjauan ulang (review RPB) dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau bila terjadi bencana besar atau ancaman bencana baru atau diperlukan penyesuaian *rencana kegiatan/aksi*.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:

1. BNPB untuk tingkat nasional;
2. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
3. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Sebagai dokumen perencanaan, substansi yang dimuat dalam RPB meliputi:

- a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Identifikasi dan analisa jenis dan ragam ancaman bencana di daerah atau dikernal dengan kajian ancaman bencana.
- b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Identifikasi dan analisis faktor-faktor penyebab risiko bagi daerah, termasuk kapasitas yang dimiliki daerah untuk menangani dan mengelola risiko. Proses analisis ini dikenal dengan Kajian Kerentanan dan Kapasitas.
- c. Analisis kemungkinan dampak bencana. Analisis potensi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari kejadian bencana di daerah.
- d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Pilihan strategi dan tindakan yang ditetapkan sebagai upaya penanggulangan bencana.
- e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Yaitu kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk menangani dan mengelola risiko bencana.
- f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia. Yaitu pelibatan para pihak atau pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik dimana posisi dan kedudukan RPB:

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi
2. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana
3. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
5. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik dimana posisi dan kedudukan RPB:

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi;
2. Memuat kerangka kerja pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana, dan;
3. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah.
4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
5. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya

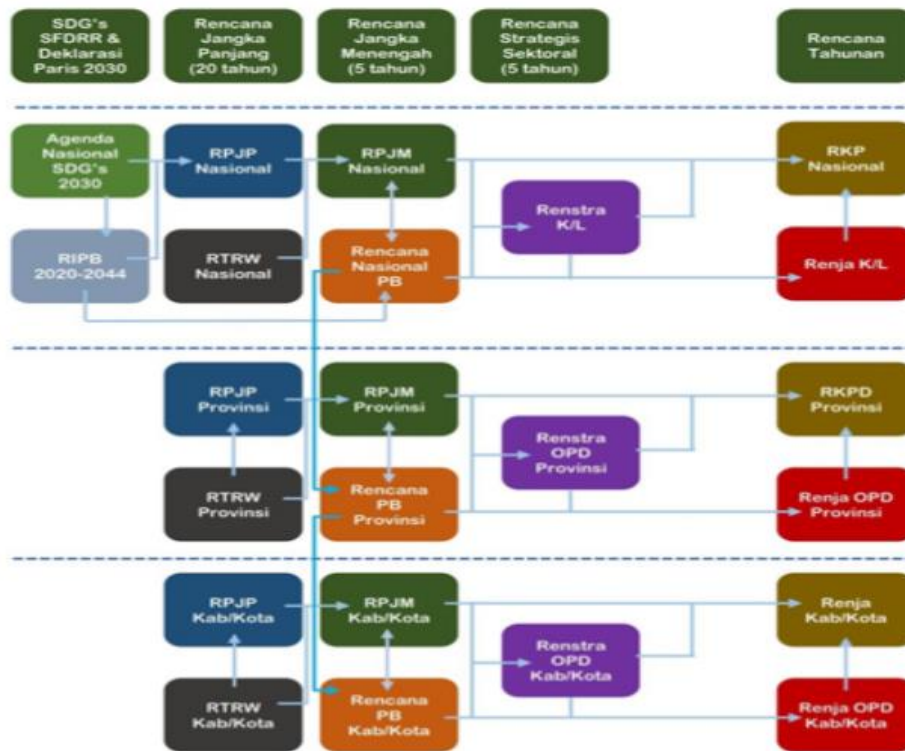
Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan yang dimasukkan atau terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Sehingga RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

Posisi RPB dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai masukan isu strategis digambarkan seperti gambar 1.6:

Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pemaduan RPB dalam RPJM dan sinkronisasi rencana aksi PB/PRB dalam RTRWD. Posisi dan kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana dalam sistem perencanaan pembangunan, tergambar pada gambar 1.6.



Gambar 1. 4 Diagram Posisi dan Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan (Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021)

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 dan 36;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu Rencana Penanggulangan Bencana adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang RIPB Tahun 2020-2044 Pasal 6;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang BNPB;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur.

16. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

F. RUANG LINGKUP

Lingkup dokumen RPB Kota Yogyakarta menjelaskan:

1. Lingkup risiko bencana: berisi tentang jenis bahaya yang ada di daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang memberikan dampak serius di daerah tetapi belum masuk dalam KRB.

2. Lingkup program dan rencana aksi: rencana kegiatan dalam RPB mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
3. Lingkup pelaksana rencana aksi: kegiatan dalam rencana aksi yang dituangkan dalam RPB dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH

1. Administratif dan Geografi

Kota Yogyakarta merupakan Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di bagian tengah, tepatnya di antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Secara administratif, pada tahun 2019 Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kemantren, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW), dan 2.532 Rukun Tetangga (RT) (Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 404 Tahun 2019)

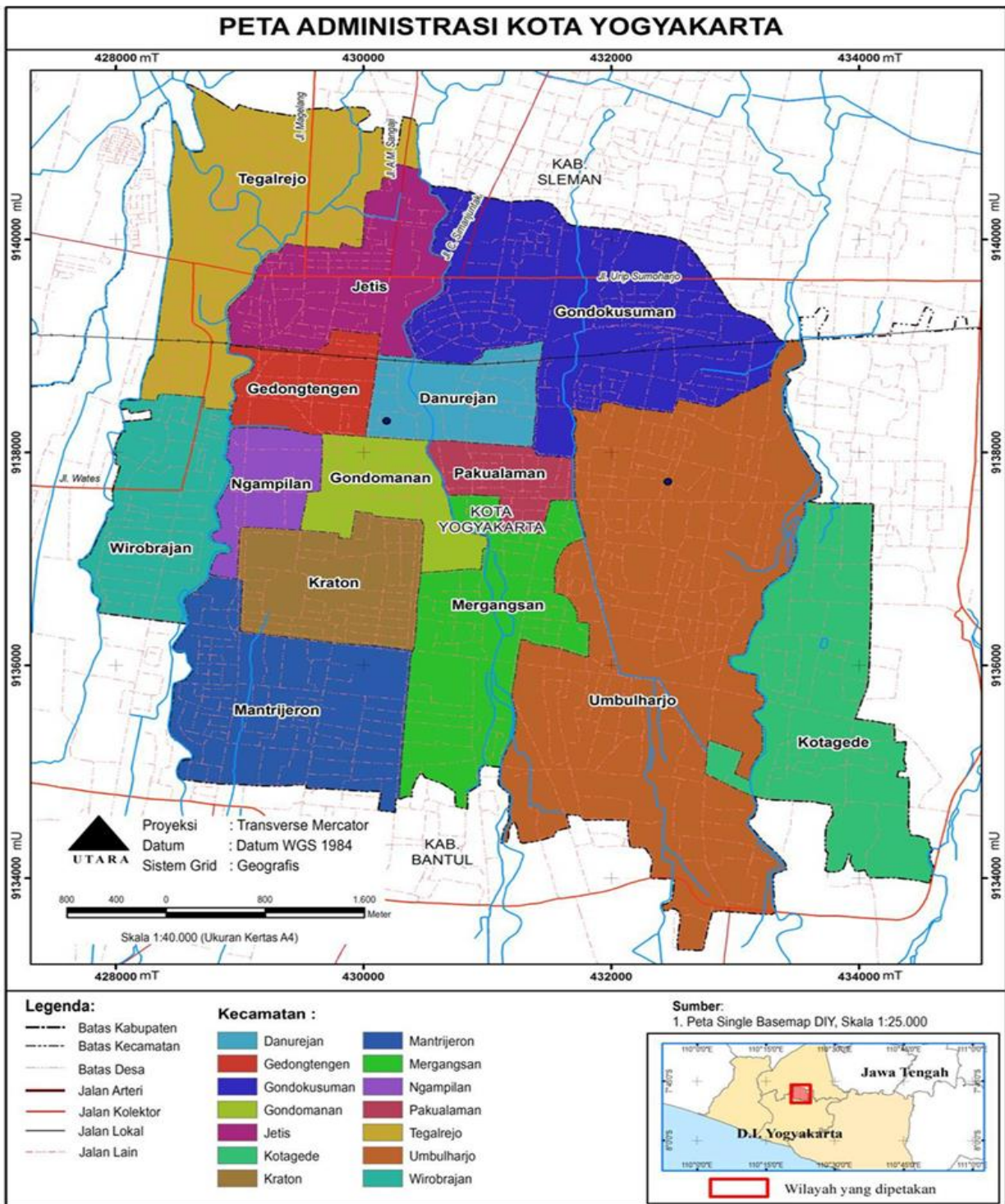
Kota Yogyakarta memiliki luas 32,50 km² atau 1,02 persen dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak wilayah Kota Yogyakarta secara astronomis adalah di antara 110° 24' 19" Bujur Timur - 110° 28' 53" Bujur Timur, dan 7° 49' 26" Lintang Selatan - 7° 15' 24" Lintang Selatan. Adapun batas wilayah Kota Yogyakarta secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Mlati)
- Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kapanewon Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Kasihan)

Kemantren Umbulharjo merupakan Kemantren terluas, yaitu dengan luas wilayah sebesar 834 ha atau 25,43% dari luasan Kota Yogyakarta dan memiliki jumlah kelurahan paling banyak dibandingkan Kemantren lainnya, yaitu sebanyak tujuh kelurahan. Kemantren yang memiliki luasan wilayah

terkecil adalah Kemantren Pakualaman, yakni seluas 64 ha atau sebesar 1,95% dari luasan Kota Yogyakarta.

Sebagian wilayah Kota Yogyakarta dilewati oleh beberapa sungai diantaranya Winongo, Code, Gajahwong, Belik dan Buntung, sebagian sungai berhulu di G. Merapi. Posis Geografis seperti ini menyebabkan Kota Yogyakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap bahaya banjir di musim penghujan



Gambar 2. 1 Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta

<i>Kemantren</i>	<i>Luas Kemantren (Ha)</i>	<i>Jumlah Kelurahan</i>	<i>Persentase Luas (%)</i>
Tegalrejo	294	4	8,96
Jetis	174	3	5,30
Gondokusuman	397	5	12,10
Danurejan	111	3	3,38
Gedongtengen	99	2	3,02
Ngampilan	85	2	2,59
Wirobrajan	175	3	5,34
Mantrijeron	268	3	8,17
Kraton	138	3	4,21
Gondomanan	115	2	3,51
Pakualaman	64	2	1,95
Mergangsan	229	3	6,98
Umbulharjo	834	7	25,43
Kotagede	297	3	9,05
<i>Jumlah</i>	<i>3.280</i>	<i>45</i>	<i>100,00</i>

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

2. Demografi

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk dimana penduduk Kota Yogyakarta

didominasi oleh penduduk usia muda. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebanyak 415.491 jiwa dengan rincian sebanyak 202.548 jiwa penduduk laki-laki dan 212.943 jiwa penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin atau perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan sebesar 95,11 %. Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk rata-rata 11.576 jiwa/km², Kecamatan Umbulharjo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 68.957 jiwa. Namun, dengan luas wilayah terbesar diantara 13 kecamatan lain (8,12 km²), menjadikan kecamatan Umbulharjo menjadi kecamatan yang paling tidak padat yaitu sekitar 8.492 jiwa/km². Sementara Kecamatan Pakualaman adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 9.254 jiwa, dengan luasan wilayah yang tidak besar (0,63 km²) menjadikan Kecamatan Pakualaman menjadi cukup padat dengan kepadatan sebesar 14.688 jiwa/km².

Berdasarkan data diatas Kota Yogyakarta memiliki kerentanan sosial yang tinggi terhadap bahaya wabah penyakit, gempa bumi, banjir dan cuaca ekstrim, disebabkan keterpaparan yang tinggi pada aspek sosial

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kemantren	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Danurejan	10.427	10.938	21.365
2	Gedongtengen	9.652	10.031	19.683
3	Gondokusuman	20.835	22.344	43.179
4	Gondomanan	7.252	7.617	14.869
5	Jetis	13.245	14.041	27.286
6	Kotagede	17.091	17.617	34.708
7	Kraton	10.598	11.157	21.755
8	Mantrijeron	17.248	18.221	35.469
9	Mergangsan	15.431	16.444	31.875
10	Ngampilan	8.930	9.355	18.285
11	Pakualaman	5.124	5.533	10.657
12	Tegalrejo	18.279	19.112	37.391
13	Umbulharjo	34.743	36.269	71.012
14	Wirobrajan	13.693	14.264	27.957
Kota Yogyakarta		202.548	212.943	415.491

Sumber: Data Dukcapil Kota Yogyakarta Tahun 2021

3. Topografi

Wilayah Kota Yogyakarta sebagian besar berada pada kemiringan 0-2% yakni dengan luas 2.890,93 hektar atau mencapai 88,94 persen wilayah Kota Yogyakarta. Sementara itu, 313,32 hektar (9,64 persen) berada pada kemiringan 2-15%, dan 35,34 hektar (1,08 persen) berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 10,94 hektar (0,34 persen) berada pada kemiringan diatas 40%. Wilayah dengan kemiringan diatas 40% terdapat di bantaran sungai. Kondisi topografi tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi wilayah Kota Yogyakarta ada pada relief datar. Kondisi wilayah yang datar menjadi suatu potensi serta konsekuensi dalam pengelolaan dan

pengembangan wilayah, diantaranya dalam perkembangan perkotaan maupun permukiman.

Kemiringan lereng di wilayah kota Yogyakarta 88,94% didominasi kemiringan 0-2%. Karakter kemiringan seperti ini berkontribusi kepada kerawanan banjir, sehingga sesuai dengan kajian risiko bencana kota Yogyakarta tahun 2022 dengan tingkat risiko tinggi terhadap banjir

Tabel 2. 3 Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah di Kota Yogyakarta

No.	Kemiringan Lereng (%)	Luas (Ha)	Persen
1	0 – 2%	2.890,93	88,94
2	2 – 15%	313,32	9,64
3	15 – 40 %	35,34	1,08
4	>40 %	10,94	0,34
Jumlah		3.250,53	100

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Dilihat dari ketinggian di atas permukaan laut wilayah Kota Yogyakarta, diketahui bahwa antar Kemantren di Kota Yogyakarta memiliki ketinggian dengan rata-rata ketinggian sebesar 126,00 mdpl

Tabel 2. 4 Tinggi Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Air Laut Berdasarkan Kemantren Tahun 2021

No.	Kemantren	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Tegalrejo	128,90
2.	Jetis	114,00
3.	Gondokusuman	152,00
4.	Danurejan	159,00
5.	Gedongtengen	156,90
6.	Ngampilan	125,00
7.	Wirobrajan	128,00
8.	Mantrijeron	113,00
9.	Kraton	114,00
10.	Gondomanan	96,00
11.	Pakualaman	157,00
12.	Mergangsan	119,30
13.	Umbulharjo	126,00
14.	Kotagede	110,00

Sumber: Rencana Program Investasi Jangka Menengah Tahun 2013-2017

4. Hidrologi

Wilayah Kota Yogyakarta adalah bagian dari dataran kaki fluvio vulkanik Merapi yang mempunyai potensi sumber daya air tanah dan air permukaan yang cukup besar. Besarnya potensi ini disebabkan karena Kota Yogyakarta termasuk cekungan bagian bawah dari lereng Gunung Merapi, sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. Sedangkan di bagian tenggara (Kecamatan Umbulharjo dan sekitarnya) jenis tanahnya adalah lempung kepasiran (sandy clay) dengan formasi geologi batuan sedimen andesit tua (old andesit). Karakteristik tanah regosol pada umumnya memiliki karakter tanah belum berkembang, tekstur tanah kepasiran, geluh, struktur tanah remah gumpal lemah, infiltrasi sedang sampai tinggi dengan solum tebal. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan, sehingga

dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Tangkapan hujan (recharge area) bagi air tanah di Kota Yogyakarta berada di lereng Gunung Merapi dan mengalir lewat akuifer lereng Merapi hingga Graben Bantul. Kedalaman air tanah antara 0,5-20 meter, semakin ke selatan muka air tanah semakin dangkal. Pemanfaatan air tanah oleh penduduk Kota Yogyakarta secara mandiri, sebagian besar berupa sumur dangkal.

4.1. Cekungan Air Tanah (CAT)

Simpanan air tanah di Kota Yogyakarta terlampar lintas batas kabupaten/kota, yaitu CAT Yogyakarta - Sleman yang mencakup wilayah di lereng selatan Gunung Merapi yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Secara geomorfologis rangkaian perbukitan Kulon Progo dan rangkaian perbukitan Baturagung yang tersusun oleh batuan Tersier membatasi CAT Yogyakarta - Sleman pada bagian barat laut dan tenggara. Sedangkan secara geologis, CAT Yogyakarta - Sleman dibatasi oleh sesar utama, yaitu sesar sepanjang Sungai Opak di bagian timur yang membentuk Graben Bantul dan Graben Yogyakarta. Litologi utama penyusun daerah Kota Yogyakarta berupa endapan muda G. Merapi.

Tabel 2. 5 Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta - Sleman, Termasuk di Dalamnya Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Cekungan Air Tanah (CAT)		Wilayah Administrasi		Litologi/Akuifer	Jumlah Air Tanah juta (m ³ tahun)	
Nama	Luas (km ²)	Kabupaten/Kota	Provinsi		Bebas (Q1)	Tertekan(Q2)
Yogyakarta - Sleman	916	Kota Yogyakarta	D.I Yogyakarta	Endapan sungai dan pematang pantai yang terdiri	509	9

			dari pasir dan kerikil
	Kab. Sleman	D.I Yogyakarta	Batuan gunung api Gunung Merapi yang terdiri dari tuff, breksi aglomerat dan lava
	Kab. Bantul	D.I Yogyakarta	Endapan gunung api Gunung Merapi dan Formasi Sentolo
	Kab. Kulonprogo	D.I Yogyakarta	Endapan alluvium yang berasal dari sungai

Sumber: Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Review RISPAM Kota Yogyakarta, 2021

Sedangkan dalam pemetaan daerah aliran sungai, letak sebagian besar Kota Yogyakarta masuk ke dalam DAS Opak yang terbagi menjadi tiga Sub DAS yaitu sub DAS Winongo, Sub DAS Code dan Sub DAS Gajahwong (Kajian Dispertaru Kota Yogyakarta 2019). Luas wilayah Kota Yogyakarta yang masuk ke dalam wilayah DAS Opak tersebut adalah sebesar 31,8 kilometer persegi atau 3180 hektar (KemenPU, 2010). Sedangkan sebagian kecil lainnya dari wilayah Kota Yogyakarta berada di dalam wilayah DAS Progo dengan luas sebesar 23,55 hektar (Paimin, et all. 2012). Wilayah DAS Progo ini terdapat di sisi Barat Kota Yogyakarta, tepatnya berada di Kelurahan Bener, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, dan Kelurahan Patangpuluhan. Sumber air permukaan terdapat di lereng Gunung Merapi, yaitu berupa sumber- sumber mata air yang kini sudah dimanfaatkan untuk pengadaan air bersih bagi Kota Yogyakarta oleh PDAM Tirtamarta, yaitu sumber Mata Air Umbul Wadon dan Kali Kuning.

4.2. Neraca Air

Neraca air menyajikan perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan air. Ketersediaan sumber daya air dalam kajian ini meliputi ketersediaan air tanah dinamis dan ketersediaan air permukaan dari sungai yang melintasi Kota Yogyakarta. Ketersediaan air tanah lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan air permukaan. Jumlah air tanah adalah 655.971.822 m³/tahun, sedangkan ketersediaan air permukaan atau air sungai adalah sejumlah 425.352.356 m³/tahun. Total ketersediaan air di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 1.081.324.178 m³/tahun.

Hasil klasifikasi neraca air total Kota Yogyakarta diperoleh dari kebutuhan air total dibagi dengan ketersediaan air total. Nilai kelas neraca air total tertinggi berada di Kecamatan Kotagede sebesar 0,04 dan nilai terendah berada di Kecamatan Gondomanan, Kraton, dan Pakualaman sebesar 0,01. Kelas neraca air total seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta termasuk dalam kelas IV. Kelas IV merupakan klasifikasi yang paling rendah yaitu berarti ketersediaan air total di Kota Yogyakarta masih dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 6 Klasifikasi Neraca Air Total Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	Kemantren	Ketersediaan Air Total (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Kelas Neraca Air Total	Klasifikasi
1	Danurejan	59.218.479	898.735	0,02	IV
2	Gedongtengen	53.234.676	932.921	0,02	IV
3	Gondokusuman	125.533.110	2.331.361	0,02	IV
4	Gondomanan	68.549.986	684.763	0,01	IV
5	Jetis	67.033.710	1.100.849	0,02	IV
6	Kotagede	41.621.531	1.712.476	0,04	IV
7	Kraton	54.971.052	820.145	0,01	IV
8	Mantrijeron	63.212.791	1.570.917	0,02	IV
9	Mergangsan	60.831.857	1.522.527	0,03	IV
10	Ngampilan	45.474.229	814.679	0,02	IV

No	Kemantren	Ketersediaan Air Total (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Kelas Neraca Air Total	Klasifikasi
11	Pakualaman	48.641.117	440.281	0,01	IV
12	Tegalrejo	97.071.066	1.904.304	0,02	IV
13	Umbulharjo	254.968.962	4.524.728	0,02	IV
14	Wirobrajan	40.961.613	1.216.785	0,03	IV
	Jumlah	1.081.324.178	20.475.471	0,02	IV

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2019 Kota Yogyakarta,

5. Iklim

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2021 terjadi pada bulan November, yaitu sebanyak 495,5 mm³. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember, yakni sebanyak 24 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, terendah terjadi pada bulan September sebesar 71,4%. Sedangkan rata-rata tekanan udara pada tahun 2021 sebesar 992,64 mb dan suhu udara rata-rata 28,150C.

Tabel 2. 7 Kondisi Suhu Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Bulan	Suhu Udara (oC)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	22,20-33,00	22,20 – 33,60	23,5-31,8	22,0–33,4	22,4–33,0
2	Februari	22,20-33,80	21,30 – 33,80	23,6-31,8	23,2–33,8	21,8–33,0
3	Maret	22,40-32,80	22,20 – 33,20	23,4-31,1	22,8–33,4	22,0–33,8
4	April	22,00-33,00	21,40 – 33,80	23,9-32,4	22,2–34,2	21,1–34,0
5	Mei	20,60-33,40	21,20 – 34,00	22,9-32,8	23,0–34,2	21,6–34,6
6	Juni	21,20-33,00	20,00 – 33,80	20,7-30,8	21,0–33,4	21,7–33,2
7	Juli	18,40-33,80	16,40- 32,40	19,9-30,6	18,0–32,8	19,0–33,6

8	Agustus	19,80-34,30	16,60 – 32,00	20,3-30,6	19,9–35,0	20,6–33,4
9	September	18,60-33,60	19,40 – 33,40	21,1-31,9	21,8–34,6	21,0–34,2
10	Oktober	22,80-33,80	20,80 – 34,00	23,0-32,5	22,4–34,2	22,0–34,2
11	November	22,00-33,60	22,60 -34,80	24,0-31,3	22,5–34,2	22,4–32,4
12	Desember	21,20-32,60	22,70 - 32,80	24,2-33,0	21,0–33,4	22,8–33,4

Tabel 2. 8 Kondisi Suhu Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Bulan	Hari Hujan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	28,00	31	25	22	20
2	Februari	24,00	19	20	24	23
3	Maret	21,00	15	25	23	17
4	April	20,00	14	4	17	11
5	Mei	7,00	8	-	15	3
6	Juni	5,00	6	1	5	12
7	Juli	4,00	0	-	2	2
8	Agustus	1,00	5	-	5	9
9	September	6,00	8	-	3	6
10	Oktober	14,00	0	-	18	10
11	November	25,00	17	17	11	23
12	Desember	22,00	22	19	16	24

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

6. Geologi

Kota Yogyakarta sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. Tanah regosol merupakan tanah hasil erupsi gunung berapi yang cenderung subur, tekstur tanahnya kasar, berbutir kasar, peka terhadap erosi, berwarna keabuan, kaya unsur hara, cenderung gembur, dan mudah tererosi. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan, sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Kondisi tanah Kota Yogyakarta terbilang cukup

subur dan memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian.

Formasi geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen old andesite (batuan sedimen andesit tua). Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yakni Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota, Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota, dan Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta disusun oleh litologi endapan merapi muda, hal ini menyebabkan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana gempa bumi yang tinggi karena endapan merapi muda yang belum terkompaksi sehingga mudah merambatkan gelombang gempa.

7. Ekonomi

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2. 9 PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
Nilai PDRB (Miliar Rp)	31.309,05	33.787,58	36.492,64	35.757,45	38.416,52
Jumlah Penduduk (jiwa)	422.732	427.498	431.939	373.589	376.324

PDRB perkapita (Ribu Rupiah/jiwa)	74.063,58	79.035,65	84.277	95.681	102.084
---	-----------	-----------	--------	--------	---------

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022 Keterangan: *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara*

Nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,39% per tahun. Pada tahun 2017 PDRB per kapita sebesar 74.063,58 ribu rupiah/jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 102.084 ribu rupiah/jiwa pada tahun 2021. Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakarta didukung oleh karakteristik wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya jauh lebih beragam dan kompleks.

Kontribusi utama pada pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta bersumber dari sektor pariwisata dan UMKM. kondisi ini akan memberikan kerawanan yang tinggi pada sektor ekonomi apabila sektor prioritas tersebut tidak mengintegrasikan pengurangan risiko bencana. Perencanaan pembangunan pariwisata dan UMKM harus memastikan ketangguhan pada sektor prioritas ini sehingga lebih kuat dan lenting ketika menghadapi bencana.

B. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB Tahun 2022, Kota Yogyakarta termasuk peringkat ke-507 tingkat Nasional dengan kelas risiko bencana Sedang. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta. Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dan Provinsi DIY serta rekapitulasi Pusdalops Kota Yogyakarta. Berdasarkan data kejadian bencana dari KRB serta dokumen pendukung lainnya terdapat 7 (Tujuh) jenis bencana yang pernah terjadi di wilayah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 1867 – 2023,

Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Kejadian dan dampak bencana yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta dari tahun 1867 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Kejadian dan Akibat Bencana

Jenis bencana	Jumlah	Korban (jiwa)			Rumah (unit)			Kerusakan fasilitas (unit)
		MH	LL	MM	RB	RS	RR	
Banjir	50			847			4	
Wabah Penyakit	8	572		50.665				
Cuaca Ekstrem	168		11	3	2	1	124	13
Gempabumi	20	218	318	145.796	4.129		10.219	478
Kegagalan Teknologi	1							
Kekeringan Meteorologi	0							
Letusan Gunungapi	0							
Jumlah	247	789	329	197.311	4.131	1	10.343	491

Sumber:KRB Kota Yogyakarta, dibi.bnppb.go.id dan infocovid19

Berdasarkan Tabel 2.10 terlihat bahwa Kota Yogyakarta pernah mengalami bencana sebanyak 247 kejadian dari tahun 1867 – 2023. Namun demikian Kota Yogyakarta pernah mengalami kejadian bencana dengan dampak yang besar yaitu gempabumi pada 2006. Kejadian bencana tersebut menimbulkan berbagai dampak seperti korban jiwa dan kerusakan yang merugikan dari sisi fisik maupun ekonomi.

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa kejadian cuaca ekstrim merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Kota Yogyakarta dengan kejadian sebanyak 155 kali dalam kurun waktu 1867 – 2023, sedangkan kejadian banjir berada di urutan ke dua dengan 43 kejadian dengan korban jiwa sebanyak 850 jiwa menderita dan mengungsi. Selain itu gempa bumi 2006 dan wabah penyakit covid 19 juga menimbulkan banyak korban jiwa.

Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan merujuk pada Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB. Catatan sejarah kejadian bencana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menentukan kecenderungan potensi bencana.

Tabel 2. 11 Data Kejadian Bencana di Kota Yogyakarta periode 1867 – 2023

Kejadian	1867-1999	2000-2005	2005 - 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
Banjir	0	0	0	0	1	4	1	0	1	33	3	1	3	3			50
Wabah Penyakit	0	1	0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1	8
Cuaca Ekstrem	1	1	2	1	1	0		1	1	19	2	33	51	50	0	0	168
Gempabumi	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	5	0	0	20
Kegagalan Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Kekeringan Meteorologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letusan Gunungapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: <https://dibi.bnpb.go.id> dan <http://bpbd.jogjaprovo.go.id>

Menurut data kejadian diatas, bencana cuaca ekstrim memiliki frekuensi kejadian yang paling tinggi yaitu 168 kali, diikuti oleh banjir dengan 50 kali kejadian, gempabumi 20 kali kejadian.

Tabel 2. 12 Tingkat kecenderungan berdasarkan kejadian

Jenis Bencana	Gambaran Kecenderungan	Tingkat Kecenderungan: Menurun/Tetap/Meningkat	Sumber Data/informasi atau Rujukan
Banjir	50	Tetap	DIBI dan BPBD Kota Yogyakarta
Wabah Penyakit	8	Menurun	Dinas Kesehatan
Cuaca Ekstrem	168	Meningkat	DIBI dan BPBD Kota Yogyakarta
Gempabumi	20	Meningkat	DIBI dan BPBD Kota Yogyakarta
Kegagalan Teknologi	1	Menurun	DIBI dan BPBD Kota Yogyakarta
Kekeringan Meteorologi	0	-	DIBI dan BPBD Kota Yogyakarta
Letusan Gunungapi	0	-	DIBI dan BPBD Kota Yogyakarta

Sumber: KRB Kota Yogyakarta 2021, dinas kesehatan, <https://dibi.bnpb.go.id> dan <http://bpbd.jogjaprov.go.id> FGD tim penyusun RPB Kota Yogyakarta

Tabel 2. 13 Persandingan Tingkat Risiko dan Tingkat Kecenderungan

Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan: Menurun/Tetap/Meningkat	Argumentasi tingkat kecenderungan
Banjir	Sedang	Tetap	Intensitas kejadian tetap dan berulang, dampak besar dan luas
Wabah Penyakit	Sedang	Menurun	Intensitas kejadian menurun dan berulang, sebaran semakin mengecil

Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan: Menurun/Tetap/Meningkat	Argumentasi tingkat kecenderungan
Cuaca Ekstrem	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian meningkat dan berulang, dampak besar dan luas
Gempabumi	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian meningkat dan berulang, dengan sebaran yang meluas
Kegagalan Teknologi	Tinggi	Menurun	Intensitas kejadian menurun tidak berulang
Kekeringan Meteorologi	Tinggi	-	Belum pernah terjadi namun berpotensi terjadi
Letusan Gunungapi	Rendah	-	Belum pernah terjadi namun berpotensi terjadi

Sumber: KRB Kota Yogyakarta 2021 dan <https://dibi.bnpb.go.id>

C. RISIKO BENCANA KOTA YOGYAKARTA

1. Profil Ancaman Bencana

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022-2026 rekapitulasi seluruh jenis bahaya yang berpotensi di Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya, detail gambaran indeks bahaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Rekapitulasi Bahaya di Kota Yogyakarta

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1.	Banjir	3.250	Tinggi
2.	Wabah Penyakit	3.250	Tinggi
3.	Cuaca ekstrem	3.250	Tinggi
4.	Gempabumi	3.250	Tinggi
5.	Kegagalan Teknologi	24	Tinggi
6.	Kekeringan Meteorologi	3.250	Sedang
7.	Letusan Gunungapi	35	Rendah

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022-2026*

Tabel diatas menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh potensi bahaya di Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Yogyakarta memiliki kelas Tinggi untuk bencana banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempabumi, dan kegagalan teknologi. Sedangkan kelas Sedang untuk bencana Kekeringan Meteorologi dan kelas Rendah untuk bahaya letusan gunungapi.

2. Profil Kerentanan Bencana

Pengkajian kerentanan berdasarkan komponen kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Adapun rekapitulasi kajian kerentanan untuk penentuan potensi penduduk terpapar bencana di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Yogyakarta

No	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Disabilitas	Penduduk Miskin	Umur Rentan	
1	Banjir	415.491	3.454	48.310	64.451	Tinggi
2	Wabah Penyakit	415.491	3.426	47.933	63.892	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	415.491	3.441	48.094	64.213	Tinggi
4	Gempabumi	415.491	3.443	48.177	64.249	Tinggi
5	Kegagalan Teknologi	3.101	27	342	481	Tinggi
6	Kekeringan Meteorologi	415.491	3.446	48.194	64.313	Tinggi
7	Letusan Gunungapi	5.201	37	724	783	Tinggi

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022-2026*

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan potensi penduduk terpapar seluruh potensi bencana di Kota Yogyakarta berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap bencana di suatu wilayah. Hal tersebut dilihat berdasarkan luasan bahaya dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Gempabumi dan Kekeringan Meteorologi memiliki jumlah penduduk terpapar yang sama dikarenakan luasan kedua bahaya tersebut

mencakup seluruh wilayah administrasi. Sementara itu, hasil kajian kerentanan terkait potensi kerugian (fisik, ekonomi, dan lingkungan) untuk seluruh bencana di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2. 16 Potensi Kerugian Bencana di Kota Yogyakarta

Jenis Bencana	Kerugian (juta rupiah)					Kerusakan lingkungan (ha)		Kelas
	Kerugian fisik	Kelas	Kerugian ekonomi	Kelas	Total kerugian	Luas	Kelas	
Banjir	1.146.184	Tinggi	19.467	Sedang	1.165.651	0	Rendah	Tinggi
Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-	-	Tinggi
Cuaca ekstrim	1.933.951	Tinggi	38.934	Sedang	1.972.885	-	-	Tinggi
Gempa-bumi	1.364.823	Tinggi	79	Sedang	1.364.902	-	-	Tinggi
Kegagalan Teknologi	0	Rendah	0	Rendah	0	0	0	Tinggi
Kekeringan Meteorologi	-	-	34.067	Sedang	34.067	-	-	Tinggi
Letusan Gunungapi	0	Rendah	0	Sedang	0	0	Rendah	Rendah

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022-2026

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa potensi kerugian baik itu kerugian ekonomi, fisik maupun kerusakan lingkungan di Kota Yogyakarta berbeda-beda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil analisis kerentanan fisik, ekonomi, dan lingkungan yang ada. Total kerugian merupakan penjumlahan dari kerugian fisik dan kerugian ekonomi. Kelas yang diambil merupakan kelas maksimum antara kelas kerugian fisik dan kerugian ekonomi. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa potensi kerugian fisik dominan berada pada kelas tinggi dan kelas kerugian ekonomi dominan pada kelas sedang. Sedangkan total kelas kerentanan berada pada tingkat kerentanan tinggi. Mengacu pada metodologi oleh BNPB, baik nilai kerugian fisik dan ekonomi maupun kerusakan lingkungan hanya dihitung pada wilayah yang terkena kelas Bahaya sedang dan tinggi, sedangkan untuk kelas Bahaya rendah dianggap tidak mengalami kerugian.

3. Profil Kapasitas Bencana

Hasil pemetaan kajian ketahanan daerah Kota Yogyakarta dalam menghadapi bahaya bencana yang mungkin terjadi dapat dilihat pada Tabel 2. 17.

Tabel 2. 17 Hasil Kajian Ketahanan Kota Yogyakarta

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.86	0.65	Sedang
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.70		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.70		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.73		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.65		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.64		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.46		

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022-2026 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat

Kajian kesiapsiagaan kelurahan dilakukan berdasarkan metode Focus Group Discussion (FGD). Berdasarkan FGD tersebut, maka diperoleh hasil kesiapsiagaan kelurahan di Kota Yogyakarta. Adapun hasil kesiapsiagaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 18

Tabel 2. 18 Hasil Kajian Kesiapsiagaan Kemantren di Kota Yogyakarta

Jenis Bahaya	Pengetahuan Kesiapsiagaan	Sistem Peringatan Dini	Perencanaan Tanggap Darurat	Mobilisasi Sumber Daya	Indeks Kesiapsiagaan	Level Kesiapsiagaan
Banjir	0.78	0.63	0.78	0.85	0.76	Sedang
Wabah Penyakit	0.77	0.71	0.78	0.85	0.78	Sedang
Cuaca ekstrem	0.75	0.69	0.78	0.85	0.77	Sedang
Gempabumi	0.81	0.54	0.77	0.85	0.74	Sedang
Kegagalan Teknologi	0.01	0	0.78	0.85	0.41	Sedang
Kekeringan Meteorologi	0.34	0.43	0.78	0.85	0.6	Sedang
Letusan Gunungapi	0.64	0.64	0.78	0.85	0.73	Sedang
Multi Bahaya	0.59	0.52	0.78	0.85	0.69	Sedang

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022-2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indeks kesiapsiagaan kelurahan di Kota Yogyakarta berada pada kelas Sedang. Hasil kajian kesiapsiagaan kelurahan berdasarkan tabel di atas menunjukkan indeks kesiapsiagaan kelurahan di Kota Yogyakarta berada pada level sedang dengan indeks 0,69. Indeks kesiapsiagaan tersebut diperoleh dari hasil pengkajian setiap parameter-parameter kesiapsiagaan. Sebagian parameter masih perlu ditingkatkan, terutama pada parameter Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), Sistem Peringatan Dini (SPD), dan Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD). Selain itu, juga diperlukannya optimalisasi terhadap Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Mobilisasi Sumberdaya (MS)

Kelas kapasitas didapatkan dengan menggabungkan kajian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan di Kota Yogyakarta. Hasil kajian kapasitas Kota Yogyakarta secara umum dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Hasil Kajian Kapasitas Bencana di Kota Yogyakarta

Jenis Bencana	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
Banjir	0,69	Tinggi
Wabah Penyakit	0,69	Tinggi
Cuaca ekstrem	0,69	Tinggi
Gempabumi	0,69	Tinggi
Kegagalan Teknologi	0,49	Sedang
Kekeringan Meteorologi	0,60	Sedang
Letusan Gunungapi	0,68	Tinggi
Multi Bahaya	0,66	Tinggi

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022-2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa kapasitas Kota Yogyakarta dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi berada pada kelas Sedang dan Tinggi. Dengan kapasitas Sedang dan Tinggi maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkannya guna untuk mengurangi dampak risiko yang akan timbul.

4. Risiko Bencana

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Dari hasil penggabungan tingkat Bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kota Yogyakarta. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bahaya di Kota Yogyakarta memiliki potensi dengan tingkat risiko Sedang pada bahaya banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrim gempabumi.

Tabel 2. 20 Tingkat Risiko Bencana di Kota Yogyakarta

Jenis bahaya	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko Bencana
Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Wabah Penyakit	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Cuaca ekstrem	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Kegagalan Teknologi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kekeringan Meteorologi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Letusan Gunungapi	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
Multibahaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022-2026

D. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/ kegiatan dan mekanisme umum yang dijabarkan dalam kerangka penyelenggaraan bencana baik manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan. Proses perumusan prioritas risiko bencana yang ditangani jika kedua hal tersebut terpenuhi, yakni dengan melakukan analisis pada komponen:

1. Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
2. Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan / atau merujuk pada DIBI BNPB.

Risiko bencana prioritas yang ditangani dalam 5 (tahun) periode Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (trend) terjadinya bencana. Pilihan (risiko) bencana yang prioritas ditangani mempengaruhi pilihan aksi dalam pengelolaan risiko bencana

Pembahasan prioritas ini berdasarkan risiko yang muncul dari hasil Kajian Risiko Bencana tahun 2022 - 2026, Kota Yogyakarta memiliki tujuh potensi bencana yang memiliki potensi terjadi di Kota Yogyakarta, antara lain: (1) Banjir; (2) Cuaca Ekstrim; (3) Wabah Penyakit; (4) Kegagalan Teknologi; (5) Kekeringan Meteorologi; (6) Gempabumi; (7) Letusan Gunungapi. Berdasarkan analisis tingkat risiko dan kecenderungan diatas, prioritas Risiko bencana yang ditangani Kota Yogyakarta adalah:

1. Cuaca Ekstrim
2. Gempabumi
3. Banjir
4. Kekeringan
5. Kegagalan Teknologi
6. Wabah penyakit
7. Letusan Gunungapi

Berdasarkan kesepakatan dalam FGD Proses Penyusunan Dokumen RPB Kota Yogyakarta 2024-2026 pada penentuan prioritas bencana disepakati bahaya prioritas yang perlu ditangani seperti pada pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 21 Matrik Prioritas Risiko Bencana

RISIKO BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN	MENINGKAT			Cuaca Ekstrim Gempabumi
	TETAP		Banjir	
	MENURUN	Gunungapi	Wabah Penyakit	Kekeringan Kegagalan Teknologi

Pada matrik prioritas risiko bencana warna merah merupakan prioritas dalam kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, sedangkan pada bencana non prioritas dengan warna kuning dan hijau kegiatan dilaksanakan secara umum apabila sumberdaya masih tersedia, dapat ditambahkan dengan kegiatan pencegahan dan mitigasi

E. MASALAH POKOK

Masalah pokok merupakan masalah utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.

Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.

Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas diidentifikasi melalui kondisi yang mengakibatkan tingginya keterpaparan daerah terhadap bahaya bencana pada semua bencana yang menjadi prioritas. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) terutama pada pengkajian kerentanan pada aspek sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan digunakan.

Faktor kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana diidentifikasi melalui hasil penilaian kapasitas penanggulangan bencana daerah yang dimiliki daerah, misalnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD), khususnya kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana dari komponen yang pencapaiannya rendah.

Faktor Kesenjangan Terhadap Pencapaian Isu Strategis atau Visi/Misi Kepala Daerah diidentifikasi melalui pengkajian atas RPJMD, khususnya telaah terhadap isu strategis, visi/misi urusan penanggulangan bencana, dan pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana. Termasuk menganalisis masalah dengan melakukan analisis kesenjangan (gap) bagaimana pencapaian urusan wajib penanggulangan bencana. Analisis kesenjangan sasaran/tujuan/indikator RPJMD yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas
 - a. Belum optimalnya mitigasi risiko banjir dan cuaca ekstrem
 - b. Belum optimalnya penguatan kapasitas kesiapsiagaan di level masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan
 - c. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat, dalam merespon bencana berbasis ketahanan ekonomi
2. Faktor kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana
 - a. Belum ada kebijakan dan kelembagaan multi stakeholder di Kota Yogyakarta dan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana
 - b. Belum optimalnya data informasi sistem penanggulangan bencana
 - c. Masih kurangnya kebijakan dan mekanisme pemulihan dasar, infrastruktur dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
 - d. Belum optimalnya sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder
3. Faktor Kesenjangan Terhadap Pencapaian Isu Strategis atau Visi/Misi Kepala Daerah
 - a. Belum optimalnya pembangunan ekonomi berbasis pengurangan risiko bencana (identifikasi sampai pengembangan UMKM dan pariwisata)

- b. Masih Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau Publik Ruang Terbuka Hijau
- c. Masih lemahnya penegakan hukum pada daerah sempadan sungai
- d. Lemahnya pemeliharaan Aliran Air/Drainase
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah

F. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 3 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok.

Penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan.

Lima kriteria strategis tersebut adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan.
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.

4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan.

5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Tabel 2. 22 Pembobotan Masalah Pokok

NO.	MASALAH POKOK	PEMBOBOTAN BERDASARAKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	Belum optimalnya mitigasi risiko banjir dan Cuaca Ekstrim	5		5	3	4	22
2	Belum optimalnya penguatan kapasitas kesiapsiagaan di level masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan	3	5	5	4	5	22
3	Belum optimalnya kelembagaan masyarakat, dalam merespon bencana berbasis ketahanan ekonomi	5	5	5	3	3	21
4	Rendahnya perencanaan, kebijakan dan kelembagaan multi stakeholder yang kolaboratif dalam penanggulangan bencana	3	5	4	3	2	17
5	Belum optimalnya data informasi sistem penanggulangan bencana	3	5	5	4	3	20
6	Masih kurangnya kebijakan dan mekanisme pemulihan dasar, infrastruktur dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	5	4	4	4	5	22
7	Belum optimalnya sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder	5	4	4	5	5	23

NO.	MASALAH POKOK	PEMBOBOTAN BERDASARAKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
		8	Belum optimalnya pembangunan ekonomi berbasis pengurangan risiko bencana (identifikasi sampai pengembangan UMKM dan pariwisata)	5	5	5	
9	Lemahnya penegakan hukum pada daerah sempadan sungai	5	5	3	3	5	21
10	Lemahnya pemeliharaan Aliran Air/Drainase	3	4	5	3	5	20
11	Masih Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	4	3	3	5	18
12	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Limbah	4	5	4	3	5	21

Kriteria strategis ini mempersempit sepuluh masalah pokok menjadi empat isu strategis. Nilai-nilai tersebut di peringkat berdasarkan tinggi rendahnya. Lima isu strategis ini merupakan kegiatan/aksi yang optimal dan efektif ditangani dalam jangka waktu lima tahun.

Tabel 2. 23 12 (duabelas) isu pokok yang menjadi prioritas di Kota Yogyakarta

NO	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
1	Rendahnya perencanaan, kebijakan dan kelembagaan multi stakeholder yang kolaboratif dalam penanggulangan bencana	1. Penyelenggaraan PB kolaboratif belum optimal
2	Lemahnya penegakan hukum pada daerah sempadan sungai	
3	Masih kurangnya kebijakan dan mekanisme pemulihan dasar, infrastruktur dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	2. Lemahnya perencanaan kedaruratan dan pemulihan

NO	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
4	Belum optimalnya sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder	3. Meningkatnya Risiko bencana seiring penurunan kualitas lingkungan,
5	Belum optimalnya data informasi sistem penanggulangan bencana	
6	Belum optimalnya mitigasi risiko banjir dan Cuaca Ekstrem	
7	Lemahnya pemeliharaan Aliran Air/Drainase	4. Lemahnya kualitas partisipasi dan mandiri masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana
8	Masih Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
9	Belum optimalnya penguatan kapasitas kesiapsiagaan di level masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan	
10	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Limbah	5. Meningkatnya kerentanan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Pariwisata yang berisiko bencana
11	Belum optimalnya pembangunan ekonomi berbasis pengurangan risiko bencana (identifikasi sampai pengembangan UMKM dan pariwisata)	
12	Belum optimalnya kelembagaan masyarakat, dalam merespon bencana berbasis ketahanan ekonomi	

Berdasarkan hasil pemilihan skoring yang dilakukan pada saat kegiatan FGD 3 Penyusunan Dokumen RPB Kota Yogyakarta 2024-2026 yang dihadiri oleh Tim Teknis Penyusunan RPB yang terdiri dari perwakilan berbagai badan/dinas terkait, maka disepakati bahwa terdapat 12 (duabelas) isu pokok yang menjadi prioritas di Kota Yogyakarta dan kemudian reformulasi kembali menjadi 5 (lima) isu strategis seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 24 Isu Strategis

ISU STRATEGIS
Penyelenggaraan PB kolaboratif belum optimal
Meningkatnya Risiko bencana seiring penurunan kualitas lingkungan
Lemahnya perencanaan kedaruratan dan pemulihan

Lemahnya kualitas partisipasi dan mandiri masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana

Meningkatnya kerentanan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Pariwisata yang berisiko bencana

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

1.1. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, penanggulangan bencana adalah salah satu bagian yang diperhatikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dalam pencapaian Visi Indonesia emas 2045 terdapat delapan misi (agenda), yaitu 1) Transformasi Sosial, 2) Transformasi Ekonomi, 3) Transformasi Tata Kelola, 4) Transformasi Supremasi Hukum, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta 8) Kestinambungan Pembangunan.

Visi Indonesia emas 2024 yang dituangkan dalam delapan misi (agenda), dan 17 arah tujuan pembangunan, pada setiap misi (agenda) hampir seluruhnya termuat upaya penanggulangan bencana, pada misi pertama Transformasi Sosial, upaya penanggulangan bencana terlihat pada tiga arah tujuan pembangunan diantaranya penguatan sistem Kesehatan yang Tangguh dan responsive, Pendidikan yang berkualitas dan merata serta perlindungan sosial yang adaptif. Misi kedua Transformasi Ekonomi, dalam misi ini terdapat lima tujuan Pembangunan salah satu tujuan pembangunan harapan Indonesia terkait pengembangan iptek dan ekonomi salah satu yang utama adalah bidang kebencanaan dan mitigasi. Misi ketiga yaitu Transformasi Tata Kelola, mempunyai satu tujuan pembangunan yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif secara terpadu yang erat kaitanya dengan penanggulangan bencana. Misi empat Transformasi Supremasi Hukum, dengan tiga arah tujuan, pada misi ini

penanggulangan bencana terlihat pada upaya pemerintah dalam memperkuat sinergi dan fokus diplomasi dengan cara bekerjasama secara internasional dalam menangani krisis bencana secara responsive baik alam maupun non.alam, Misi lima Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi, misi ini sebagai landasan dalam mewujudkan transformasi sosial, tata kelola dan ekonomi, serta erat kaitannya dengan penanggulangan bencana, misi ini berfokus pada agama, budaya, kesetaraan gender, masyarakat yang inklusif, lingkungan hidup yang berkualitas, mandiri secara energi air, berketahanan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, sidangnya pada implementasi transformasi terdapat pada misi (agenda) enam, tujuh dan delapan, erat kaitannya dengan Pembangunan yang berkualitas, ramah lingkungan dan pembiayaan yang efektif, merata serta berkesinambungan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045

1.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberikan perhatian besar dalam upaya penanggulangan bencana. Sebagai penjabaran dari UUD 1945, RPJPN disusun dengan pertimbangan dasar bahwa kondisi umum negara Indonesia berada pada wilayah yang sangat rawan bencana. Dari delapan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025, topik penanggulangan bencana masuk ke dalam Misi 2, 5, 6 dan 7. Rincian penjelasan Misi RPJPN terkait dengan penanggulangan. Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan lima tahunan, yang dituangkan dalam RPJMN I (2005–2009), RPJMN II (2010–2014), RPJMN III (2015– 2019), dan RPJMN IV (2020–2024). RPJMN ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan yang terus meningkat serta pembangunan infrastruktur. Sasaran pembangunan dibidang penanggulangan bencana adalah “Menurunnya

indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”. Sasaran ini merupakan bagian dari pencapaian agenda prioritas “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Artinya, penurunan risiko bencana diharapkan bisa mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh kejadian bencana. Untuk mencapai target penurunan indeks risiko bencana tersebut, menetapkan tiga strategi utama, yaitu:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

1.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024 terdapat 7 agenda pembangunan. Pada agenda yang ke 2 disebutkan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan tata ruang. Hal itu dicapai salah satunya melalui peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pada Agenda 6 prioritas pembangunan disebutkan bahwa membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional melalui; peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Sasaran penanggulangan bencana sampai tahun 2024 mencapai 1,3% pada indikator rasio investasi PRB terhadap APBN dan 100% pada indikator kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi.

Arah kebijakan nasional untuk peningkatan lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya mencegah, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Untuk peningkatan ketahanan bencana dan iklim dikuatkan melalui konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Untuk pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan.

1.4. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RPIB)

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 telah disusun untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (pandemi COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020-2044 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan

strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044. RIPB merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang berlaku 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Visi PB dalam RIPB 2020-2044 adalah mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Sedangkan misi yang dicapai; 1) mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan, 2) mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif, 3) mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan yang prima.

Fokus capaian RIPB 2020-2024:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB;
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu mukti ancaman bencana;
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana;
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana;

10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
11. Terlaksananya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana, dan;
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Fokus capaian RIPB 2025-2029 ;

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB;
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim;
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan;

11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana;
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

1.5. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat maupun daerah, pemerintah maupun non pemerintah. RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah "Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana

bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal. Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah “Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana.”

Fokus prioritas Renas PB sebagai berikut:

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
4. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dalam pengurangan risiko bencana.
5. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif.
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
8. Penguatan sistem dan operasional penanganan darurat bencana.
9. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DIY 2017-2022 AKAN SEGERA BERAKHIR DAN PROSES PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI DIY 2022-2027 SEDANG BERJALAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur DIY yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045, yang nantinya RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi

RPJMD DIY 2022-2027 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Visi misi harus tersambung dengan dua konsep/tema dua periode selanjutnya, sekaligus merupakan visi transisi menuju RPJPD berikutnya yaitu 2025-2045.

Adapun visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tahun 2022-2027 yaitu: Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Untuk mewujudkan visi tersebut melalui empat misi sebagai berikut:

1. Mereformasi Kelurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan.
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat. .
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Berdasarkan RPD DIY Tahun 2023-2026, permasalahan pokok pembangunan DIY antara lain: Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Ketimpangan Antar Wilayah, dan Peningkatan Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Potensi Bencana. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD 2022-2027 mendatang.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2015-2021 Provinsi DIY tergolong kelas risiko sedang (126,34), terdapat 9 prioritas ancaman bencana dari total 14 jenis ancaman yang ada. Hal ini kemudian menjadi rujukan untuk pengelolaan akar masalah dari setiap ancaman bencana prioritas agar mampu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana secara menyeluruh pada berbagai sektor pembangunan.

Isu strategis pembangunan di DIY sebagaimana tertuang dalam RPD DIY 2023- 2026 salah satunya adalah mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Di samping isu strategis lainnya seperti pengembangan wilayah selatan DIY, respon peluang transnasional, perkembangan teknologi informasi, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, percepatan pembangunan perdesaan, penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris, penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan kebudayaan.

2.2. RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH PROVINSI DIY

Pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan untuk mencegah dan memitigasi risiko bencana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi DIY 2018-2038. Penataan ruang wilayah DIY mempunyai tujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar

sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi;
- b. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya;
- c. pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus;
- d. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan;
- e. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan;
- f. peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada; dan
- g. penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan.

2.3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

2.3.1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki payung hukum untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara efektif,

- responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal dan aspirasi masyarakat;
 - d. menumbuhkan kemandirian penyintas untuk bangkit dari dampak buruk bencana;
 - e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.4. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026 KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Adapun tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2.	Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Pariwisata
3.	Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
			Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

No	Misi	Tujuan	Sasaran
4.	Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
5.	Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	Terwujudnya karakter masyarakat berdaya yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

2.5. RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan untuk mencegah dan memitigasi risiko bencana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta 2021-2041. Penataan ruang wilayah Kota mempunyai tujuan mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi perkotaan berbasis budaya, pendidikan, dan pariwisata berskala internasional, yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut terdiri atas:

- a. pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan berdasarkan fungsi pusat pelayanan kawasan yang merata serta mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi secara merata berdasarkan jenis kebutuhan pergerakan secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi,

telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu, adil dan merata untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah.

B. KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Kerangka kerja Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Sesuai peraturan perundangan. Peran dan mandat Penanggulangan Bencana di daerah meliputi;

1. Kerangka Kerja Pra Bencana

Kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi pada 'situasi tidak ada potensi bencana' dan 'situasi terdapat potensi bencana'. Tujuan kerangka kerja ini adalah untuk mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan mengelola faktor-faktor risiko bencana; faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Prinsip Penyelenggaraan Pra Bencana/Pengurangan Risiko Bencana:

1. Partisipasi multi pihak;
2. Keadilan;
3. Kesetaraan;
4. Profesionalisme;
5. Kemandirian;
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
7. Tepat sasaran/efektif, dan;
8. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan

Tindakan dalam 'situasi tidak ada potensi bencana', meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana, yaitu penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu

- berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- b. Pengurangan risiko bencana, yaitu upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana atau kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - c. Pencegahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 - d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, yaitu memasukkan unsur unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
 - e. Persyaratan analisis risiko bencana, yaitu penyusunan pengkajian risiko bencana untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, dan kegiatan pembangunan.
 - f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu kegiatan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
 - g. Pendidikan dan pelatihan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, yaitu penyusunan dan penetapan pedoman dan panduan sebagai standar pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tindakan dalam 'situasi terdapat potensi bencana meliputi:

- a. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- b. Peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- c. Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tabel 3. 2 Peran Pra Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. pembuatan peta rawan bencana; 5. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana. 6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi.
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu:

PERAN	MANDAT
	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. <p>2. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. penyiapan lokasi evakuasi; f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, <p>3. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengamati gejala bencana; b. menganalisis data hasil pengamatan; c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

2. Kerangka Kerja Saat Bencana

Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan

penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respon mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat:

1. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tindakan-tindakan dalam keadaan darurat bencana dibagi ke dalam 3 status, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

1. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana

dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.

3. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Tabel 3. 3 Peran Saat Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 2. memiliki kewenangan Komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelamatan; b. pengerahan sumber daya manusia; c. pengerahan peralatan; d. pengerahan logistik. e. anggaran 3. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penentuan standar kebutuhan minimum; 2. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 3. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat 7. menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
Implementasi	<p>Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 2. penentuan status keadaan darurat bencana; 3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. pemenuhan kebutuhan dasar; 5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
--	---

3. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumberdaya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pascabencana atau kerangka kerja pemulihan bencana.

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana:

1. Membangun partisipasi
2. Mengedepankan koordinasi
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Menjaga kesinambungan
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian

8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

Tindakan-tindakan pasca bencana meliputi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dengan serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

1. Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
3. Pemulihan psikologis sosial;
4. Pelayanan kesehatan;
5. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
6. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
7. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
8. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
9. Pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

1. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
6. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
7. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
8. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Tabel 3. 4 Peran Pasca Bencana

PERAN	MANDAT
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi: Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan lintas sektor.
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.

Tabel 3. 5 Peran Organisasi saat pra bencana, darurat, pasca bencana

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
Pemerintah	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan b. Koordinasi antar OPD dalam penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana c. Updating data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur d. Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> a. Akselerasi dan sinkronisasi program dan kegiatan OPD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi b. Review perencanaan pembangunan c. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengecekan Sistem Peringatan Dini/Early Warning System di 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pemulihan lingkungan daerah bencana, prasarana

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>berbagai lokasi potensi bencana</p> <p>b. Penguatan kapasitas (pelatihan relawan, pelatihan berbagai lapisan masyarakat</p> <p>c. Berbagai upaya mitigasi seperti pengenalan dan pemantauan risiko bencana</p> <p>d. Pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup</p> <p>e. Pencegahan</p> <p>f. Pemaduan perencanaan pembangunan</p> <p>g. Penyusunan KRB dan RPB</p> <p>h. Fasilitasi pembentukan Forum PRB</p> <p>i. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</p> <p>j. Penyusunan Rencana Kontingensi</p>	<p>menjadi pos komando tanggap darurat bencana</p> <p>b. Koordinasi atas penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemberian bantuan, dan psikososial.</p> <p>c. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana</p> <p>d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat</p> <p>e. Penyiapan sarana dan prasarana</p>	<p>dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, sosial dan psikologis, kesehatan, sosial kebudayaan, pemerintahan, dan pelayanan publik.</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB l. Melakukan penelitian / riset kebencanaan m. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi n. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana o. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana p. Pengembangan Desa Tangguh Bencana q. Pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu evakuasi, dan barak pengungsian r. Pendidikan dan pelatihan PB bagi aparatur negara, masyarakat, dunia usaha	penanggulangan bencana f. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana g. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana h. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB i. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; j. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini	

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
			<ul style="list-style-type: none"> k. Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan l. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini m. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini n. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana 	
	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengadaan cadangan beras dengan APBD dengan target cadangan beras 120 ton yang akan terpenuhi tahun 2026. Sesuai pada pasal 5, cadangan beras Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penyediaan beras untuk menjaga pasokan beras yang stabil antar waktu b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penyediaan beras untuk menjaga pasokan beras yang stabil antar waktu b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>Daerah dilaksanakan setiap tahunnya dan disimpan di gudang Pemerintah Daerah dan/atau pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama</p> <p>b. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim</p> <p>c. Pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak</p> <p>d. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana</p> <p>e. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana.</p> <p>f. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan</p>	<p>mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana</p> <p>c. Instrumen stabilisasi harga beras di pasaran</p> <p>d. Meningkatkan akses beras pada masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan</p>	<p>keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana</p> <p>c. Instrumen stabilisasi harga beras di pasaran</p> <p>d. Meningkatkan akses beras pada masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan</p> <p>e. Perbaikan sarana pertanian</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian</p> <p>g. Pendampingan peningkatan pertanian</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>bencana kepada pemangku kepentingan</p> <p>g. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan</p> <p>h. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan</p> <p>i. Menyiapkan lumbung pangan</p>		
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<p>a. Memasukkan kawasan rawan bencana pada dokumen RTRW dan RDTR</p> <p>b. Penyebarluasan informasi rencana tata ruang</p>	Observasi perubahan tata ruang di situasi darurat.	a. Pembuatan kebijakan pasca bencana dengan mempertimbangkan perubahan tata ruang.

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
	Dinas Pariwisata	a. Pembinaan b. Pengawasan c. Monev d. Fasilitasi dan Penguatan e. Menginventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana f. Menerapkan pariwisata tangguh bencana g. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata h. Memasang denah dan rambu evakuasi	Memfasilitasi proses kedaruratan dengan sumberdaya dinas.	a. Penguatan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana. b. Pelaksanaan K3 dalam sektor pemulihan c. Perbaikan infrastruktur pariwisata d. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata e. Perbaikan layanan destinasi wisata
	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	a. Inventarisasi dan pemutakhiran data warisan budaya / cagar budaya agar dapat disusun rencana mitigasi bencana terhadap objek cagar budaya.	Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta	a. Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak akibat bencana dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
			memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.	mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Menerbitkan dokumen adminduk b. Verifikasi data dokumen adminduk	Verifikasi data adminduk dalam situasi bencana	a. Menerbitkan data administrasi kependudukan bagi penduduk yang hilang dokumentasi kependudukannya
	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kota Yogyakarta	a. Memberikan dukungan melalui monitoring apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD apakah telah mempertimbangkan penanggulangan bencana.a b. melakukan evaluasi internal mengenai prinsip-prinsip penanggulangan bencana dalam aktivitas OPD.	a. Mendukung melalui monitoring apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD apakah telah mempertimbangkan penanggulangan bencana. b. Secara internal mengevaluasi apakah telah menempatkan	a. Mendukung melalui monitoring apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD apakah telah mempertimbangkan penanggulangan bencana. b. Secara internal mengevaluasi apakah telah menempatkan prinsip penanggulangan

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
			prinsip-prinsip penanggulangan bencana dalam aktivitas OPD.	bencana dalam aktivitas OPD
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Penegakkan Perda RTRW b. Penegakkan ketentuan pendirian bangunan aman c. Edukasi kebencanaan Kesiapsiagaan personil dan peralatan.		
	Bagian Organisasi SETDA Kota Yogyakarta	a. Perumusan kebijakan dalam hal ini tugas dan fungsi perangkat daerah BPBD	Monitoring evaluasi kelembagaan melalui SOTK BPBD terkait divisi yang ada	a. Monitoring evaluasi kelembagaan melalui SOTK apakah perlu ditambah atau cukup tugas dan fungsi dengan kondisi pascabencana
	Bagian Hukum SETDA Kota Yogyakarta	a. Perumusan dan pengoordinasian kebijakan/regulasi terkait mitigasi bencana, dalam	Percepatan pengoordinasian untuk penanggulangan bencana melalui regulasi/produk hukum	a. Menyelenggarakan penyuluhan hukum untuk memudahkan korban melakukan rehabilitasi

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>bentuk masukan-masukan maupun produk hukum serta berperan dalam mensosialisasikan produk hukum (perda/perwal) yang terkait dengan mitigasi bencana.</p>		<p>secara psikis/keahlian supaya bisa tangguh pasca bencana</p>
	Dinas Kesehatan	<p>a. Perencanaan saat kemungkinan terjadi bencana b. Pengurangan risiko bencana c. Pencegahan bencana d. Pendidikan dan pelatihan penganggaran e. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan f. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan</p>	<p>a. Melakukan Rapid Health Assessment (RHA) terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya b. Evakuasi dan penanganan korban c. Perlindungan kelompok rentan d. Logistik alat kesehatan dan bahan medis habis pakai e. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat</p>	<p>a. Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan dan fasilitas kesehatan b. Melakukan dukungan psikososial</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>dalam penanggulangan bencana</p> <p>g. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit</p> <p>h. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p> <p>i. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana</p> <p>j. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.</p> <p>k. Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit</p> <p>l. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p> <p>m. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.</p>	<p>f. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa/KLB</p> <p>g. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar</p> <p>h. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana</p> <p>i. Pemulihan psikososial dasar</p>	

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		n. Pengelolaan Surveilans Kesehatan o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	a. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana b. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya	a. Penyiapan peralatan komunikasi b. Perbaikan jaringan telekomunikasi	Perbaikan lingkungan daerah bencana
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	a. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Membuat peta sekolah di daerah rawan bencana c. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam kurikulum pendidikan	a. Penyiapan pendidikan darurat b. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana c. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana	

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>d. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana</p> <p>e. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah</p> <p>f. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung</p>	<p>d. Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam</p> <p>e. Penyelenggaraan layanan psikososial anak</p> <p>f. Penyelenggaraan Pendidikan di masa darurat</p>	
	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	<p>a. Penegakan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>b. Penegakan hukum</p>	<p>a. Penegakan trantibum</p> <p>b. Penyiapan Peralatan dan personil kebencanaan</p> <p>c. Mengoptimalkan pengamanan aset - aset pemerintah</p> <p>d. Dukungan SAR</p>	Pengamanan daerah daerah rehabilitasi dan rekonstruksi

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
			<ul style="list-style-type: none"> e. Pengamanan aset pemerintah f. Penegakan hukum 	
	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan pohon perindang b. Evakuasi pohon tumbang c. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga d. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPLH, SPPL) e. Pengkajian dampak air dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan f. Pengendalian Tata ruang dengan Kajian Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> a. pembersihan pohon tumbang b. Kesiapan personil dan peralatan c. Penyiapan dan mobilisasi alat berat d. pengelolaan limbah dan pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembersihan pohon tumbang b. Perbaiki lingkungan daerah bencana

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>g. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif</p> <p>Pengendalian Pencemaran udara</p> <p>h. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketangguhan iklim</p> <p>i. Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam pengelolaan lahan</p> <p>j. pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>k. Pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi</p>		

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>konservasi danau, sungai dan Sumber daya air lainnya</p> <p>1. Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan</p> <p>m. Penyuluhan, monitoring dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi GRK</p>		
	<p>Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>a. Pelaksanaan SPM berupa pendataan dan relokasi rumah di lokasi rawan bencana</p> <p>b. Non SPM berupa mitigasi bencana dengan pembangunan, perkuatan talud, jalan inspeksi, dsb</p> <p>c. pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman</p>	<p>a. Pendataan rumah terdampak bencana dengan Surat Keputusan</p> <p>b. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman</p> <p>c. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat</p>	<p>a. Rehab rumah terdampak bencana dengan Surat Keputusan</p> <p>b. Perbaikan lingkungan daerah bencana</p> <p>c. Perbaikan sarana dan prasarana umum 3. Pembangunan hunian sementara</p> <p>d. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>d. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana</p> <p>e. Pembangunan instalasi penyediaan air bersih</p> <p>f. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya banjir</p> <p>g. Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir</p> <p>h. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana</p> <p>i. Pengendalian dan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir,</p> <p>j. Menyiapkan jalur evakuasi</p> <p>k. Menyiapkan alat berat</p> <p>l. Menyiapkan barak pengungsian</p>	<p>d. Penyiapan tempat pengungsian</p> <p>e. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana</p> <p>f. Penyediaan tempat pengungsian</p> <p>g. Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya</p> <p>h. Pembangunan hunian sementara</p>	<p>masyarakat, prasarana transportasi</p> <p>e. Perbaikan hunian</p> <p>f. Pembangunan hunian tetap</p> <p>g. Pembangunan sarana pelayanan publik</p> <p>h. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana</p> <p>i. relokasi rumah masyarakat terdampak bencana</p> <p>j. Rehabilitasi rumah warga terdampak bencana</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
	Dinas Perdagangan	a. Menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana b. Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (business continuity plan) pada industri dan UKM	a. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi b. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana	Melaksanakan recovery terhadap dampak dari bencana baik secara renovasi fisik maupun non fisik
	BKAD	a. Pemeliharaan aset daerah b. Tata laksana asuransi aset daerah c. Dukungan pendanaan terhadap Penanggulangan bencana	a. Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana b. monitoring dan evaluasi keuangan darurat bencana	a. Membantu memulihkan kejiwaan korban bencana melalui kegiatan psikososial (trauma Healing) b. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak c. Pemberian bantuan sosial d. Layanan jaminan sosial e. Pembangunan sarana sosial masyarakat f. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
				g.Pemberdayaan kelompok rentan
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Pengelolaan risiko bencana berbasis keluarga/keluarga tangguh bencana. b. Kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana	a.Perlindungan bagi kelompok rentan pada saat evakuasi b. Pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan di tempat pengungsian c.Perlindungan bagi kelompok rentan dari kekerasan fisik, kekerasan berbasis gender. d.Perlindungan bagi kelompok rentan	a. Pemulihan sosial, ekonomi, f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	a.Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (<i>business</i>	a.Mendata koperasi yang rusak terkena dampak bencana	a.Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi b.Bantuan permodalan dan pendampingan

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p><i>continuity plan</i>) pada industri dan UKM.</p> <p>b. Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (<i>bussines continuity plan</i>) pada industri dan UKM.</p>	<p>b.Mendata UMKM yang terdampak bencana</p>	
	DINSOSNAKETRANS	<p>a. Menyiapkan logistik, peralatan, perlengkapan, dalam rangka penanganan bencana</p> <p>b. peningkatan SDM melalui koordinasi, simulasi, sosialisasi</p> <p>c. menyiapkan regulasi</p> <p>d. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar meliputi: (1) Logistik: Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit, kidware, dll Peralatan Evakuasi/Shelter Kit: (2) Perahu evakuasi, perahu karet, tenda</p>	<p>a. Menyiapkan data pilih korban bencana melalui asesmen dan koordinasi dengan stakeholder</p> <p>b.Menginventarisasi kebutuhan untuk korban bencana</p> <p>c.Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>)</p> <p>d. Menyiapkan logistik dan dapur umum</p> <p>e.Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>)</p>	<p>a.Melakukan kegiatan psikososial terhadap korban bencana</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>regu, tenda pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset.</p> <p>e. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar.</p> <p>f. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial.</p> <p>g. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga).</p> <p>h. Pendataan keluarga penerima jaminan sosial dan bantuan sosial</p>	<p>f.Mengelola logistik dan dapur umum</p> <p>g.Pemulihan awal psikososial penyintas</p> <p>h.Mengelola bantuan</p> <p>i.Pemenuhan kebutuhan penyintas</p> <p>j.Pemulihan psikososial penyintas</p>	

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		i. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum j. Fasilitasi kebutuhan evakuasi. k. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana (program kampung siaga bencana)		
	Dinas Perhubungan		a. Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik b. Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu d. Menyediakan sarana kendaraan	a. Pemulihan pelayanan transportasi umum f. Perbaikan pelayanan transportasi umum
	Polresta Yogyakarta	Langkah-langkah pencegahan bencana mulai dari sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan	a. Dukungan personil melakukan penyelamatan evakuasi, identifikasi	a. Dukungan psikologi sosial, layanan kesehatan

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		panduan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran baik dari polres, polsek, bhabinkamtibmas, maupun polisi RW	<p>melalui DVI (Disaster Victim Identification)</p> <p>b. Dukungan sarana dan fasilitas (tenda darurat, dapur lapangan, dll)</p> <p>c. penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan</p> <p>d. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat</p> <p>e. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat</p> <p>f. Penyelidikan dan penindakan kejadian di situasi bencana</p>	<p>b. Menggelar patroli kewilayahan</p> <p>c. Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait skema penganggaran bagi personil khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana</p>
	Kodim 0734/Kota Yogyakarta	a. Memonitoring setiap perkembangan di wilayah	a. Membantu pemulihan di lokasi terdampak bencana	a. memonitoring wilayah khususnya yang berdampak

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>b.Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terbatas</p> <p>c. Selalu berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah Kota Yogyakarta khususnya</p> <p>d.Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana</p> <p>e.Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana.</p> <p>f. Rehabilitasi dan konservasi DAS</p> <p>g.Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah</p> <p>Penyiapan personil dan peralatan</p> <p>h. Peningkatan kapasitas personil</p> <p>i.Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan.</p>	<p>b.Mendirikan posko sebagai sarana penampungan sementara</p> <p>c.Membantu evakuasi dan menyalurkan bantuan sesuai sasaran</p> <p>d. menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang keamanan saat bencana</p> <p>e.Pemantauan lokasi bencana oleh personil BABINSA Koramil</p> <p>f.Penyiapan personil dan peralatan</p> <p>g.Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan</p> <p>h.Penegakan hukum</p>	<p>b.motivasi membantu proses pemulihan koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>c.melaksanakan pengamanan dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab</p> <p>d.melaksanakan patroli keamanan guna menciptakan rasa aman</p> <p>e.Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait skema penganggaran bagi personil khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		j. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan k. Penegakan hukum l. Pengamanan aset penghidupan korban bencana m. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat n. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat o. Pemulihan keamanan dan ketertiban p. Dukungan pemulihan infrastruktur penting q. Pemulihan keamanan dan ketertiban	i. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat	
	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	a. Pemantauan aktivitas Gunung Merapi b. Pemberian rekomendasi teknis mitigasi Gunung Merapi	a. Pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas Gunung Merapi	a. Penyusunan skenario bencana untuk dokumen renkon

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		c.Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana	b.Sosialisasi aktivitas Gunung Merapi terkini c.Penyampaian peringatan dini kepada stakeholder penanggulangan bencana	b.Pemberian rekomendasi status tingkat aktivitas Gunung Merapi dan rekomendasi teknis mitigasi Gunung Merapi c. Sosialisasi aktivitas Gunung Merapi terkini
	BMKG UPT Stasiun Geofisika Sleman	a.Distribusi informasi gempabumi dan tsunami ke instansi terkait dan publik b.Informasi peringatan dini tsunami ke instansi terkait dan publik c. Edukasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim d. Edukasi mitigasi bencana. e. Dukungan data terhadap kegiatan kajian pengurangan risiko bencana	a.BMKG memberikan support dalam semua kegiatan untuk meminimalisir dampak bencana serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana. b.Memberikan dukungan data terkait pemantauan cuaca dan iklim c.Melakukan Kegiatan yang selama ini sudah	a.Respon cepat informasi palsu. b.Pelaksanaan BMKG Goes to school akan lebih diintensifkan dan melibatkan lembaga yang memiliki kegiatan sejenis dan BMKG memberikan dukungan sebagai narasumber

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		f.Pemantauan dan penyebarluasan peringatan bahaya yang terkait iklim dan cuaca, dan bahaya tsunami	dilakukan BMKG Goes to school dan sekolah lapang geofisika	
	BPBD Provinsi DIY	Koordinasi dan pelaksanaan untuk instansi, lembaga dinas, badan, secara horizontal	Pendampingan pelaksanaan pada saat tanggap darurat	Koordinasi dan pelaksanaan untuk instansi, lembaga dinas, badan, secara horizontal
Perguruan Tinggi	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	Melakukan KKN tematik berbasis kebencanaan Melakukan program Merdeka belajar untuk mengurangi risiko bencana Melakukan tri dharma perguruan tinggi	Dukungan penanganan darurat.	Rekonstruksi dan rehabilitasi.
	Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan PKM Gondokusuman dan Kader Posyandu Terban	Menangani pasien korban bencana terutama anak-anak.	Pendampingan dan dukungan pasca bencana.

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		<p>mengenai desa siaga “kesehatan anak” dalam menghadapi bencana di Kali Code berupa pelatihan nakes dan kader mengenai penyakit saat bencana, nutrisi dan tumbuh kembang anak selama bencana, pelatihan BHD, identifikasi risiko bencana dan pendampingan untuk ibu dan anak dalam menghadapi bencana.</p>		
	<p>Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan UGM</p>	<p>a.Melakukan kajian dan penelitian bencana kesehatan b.Melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan advokasi c.Memberikan pelatihan penyusunan rencana penanggulangan bencana untuk rumah sakit, puskesmas, dinas</p>	<p>a.Berkoordinasi untuk pengiriman tim kesehatan dengan daerah terdampak dan Kementerian Kesehatan. b.Pengiriman Emergency Medical Team ke daerah bencana</p>	<p>a. Dampingi sektor kesehatan pada daerah terdampak di masa transisi b. Penguatan kapasitas untuk kembali ke situasi normal</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		kesehatan, dan emergency medical team.	c.Pengiriman tim manajemen kesehatan untuk mendukung pos klaster kesehatan	
	Pusat Studi Mitigasi dan Penanggulangan Bencana UAD	<p>a.Melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat seputar mitigasi untuk pengurangan risiko bencana.</p> <p>b.Pelatihan peningkatan kapasitas internal kampus terkait PRB untuk dosen, mahasiswa, karyawan, warga sekitar kampus.</p> <p>c.Pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka edukasi mitigasi dan penanggulangan bencana bagi masyarakat, mahasiswa, dan umum.</p>	Mengkoordinir penggalangan dana, penyaluran bantuan, penyaluran relawan di lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan pimpinan UAD dan MDMC.	Mengkoordinir pemulihan di lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan pimpinan UAD dan MDMC.

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
Organisasi Non Pemerintah / Masyarakat	Palang Merah Indonesia	a.Mitigasi struktural: pengurangan bencana bentuk fisik. Contohnya membangun tempat pengungsian b. Non struktural: memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap bencana c.Pelatihan relawan penanggulangan bencana d.Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana e.Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana f. Penyiapan petugas, g.peralatan, dan logistic	a.Advokasi, bidang kesehatan b. Penyiapan peralatan dan petugas c.Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat d.Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi e.Pelayanan kesehatan f.Pelayanan psikososial	Dukungan psikososial, pemulihan, rehabilitasi , rekonstruksi
	DIFAGANA	Pelatihan terhadap personil dan pembinaan anggota secara rutin	Menunggu komando dan koordinasi dari Tagana dan Ketua Difagana selalu siap	Membantu SKPDB dalam melaksanakan fungsi pemulihan.

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		dan kontinyu di markas komando di Jalan Tunjung Jogja	sedia mengamban tugas sesuai dengan arahan dalam menghadapi kebencanaan.	
	Lembaga Resilien Bencana - MDMC Kota Yogyakarta	<p>a.Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana berbasis nilai-nilai keIslaman dengan meningkatkan penguatan ketangguhan masyarakat, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lembaga usaha dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan</p> <p>b.Meningkatkan kualitas pembangunan, pendidikan, pelatihan, dan transformasi kader Muhammadiyah sebagai penggiat dan pelopor penanggulangan bencana pada tingkat komunitas, daerah, nasional, dan internasional</p>	<p>a.menjalankan sistem komando penanganan darurat bencana dari fase siaga darurat – tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan sekaligus melakukan penanganan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.</p> <p>b.mendukung penanganan darurat di daerah</p> <p>c.mendirikan pos koordinasi dan pos pelayanan</p> <p>d.SAR</p> <p>e.Kesehatan</p>	<p>a. Hunian</p> <p>b. Logistik</p> <p>c. Psikososial</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
	Radio Antar Penduduk Indonesia	<p>a. Memberikan informasi dan bantuan komunikasi missal, dari banyak pengungsian data yang dibutuhkan, berapa kapasitas yang tertampung</p> <p>b. Memberikan informasi data yang dibutuhkan melalui radio komunikasi kepada dinas</p> <p>c. Mempersiapkan alat komunikasi dan personal anggota rapi yang siap diterjunkan Ketika terjadi bencana dan melakukan pelatihan bencana</p>	<p>Membackup komunikasi yang ada di lapangan untuk disampaikan kepada Pusdalops melalui posko RAPI di BNPB semua informasi yang masuk di Pusdalops harus disampaikan melalui RAPI</p>	<p>Menyampaikan data baik data pengungsi maupun data logistic di lapangan disampaikan melalui personal RAPI yang mendampingi petugas terkait untuk disampaikan kepada PUSDALOPS ataupun instansi terkait.</p>
	ORARI Lokal Kota Yogyakarta	<p>a. Membangun jaringan sistem EWS</p> <p>b. Satgate Igate mengirim data APRS yang ditempatkan di daerah rawan bencana</p>	<p>a. Mengirim berita satelit 10-86 dari tempat yang tidak terjangkau sekalipun, mengirim gambar secara</p>	<p>a. Membantu jaringan komunikasi setempat</p> <p>b. Memberikan bantuan dari setiap anggota amatir kepada daerah yang terdampak</p>

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		c. Mempersiapkan stasiun komunikasi protokol yang siap digunakan saat bencana d. Emmcom exercise via satelit 10-8 6 / Lapan A2 ORARI e. WX Stations	detail melalui satelit dan komunikasi b. Sistem VR, SSTU, ADRS, HF c. menggerakkan seluruh anggota ORARI untuk membantu di lokasi d. bekerjasama di lokasi bencana dalam menanggulangi situasi yang ada	a. Membangun jaringan APRS yang dapat mengirim data pada daerah yang rawan bencana b. Melatih dan membina personel untuk dapat menggunakan alat komunikasi dalam keadaan darurat
Badan Usaha	Kadin Kota Yogyakarta	a. Jejaring UMKM sektor dagang dan industri b. Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pemasaran, produksi, dan distribusi UMKM	Menggalang donasi/bantuan untuk UMKM	Pendampingan UMKM terdampak bencana
	PT. BANK BPD DIY	a. Memperhitungkan dampak bencana dalam sikap implementasi kebijakannya	a. Berupaya melaksanakan fungsi perbankan disaat terjadi bencana	a. Berperan aktif mendukung pulihnya ekonomi dan sosial masyarakat pasca terjadinya bencana

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
		b. Aktif membantu masyarakat di saat terjadi dan pasca bencana c. Patuh dan taat dengan segala ketentuan dan peraturan dalam rangka tidak menimbulkan bencana d. Bersikap transparan, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugas e. Menghindari hal-hal yang dapat berpotensi menimbulkan bencana	b.Menyediakan solusi perbankan di saat masyarakat terdampak bencana, minimal di bidang ekonomi c.Turut mendukung optimalnya infrastruktur perbankan di saat terjadi bencana	b.Memberikan bantuan yang berdampak langsung kepada masyarakat yang terkena bencana c.Memberikan pelayanan perbankan dengan level yang sama atau lebih kepada masyarakat pasca terjadinya bencana
	PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Penyediaan air minum masyarakat	Bantuan ketersediaan air bersih	Pemenuhan ketersediaan air bersih
Media massa	Radio Republik Indonesia			
	Persatuan Wartawan Indonesia			

Unsur	Nama Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca bencana
	Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)			

C. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pendanaan atau anggaran untuk penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, APBDes dan/atau Masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana; yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana; dalam APBN, APBD, APBDes secara memadai. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebagai dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana untuk penanggulangan bencana diterima Pemerintah untuk dicatat dalam APBN atau APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Pendanaan atau anggaran untuk penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Pendanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional telah diatur melalui berbagai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah diterbitkan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173.PMK.05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105.PMK.05 Tahun

- 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205.PMK.05 Tahun 2021 tentang Pengakumulasian Cadangan Pooling Fund Bencana Pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82.PMK.07 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224.PMK.07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / SR.230 / 7 / 2015 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana; dan
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Tunggu Hunian.

Sementara pendanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah telah diatur melalui berbagai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah diterbitkan, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; dan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050- 5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur nomenklatur anggaran APBD untuk pembiayaan penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai urusan wajib dan urusan pilihan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembiayaan penanggulangan bencana antara lain:

1. Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah yang bisa digunakan untuk seluruh tahapan penanggulangan bencana (pra, saat dan pascabencana) sesuai dengan tujuan, kebutuhan dan peruntukannya;
2. Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial, digunakan untuk membiayai penanganan dampak kejadian dengan skala kecil, dimana tidak perlu membutuhkan penetapan status keadaan darurat bencana di daerah;
3. Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak, digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sub urusan bencana yang ruang lingkupnya terdiri dari 3 pelayanan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

4. Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat, digunakan untuk membiayai penanganan darurat bencana setelah adanya penetapan status keadaan darurat oleh kepala daerah yang telah ditetapkan ruang lingkup penggunaannya; dan
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), digunakan untuk pembiayaan:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pendanaan penanggulangan bencana dapat bersumber dari APBD yang dialokasikan pada Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, disebutkan; Pasal 5 (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi: a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pada Pasal 6 (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi: a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pendanaan dana bantuan berpola hibah.

Pengelolaan dan penggunaan anggaran dan dana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menggunakan skema sebagai berikut:

1. Pra Bencana. Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;

- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

2. Saat Darurat Bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

3. Pasca bencana. Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan rehabilitasi meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;

- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. TUJUAN DAN SASARAN

Selanjutnya, agar tercipta kesinambungan dan keselarasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka perumusan tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2024-2026 ini mengacu kepada:

1. Visi dan Misi Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional 2020-2044;
2. Visi dan Misi Gubernur DIY periode jabatan 2022-2027;
3. Visi dan Misi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 dan
4. Identifikasi Permasalahan dan Isu strategis aktual.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (RIPB 2022-2044) adalah sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam RIPB 2022-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Tujuan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 akan dicapai pada akhir tahun 2044 melalui sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

RIPB 2022-2044 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersebut mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)* 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran SFDRR, yaitu:

1. Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.
2. Pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.
3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal produk domestik bruto (PDB) dunia.
4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
5. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020.
6. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.
7. Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi masyarakat.

Visi Gubernur DIY 2022-2027 adalah “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.”

Visi ini merupakan “visi transisi” yang nantinya diteruskan sebagai rujukan dalam menyusun RPJPD 2025-2045, dengan sedikit modifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Visi transisi ini fungsinya untuk menunjukkan keberlanjutan Visi RPJPD 2005 – 2025 dengan Visi RPJPD 2025 – 2045, mengingat kurun 2022 – 2027 merupakan RPJMD terakhir dari RPJPD 2025.

Sementara itu, dalam pidato visi dan misi Gubernur DIY periode jabatan 2022- 2027, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa

permasalahan pokok yang dihadapi dan dikelola dalam pembangunan DIY ke depan adalah:

1. Kemiskinan;
2. Ketimpangan Pendapatan;
3. Ketimpangan AntarWilayah;
4. Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana; Adapun isu-isu strategis dalam pembangunan DIY periode 2022-2027 adalah:
5. Pengembangan Wilayah Selatan DIY;
6. Respon Peluang Transnasional;
7. Perkembangan Teknologi Informasi;
8. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
9. Percepatan Pembangunan Perdesaan;
10. Penyederhanaan Birokrasi dan Pemerintahan Simetris-Asimetris;
11. Penanganan dan Pemulihan Paska Pandemi COVID-19;
12. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Kebudayaan; dan
14. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan

5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Memperhatikan dan menganalisa hal-hal diatas, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2024-2026 rumusan tujuannya adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya ketangguhan Kota Yogyakarta menuju Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Kapasitas Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.”

Dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2024-2026, sasaran di atas akan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. IKD dihitung berdasarkan 71 indikator yang merepresentasikan 7 prioritas dalam pengelolaan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3)

Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran, beserta target tahunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahunan RPB Kota Yogyakarta 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline (Kondisi Awal) Tahun 2022	Target Tahunan Tujuan/Sasaran RPB					Sumber Data
					Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Kondisi Akhir Periode (2026)	
1	Terwujudnya ketangguhan Kota Yogyakarta menuju Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Yogyakarta*)	69,46	69,00	68,50	68,00	67,50	67,50	BNPB
2		Meningkatnya Kapasitas Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Yogyakarta	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,75	BPBD

*)dihitung berdasarkan 7 jenis ancaman bencana di Yogyakarta sebagaimana dalam KRB (Kajian Risiko Bencana) Tahun 2022

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran, sajikan strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 3 tahun.

Beberapa pertimbangan untuk penentuan strategi di antaranya ialah:

- Tugas dan wewenang pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mandat dan peraturan perundangan terkait, misalnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
- Kondisi internal dan eksternal pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta;
- Tingkat efektifitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 3 tahun, arah kebijakan dalam RPB dibuat dengan menentukan fokus pada setiap tahun pelaksanaan RPB. Fokus prioritas setiap tahun pelaksanaan RPB mungkin ada perbedaan, tetapi harus dipastikan sinkronisasi dan arahnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPB. Satu arah kebijakan mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih.

Untuk memudahkan perumusan, sajikan arah kebijakan dihubungkan dengan strategi, sasaran, dan tujuan RPB. Berikut adalah matrik yang bisa digunakan untuk menentukan arah kebijakan RPB dalam 3 tahun pelaksanaannya. Rumusan hasil analisis serta koherensi (kesinambungan) rumusan masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, dan strategi dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi
<p>1. Rendahnya perencanaan, kebijakan dan kelembagaan multi stakeholder yang kolaboratif dalam penanggulangan bencana</p> <p>2. Lemahnya penegakan hukum pada daerah sempadan sungai</p> <p>3. Belum optimalnya mitigasi risiko banjir dan Cuaca Ekstrem</p> <p>4. Lemahnya pemeliharaan Aliran Air/Drainase</p> <p>5. Masih Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>	<p>1. Penyelenggaraan PB kolaboratif belum optimal</p> <p>2. Lemahnya perencanaan kedaruratan dan pemulihan</p> <p>3. Meningkatnya Risiko bencana seiring penurunan kualitas lingkungan</p> <p>4. Lemahnya kualitas partisipasi dan mandiri masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana</p>	<p>Terwujudnya ketangguhan Kota Yogyakarta menuju Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan</p>	<p>Meningkatnya Kapasitas Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>	<p>1. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan multi stakeholder di Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta</p> <p>2. Penguatan penegakan hukum yang melibatkan multi pihak untuk daerah sempadan sungai</p> <p>3. Integrasi pengurangan risiko bencana kedalam RTRW</p>

<p>6. Masih kurangnya kebijakan dan mekanisme pemulihan dasar, infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana</p> <p>7. Belum optimalnya sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder</p> <p>8. Belum optimalnya data informasi sistem penanggulangan bencana</p> <p>9. Belum optimalnya penguatan kapasitas kesiapsiagaan di level masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan</p> <p>10. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Limbah</p>	<p>5. Meningkatnya kerentanan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Pariwisata yang berisiko bencana</p>			<p>4. Optimalisasi data informasi sistem penanggulangan bencana</p> <p>5. Pengembangan kebijakan dan mekanisme pemulihan dasar, infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana</p> <p>6. Penguatan sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder</p> <p>7. Penguatan mitigasi risiko banjir dan cuaca ekstrim</p> <p>8. Penguatan kapasitas kesiapsiagaan di level masyarakat, pemerintah dan lembaga Pendidikan</p>
---	---	--	--	--

<p>11. Belum optimalnya pembangunan ekonomi berbasis pengurangan risiko bencana (identifikasi sampai pengembangan UMKM dan pariwisata)</p> <p>12. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat, dalam merespon bencana berbasis ketahanan ekonomi</p>				<p>9. Penguatan kelembagaan masyarakat, dalam merespon bencana berbasis ketahanan ekonomi</p> <p>10. Pembangunan ketahanan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana</p>
--	--	--	--	---

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2024 -2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya ketangguhan Kota Yogyakarta menuju Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan</p>	<p>Meningkatnya Kapasitas Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan multi stakeholder di Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta 2. Penguatan penegakan hukum yang melibatkan multi pihak untuk daerah sempadan sungai 3. Integrasi pengurangan risiko bencana kedalam RTRW 4. Optimalisasi data informasi sistem penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Akselerasi regulasi kebijakan kelembagaan PB 1.2. Pengembangan kelembagaan forum PRB Kota Yogyakarta 1.3. Pengembangan Forum CSR untuk pengurangan risiko bencana 1.4. Perkuatan pelibatan dunia usaha, media massa dan akademisi dalam upaya pengurangan risiko bencana 2.1. Pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman 2.2. Pengendalian kemiskinan dan kawasan padat kumuh

		<p>5. Pengembangan kebijakan dan mekanisme pemulihan dasar, infrastruktur dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana</p> <p>6. Penguatan sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder</p> <p>7. Penguatan mitigasi risiko banjir dan cuaca ekstrim</p> <p>8. Penguatan kapasitas kesiapsiagaan di level masyarakat, pemerintah dan lembaga Pendidikan</p> <p>9. Penguatan kelembagaan masyarakat, dalam merespon bencana berbasis ketahanan ekonomi</p> <p>10. Pembangunan ketahanan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana</p>	<p>3.1. Pengetatan perizinan pemanfaatan ruang secara transparan dan akuntabel.</p> <p>3.2. Penyusunan RTRW, RPLP2B, RDTR, RTBL secara selaras dan konsisten</p> <p>3.3. Pengawasan, reward & punishment atas kepatuhan pemanfaatan ruang.</p> <p>4.1. Penyusunan sistem pendataan dan mekanisme informasi bencana daerah</p> <p>4.2. Pembentukan dan Pengembangan SDBI (Satu Data Bencana Indonesia) Kota Yogyakarta</p> <p>4.3. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi SDBI Kota Yogyakarta dalam satu kesatuan regular dengan SDP (Satu Data Pembangunan)</p> <p>4.4. Kolaborasi dan Integrasi Data Kebencanaan pemerintah</p>
--	--	--	---

			<p>dan non - pemerintah dalam monitoring, evaluasi RPB dan Renaksi PRB</p> <p>5.1. Pengembangan sistem dan mekanisme pemulihan pelayanan dasar, infrastruktur penting dan penghidupan masyarakat pasca bencana</p> <p>5.2. Membangun dan melaksanakan complain handling system bagi warga dan para pihak terdampak pembangunan infrastruktur</p> <p>6.1. Kajian dan pengembangan sistem strategis pemenuhan pangan pada masa darurat</p> <p>6.2. kajian dan pengembangan sistem strategis cadangan listrik untuk penanganan darurat</p> <p>6.3. Penyusunan Rencana Kontijensi pada setiap jenis</p>
--	--	--	---

			<p>ancaman bencana prioritas secara partisipatif dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan simulasi/gladi serta pemenuhan standar kebutuhannya</p> <p>6.4. Penguatan sistem dan mekanisme komando tanggap darurat bencana.</p> <p>7.1. Internalisasi budaya sadar lingkungan</p> <p>7.2. Normalisasi jaringan drainase di Kota Yogyakarta</p> <p>7.3. Perlindungan tangkapan air</p> <p>7.4. Pengelolaan vegetasi di kawasan sungai</p> <p>7.5. Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan limbah B3</p> <p>8.1. Penguatan Kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan</p>
--	--	--	---

			<p>8.2. Akselerasi Pembentukan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) secara kolaboratif.</p> <p>8.3. Penguatan EWS (Early Warning System) pada kawasan rawan bencana berisiko tinggi yang efektif, terpadu, dan terintegrasi.</p> <p>8.4. Kompetisi Kelurahan Tangguh Bencana dan FPRB secara berjenjang dan kontinyu.</p> <p>8.5. Akselerasi tata kelola dan pembentukan RS/Puskesmas Aman dan Infrastruktur Publik Aman Bencana</p> <p>9.1. Penguatan UMKM yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana</p> <p>9.2. Pendampingan dan fasilitasi UMKM di kawasan rawan bencana</p>
--	--	--	--

			<p>9.3. Kolaborasi KTB dengan UMKM untuk pengembangan UMKM tangguh bencana</p> <p>9.4. Penguatan UMKM pada kawasan rawan bencana yang melibatkan multi stakeholder</p> <p>10.1. Penguatan pelaku pariwisata pada kawasan rawan bencana yang melibatkan multi stakeholder</p> <p>10.2. Pengembangan pariwisata tangguh kolaboratif yang melibatkan multi stakeholder</p>
--	--	--	---

C. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Untuk mewujudkan capaian dari masing-masing isue strategis maka disusunlah program pengurangan risiko bencana selama periode 2024-2026. Detail program pengurangan risiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Program Penanggulangan Bencana

Isue Strategis	Program Penanggulangan Bencana
Isue Strategis 1 : Penyelenggaraan Pb Kolaboratif Belum Optimal	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Penyelenggaraan Pengawasan
	Perekonomian Dan Pembangunan

Isue Strategis	Program Penanggulangan Bencana
	Program Penanganan Bencana
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Penanganan Kerawanan Pangan

Isue Strategis	Program Penanggulangan Bencana
Isue Strategis 2: Lemahnya Perencanaan Kedaruratan Dan Pemulihan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Penanggulangan Bencana
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Bencana
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Isue Strategis 3 ; Meningkatnya Risiko Bencana Seiring Penurunan Kualitas Lingkungan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Program Penanggulangan Bencana

Isue Strategis	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran
Isue Strategis 4: Lemahnya Kualitas Partisipasi Dan Mandiri Masyarakat Dalam Pengelolaan Risiko Bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Penanggulangan Bencana
Isue Strategis 5: Meningkatnya Kerentanan Ekonomi Bagi Pelaku Umkm Dan Pariwisata Yang Berisiko Bencana	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Isue Strategis	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Pengendalian Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Penanggulangan Bencana

BAB V

RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Aksi untuk Pengurangan Risiko Bencana Daerah Kota Yogyakarta adalah pilihan tindakan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di Daerah Kota Yogyakarta (pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan kelompok-kelompok masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis masalah pokok yang telah dirumuskan pada penyusunan RPB ini. Penanganan dan upaya aksi juga mengacu pada 3 prioritas ancaman atau bahaya dari total 7 ancaman bencana di Kota Yogyakarta yaitu; (1) Gempa bumi, (2) Cuaca Ekstrim, (3) Banjir, (4) Letusan Gunungapi Merapi, (5) Kekeringan, (6) Wabah Penyakit dan (7) Kegagalan Teknologi.

Rencana Aksi untuk Pengurangan Risiko Bencana Daerah Kota Yogyakarta secara hukum berdasar pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sebagai rencana, rencana aksi daerah ini menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 4 (empat) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan, sebagai wujud komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan di Daerah Kota Yogyakarta dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Penyusunan rencana aksi dilakukan secara partisipatif dalam dalam rangkaian Forum Group Discussion penyusunan RPB, tentunya dengan kontribusi para pihak baik lembaga usaha, akademisi, media, lembaga kemasyarakatan, dan instansi/lembaga pemerintah.

Susunan Rencana Aksi PRB Daerah Kota Yogyakarta dalam dokumen ini dapat dilihat pada lampiran A : Rencana Aksi Pengurangan Risiko

Bencana Daerah Kota Yogyakarta 2024-2026. Rencana aksi ini akan berkontribusi pada upaya untuk menurunkan indek risiko Bencana Daerah Kota Yogyakarta dan pencapaian target RPD Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

A. PEMADUAN PARA PIHAK

Dalam Rencana Penanggulangan Bencana ini, peran serta para pihak, utamanya warga masyarakat sebagai right holder dalam relasi pemenuhan hak asasi manusia perlu mendapat perhatian dan prioritas. Dalam pendekatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan (*empowering*) juga menempati prioritas. Masyarakat diposisikan sebagai subjek yang berdaya dan bisa menolong diri mereka sendiri. Merujuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, masyarakat wajib dilibatkan dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Keterlibatan masyarakat tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana;
3. Mendapatkan hak informasi yang benar tentang potensi ancaman bencana dan upaya penanggulangan bencana.

Dalam pendekatan pentahelix penyelenggaraan bencana pada Rencana Penanggulangan Bencana ini, setiap unsur pentahelix memiliki peran masing-masing, saling terkait satu dengan yang lain. Pemerintah daerah secara partisipatif dan kolaboratif bersama 4 unsur pentahelix lainnya, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan,

memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memantau atau memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian.

Identifikasi *stakeholders* atau para pihak, klasifikasinya dalam unsur pentahelix, serta ekspektasi perannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6. 1 Peran Penta Helix, Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Stakeholder	Peran
Unsur Non-Pemerintah	
1.Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Sipil (termasuk Forum KTB Kota Yogyakarta, Ormas dan NGO/LSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai warga yang berdaulat, yang dalam perspektif hak asasi manusia adalah “<i>right holders</i>” atas negara di pemerintah sebagai “<i>duty bearer</i>”. Salah satu hak warga (<i>civic right</i>) adalah mendapatkan perlindungan dan rasa aman, termasuk dari ancaman bencana. Warga masyarakat yang berdaulat, termasuk organisasi masyarakat sipil mengadvokasi pemenuhan hak-hak warga tersebut, termasuk pemenuhannya melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana. • Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau <i>Non- Government Organization</i> (NGO) yang memiliki <i>concern</i> dan <i>core activity</i> dalam advokasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana diharapkan aktif berjejaring secara kolaboratif dan inklusif dalam Penanggulangan Bencana di Kota Yogyakarta. • <i>Faith-Based Organization</i>, diharapkan untuk merumuskan tafsir-tafsir kontekstual dan progresif dari pesan-pesan agama untuk pengurangan risiko bencana dan menjadikannya bagian dari agenda penyampaian pesan tersebut kepada anggota/jamaahnya. Bersama unsur pentahelix lainnya secara kolaboratif dan inklusif memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Kota Yogyakarta 2024-2026.

Stakeholder	Peran
2. Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai lumbung pengetahuan dan cerdas cendekia, diharapkan memproduksi ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. • Melalui tri dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) diharapkan secara terpadu mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana. • Dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta 2024-2026, diharapkan berkontribusi menjadi ahli yang mensupervisi, menelaraskan, serta memandu sepuhan ilmiah sekaligus memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Kota Yogyakarta 2024-2026.
3. Lembaga Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan mengintegrasikan prinsip <i>good corporate governance</i> serta paradigma <i>profit, people, planet</i> dalam menjalankan bisnis atau usahanya. • Dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta 2024-2026, diharapkan berkontribusi memaduserasikan
4. Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan sebagai suluh informasi yang mewartakan dan menyebarluaskan konten berita yang bernilai komunikasi, informasi, edukasi tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. • Dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta 2024-2026, diharapkan berkontribusi memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam Kota Yogyakarta 2024-2026

B. PEMANDUAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta 2024-2026 merupakan rencana aksi PRB dan kerangka kerja, yang diuraikan lebih lanjut dalam

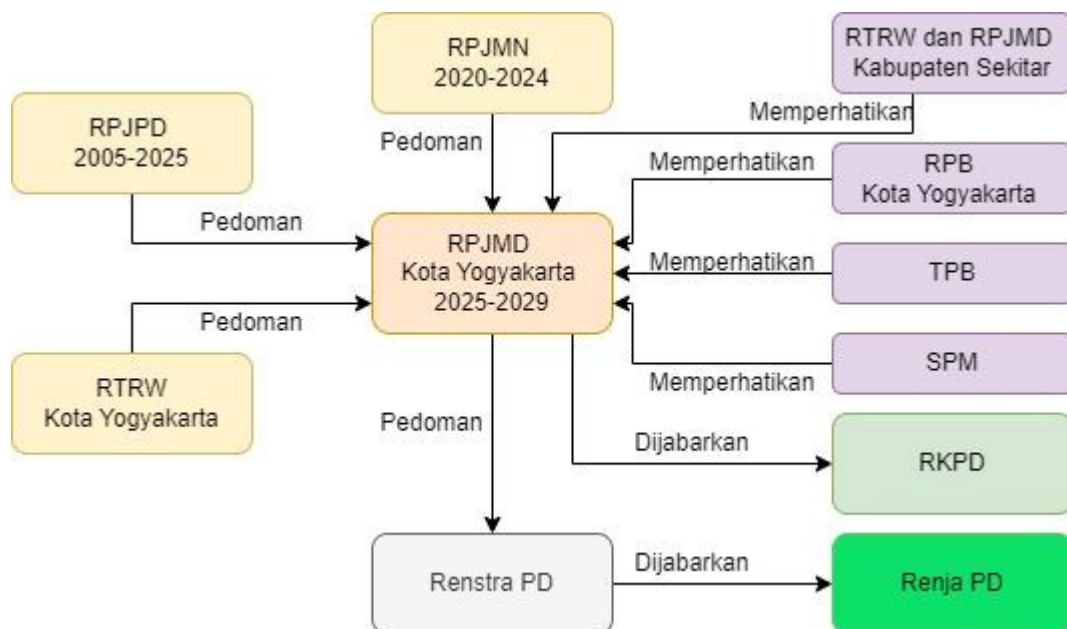
bentuk kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

RPB disusun agar setiap program/kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik di mana posisi dan kedudukan RPB:

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi;
2. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana;
3. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah;
4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah;
5. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya.

Sebagai rencana induk bidang penanggulangan bencana di daerah, RPB disusun dengan memperhatikan RPD guna mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, dan menjadi salah satu isu utama dalam perencanaan pembangunan di nasional maupun daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maupun dengan perencanaan perencanaan tematik lintas sektor di daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Gambar 6. 1 Hubungan RPB Kota Yogyakarta 2024-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lain



Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan yang dimasukkan atau terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB menjadi bagian dari rencana pembangunan.

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan

pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian target-target penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang di dalamnya terintegrasi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (Renaksi PRB), pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan RPB.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dalam RPB Kota Yogyakarta 2024-2026 ini. Untuk organisasi non pemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB ini.

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral dalam RPB ini, yang merupakan instrumen kontrol kinerja RPB yang diimplementasikan. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi RPB dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kemajuan pencapaian target pada tujuan, sasaran,

program, kegiatan, dan sub-kegiatan serta mengidentifikasi aspek-aspek kendala atau permasalahan ataupun faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target-target tersebut. Dari identifikasi aspek- aspek yang menjadi kendala atau faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut selanjutnya dianalisis dan dirumuskan langkah-langkah solusi maupun poin-poin rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan selanjutnya.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian target-target pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian RPB dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan strategi, kebijakan, serta pengemasan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, khususnya yang terkait dengan RPB.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPB meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil:

1. Tujuan RPB;
2. Sasaran RPB;
3. Program Pendukung;
4. Kegiatan; dan
5. Sub Kegiatan;

Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan, dan hasil baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, instansi pemerintah Pusat yang ada di Kota Yogyakarta, organisasi non pemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan.

Tabel 6. 2 Format Monitoring Dan Evaluasi

Kegiatan	Alokasi	Sasaran (Target)	Pencapaian (Realisasi)	Sumber Pendanaan		Keterangan (Tindak Lanjut)
				Apbd	Lain-Lain	

Dalam rangka memberikan informasi gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan sampai dengan sub kegiatan pendukung RPB, penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan wajib menyusun KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan menyampaikannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk memastikan kualitas pelaksanaan yang menjamin pencapaian outcome dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berorientasi kinerja (result oriented government). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan, pencapaian outcome dalam RPB, dan perbaikan pelayanan, pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan dapat melakukan inovasi.

Pengendalian pelaksanaan RPB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kota Yogyakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kota Yogyakarta melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan analisis laporan instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB dalam bentuk desk timbal balik setiap semester. Pelaksanaan desk timbal balik pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menguji validitas isian format/sistematika dan hasil penilaian mandiri oleh instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Dalam hal diperlukan, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan Perangkat Daerah lain di Pemda Kota Yogyakarta yang membidangi perencanaan pembangunan.

Untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan masyarakat terdampak atau penerima hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Pelibatan dilakukan dalam bentuk pemantauan (monitoring) lapangan dengan wawancara atau kuesioner serta dapat memanfaatkan sumber data lain. Apabila diperlukan pelaksanaan pemantauan (monitoring) lapangan dan pemanfaatan sumber data lain dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPB dapat melibatkan instansi/lembaga lain pada bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: a. komunikasi dan informatika; b. pelayanan publik; c. kearsipan; dan d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah menjadi salah satu sistem dan mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dapat direalisasikan. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Yogyakarta disusun untuk rentang perencanaan 2024-2026.

Pelaksanaan isi dari dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Yogyakarta membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Strategi advokasi dan implementasi pada dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen secara optimal pada seluruh aktor, s pentahelix yang inklusi baik dari unsur Pemerintah, Dunia Usaha, CSO, Media dan Akademisi di wilayah Kota Yogyakarta **Terwujudnya ketangguhan Kota Yogyakarta menuju Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan,** menjadi goal bersama

Dokumen ini terus berkembang secara dinamis sehingga diperlukan kontrol, monitoring dan evaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan dan juga peradapan di Kota Yogyakarta sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, lingkungan dan atau kemajuan yang mempengaruhi risiko bencana baik ditingkat global, nasional dan lokal. Selain proses kontrol, monitoring dan evaluasi, dokumen ini juga didukung dengan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang memberikan gambaran lebih detail dan teknis untuk memberikan ruang bagi semua pihak untuk turut serta dan berkontribusi serta berpartisipasi aktif dalam meningkatkan ketangguhan Kota Yogyakarta melalui program dan kegiatan yang mampu mengurangi risiko bencana sesuai dengan kompetensi dan bidang masing-masing tanpa terkecuali dan tanpa ada yang tertinggal (*no one left behind*).

LAMPIRAN



PROGRAM KEGIATAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA YOGYAKARTA 2024-2026

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi				
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026									
Isue Strategis 1 : Penyelenggaraan PB kolaboratif belum optimal																																	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh)	52,48	52,49	52,50	52,51	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh) Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan Dan Penetapan Rpplh Kabupaten/ Kota Yang Disusun	1 Dokumen					2.11.02.2.01.005	Penyusunan Dan Penetapan Rpplh Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan Dan Penetapan Rpplh Kabupaten/ Kota Yang Disusun	3 Dokumen															Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 8. Menurun Kan Index Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Indek Kualitas Air (Ika)	36,50	36,80	37,00	37,50	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Klhs Rppjd/Rpjd Kabupaten/ Kota Yang Disusun	1 Dokumen					2.11.02.2.02.0002	Pembuatan Dan Pelaksanaan Klhs Rppjd/ Rpjd	Jumlah Dokumen Klhs Rppjd/Rpjd Kabupaten/ Kota Yang Disusun	2 Dokumen															Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 1. Menurun Kan Index Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Indek Kualitas Udara (Iku)	80,00	81,00	81,50	82,00	2.11.02.2.02	Terlaksananya Pembuatan Dan Pelaksanaan Klhs Rppjd/Rpjd	100%						2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut	3 Dokumen														Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 1. Menurun Kan Index Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Indek Kualitas Lahan (Ikl)	38,99	39,02	39,05	39,08	2.11.02.2.02	Tersusunnya Pembuatan Dan Pelaksanaan Klhs Rppjd/Rpjd	100%						2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Hidup Dan Dokumen Mutu Yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Hidup Dan Dokumen Mutu Yang Dilaksanakan	5 Dokumen															Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 1. Menurun Kan Index Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan						2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut	3 Dokumen					2.11.03.2.03.0012	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 Dokumen															Pencapaian Riph Periode I Dan li Fokus Capaian 5. Menurun Kan Index Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Ruang Terbuka Hijau	23,55	23,55	23,55	23,56	2.11.03.2.01	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Dan Dokumen Mutu Yang Dilaksanakan	5 Dokumen						2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Luas Rth Yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	2,76 Ha															Pencapaian Riph Periode I Dan li Fokus Capaian 5. Menurun Kan Index Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi	
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut	3 Dokumen					2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Kehati Lainnya Yang Dikelola Kewenangan Kabupaten/ Kota	76.7 Ha					6.489.157.475					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode I Dan li Fokus Capaian 5. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 Dokumen					2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketertarikan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin Pplh	Jumlah Rekomendasi Dan/Atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan Dan Surat Kelayakan Operasi Yang Diberikan	56 Dokumen					394.172.500					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan	99,50	99,60	99,70	99,70	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luasan Lingkungan Pemukiman Yang Dikelola	2,76 Ha				2.11.06.2.01	Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Dari Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan , Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	24 Laporan					46.213.778					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
							2.11.06.2.01	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	215 Dokumen				2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketertarikan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin Pplh	Jumlah Rekomendasi Dan/Atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan Dan Surat Kelayakan Operasi Yang Diberikan	56 Dokumen					394.172.500					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 1. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
								Jumlah Laporan Dari Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan , Persetujuan Lingkungan , Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	24 Laporan					2.11.06.2.01	Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan , Persetujuan Lingkungan , Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	24 Laporan					46.213.778					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 1. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
								Jumlah Rekomendasi Dan/Atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan Dan Surat Kelayakan Operasi Yang Diberikan	56 Dokumen					Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana Pplh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana Pplh	215 Dokumen						180.162.000					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 1. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomen-klatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomen-klatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomen-klatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi	
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
						2.11.06.2.01	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pph Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	215 Dokumen					2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat Yang Terdaftar Yang Meningkatkan Kapasitas Dan Kompetensinya Terkait Pph	43 Lembaga					1.501.815.500					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 1. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
							Jumlah Laporan Dari Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan , Peretujuan Lingkungan , Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	24 Laporan						2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah , Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Yang Disusun Dan Ditetapkan	1 Dokumen					50.320.000					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 1. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
							Jumlah Rekomendasi Dan/Atau Peretujuan Teknis, Peretujuan Lingkungan Dan Surat Kelayakan Operasi Yang Diberikan	56 Dokumen						2.11.11.2.01.0013	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan , Pendaaur Ulangan Dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan , Pendaaur Ulangan Dan Pemanfaatan Kembali	4 Laporan					249.620.250					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 1. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
						2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat Yang Terdaftar Yang Meningkatkan Kapasitas Dan Kompetensinya Terkait Pph	43 Lembaga					2.11.11.2.01.0017	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Di Tpa/ Tpst/ Smpa Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah Yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir Di Tpa/ Tpst/ Smpa Kabupaten/ Kota	284,35 Ton/Hari					4.906.363.082					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
						2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan , Pendaaurulan Dan Pemanfaatan Kembali	8 Laporan					2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat , Kelompok Masyarakat Atau Para Pihak Lainnya Yang Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	27 Kelompok					1.138.180.000					KOTA YOGYAKARTA	DLH		Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi					
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026										
								Jumlah Sampah Yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir Di Tpa/Tipst/Spa Kota Yogyakarta						284.35 Ton/Hari	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pihak Lain Di Luar Kabupaten/Kota Untuk Pengelolaan Sampah dan Mengacu Pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi Maupun Pihak Lain Kabupaten/Kota Untuk Pengelolaan Persampahan Sesuai Dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Dan Mengacu Pada Jakstrada	7 Dokumen						11.578.735.136					KOTA YOGYAKARTA	DLH			Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pskss) Yang Aktif					1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pskss Yang Difasilitasi																								Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
08.01.06.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Wilayah	76%	77%	78%	79%	08.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial																									Pencapaian Riph Periode I Dan Ii Fokus Capaian 1. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah					05.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pengendalian																									Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah					05.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																									Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi				
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026									
04.01.03	Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	55%	64,29%	71,43%	78,57%	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen					4.01.03.2.01.0003	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen					155.450.000					KOTA YOGYAKARTA	TIM KERJA PENGENDALIAN PEREKONOMIAN, UMKM, DAN EKONOMI KREATIF	APBD	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 4. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Yang Aktif	78,89%	78,89%	78,89%	83,00%		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sosialisasi, Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Pug)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen									113.080.000	113.080.000	113.080.000	113.080.000	KOTA YOGYAKARTA	BP2AP2KB	APBD	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 4. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta				
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang							KOTA YOGYAKARTA	DINSOSNAK ERTRANS - TAGANA 2 ANGKATAN (PENINGKATAN KAPASITAS TAGANA)	APBD KOTA YOGYAKARTA	Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Yang Terdaftar Dan Teregister Di Kota Yogyakarta	55%	60%	63%	65%	08.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan														370.841.544	370.841.544	370.841.544	370.841.544	KOTA YOGYAKARTA	KESBANGPOL		Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 10. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta				
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	600 Lembaga Masyarakat	600 Lembaga Masyarakat	600 Lembaga Masyarakat	600 Lembaga Masyarakat					114.905.000	114.905.000	114.905.000	114.905.000	KEMANTREN UMBULHARJO	JAWATAN PRAJA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Musrenbang Kelurahan Dan Musrenbang Kemantren	Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0004	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	8.017.000	8.017.000	8.017.000	8.017.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PATEHAN	KELURAHAN PATEHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Fasilitasi Kelurahan Siaga = 2X Kegiatan (@26 Org) - Fasilitasi 2 Ktb Patehan = 2X Kegiatan (@26 Org) - Fasilitasi Rkb = 1X Kegiatan (17 Org) - Sarasehan Rt Dan Rw Siaga = 1X Kegiatan (25 Org)	Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0004	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PANEMBAHAN	KELURAHAN PANEMBAHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Fasilitasi 5 Panembahan = 2X Kegiatan (@25 Org)	Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0004	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, KADIPATEN	KELURAHAN KADIPATEN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Fasilitasi Jaga Warga = 2X Kegiatan (@30 Org) - Fasilitasi Ktb = 2X Kegiatan (@35 Org)	Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Yang Terdaftar Dan Teregister Di Kota Yogyakarta					8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemananaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																	KANTOR BAKESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA JALAN SULTAN AGUNG NO 133, GUNUNGKETUR, PAKUALAMAN, YOGYAKARTA, DIY	BAKESBAN GPOL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	APBD		Pencapaian Riph Periode Iii Fokus Capaian 4. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	82,5 Poin	84 Poin	85 Poin	86 Poin	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Umbulharjo	82,5 Poin	84 Poin	85 Poin	86 Poin	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/ Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/ Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	62.850.500	62.850.500	62.850.500	62.850.500	KEMANTREN UMBULHARJO	JAWATAN KEMAKMURAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Koordinasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wilayah 1 Laporan 2. Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Wilayah 1 Laporan 3. Rapat Koordinasi Intern Kemakmuran 1 Laporan 4. Rapat Tim Pengolahan Data Pembangunan Dan Csr 1 Laporan	Pencapaian Riph Periode Iii Fokus Capaian 4. Menurun Kan Indek Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Usaha Industri Yang Mempunyai Produk Dan Jasa Terstandarisasi Meningkat	11%	11%	12%	12%	3.31.02.2.01	Penyusunan Dan Evaluasi RpiK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Terselenggaranya 1 Kali Pgd	20 lkm	20 lkm	20 lkm	20 lkm	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	KOTA YOGYAKARTA	DINAS PKU	APBD	Tumbuhnya Kepedulian Para Stakeholder Terkait Tentang Industri Yang Ramah Lingkungan	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Omset Ukm (Usaha Kecil Mikro) Yang Dibina	8	8	8	8	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Umk Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	100 Umk	124 Umk	156 Umk	196 Umk	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Umkm Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	100 Umk	124 Umk	156 Umk	196 Umk	823.225.900	1.223.225.900	1.623.225.900	2.023.225.900	KOTA YOGYAKARTA	KEPALA BIDANG BIMBINGAN USAHA, PROMOSI DAN KEMITRAAN PERDAGANGAN	APBD		
05.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia					5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)													126.124.840	126.124.840	126.124.840	126.124.840		BAPPEDA			Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Usaha Industri Yang Mempunyai Produk Dan Jasa Terstandarisasi Meningkat	11%	11%	12%	12%	3.31.02.2.01	Penyusunan Dan Evaluasi RpiK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Koordinasi Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri	Kajian Pengembangan Sentra	Terlaksananya Kajian Pengembangan Sentra	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	0	0	0	0	KOTA YOGYAKARTA	DINAS PKU	DAK NONFISIK	Tumbuhnya Kepedulian Para Stakeholder Terkait Tentang Pengembangan Sentra	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
01.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu (1) Daerah	Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Berbasis Kampung, Persentase Kampung Yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat	86,24%	90,99%	95,49%	100%	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Melaksanakan Fungsi Dan Tugas Petugas Linmas Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum									KOTA YOGYAKARTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA	APBD KOTA YOGYAKARTA		Pencapaian Riph Periode Iii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
													1.05.02.2.01.0006	Kerjasama Antar Lembaga Dan Mitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Melaksanakan Peran Serta Dan Keterlibatan Aktif Masyarakat Dalam Menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Yogyakarta									KOTA YOGYAKARTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA	APBD KOTA YOGYAKARTA		Pencapaian Riph Periode Iii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	

Nomen-klatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomen-klatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomen-klatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Dan Proklam Dan Kampung Hijau	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, SEMUA KELURAHAN	JAWATAN SOSIAL	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan = 1X Kegiatan (20 Org)	Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	23.979.500	23.979.500	23.979.500	23.979.500	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PANEMBAHAN	KELURAHAN PANEMBAHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Fgd Penanggulangan Kemiskinan = 1X Kegiatan (40 Org) - Fgd Bagi Warga Kurang Mampu (Ksips) = 1X Kegiatan (100 Org) - Workshop Menuju Zero Stunting = 2X Kegiatan (@40 Org)	Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	705.000.000	705.000.000	705.000.000	705.000.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20	20	20	20	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Penanganan Dan Mitigasi Bencana Alam	50	50	50	50	7.007.500	1.840.000	6.500.000	6.500.000	KEMANTREN PAKUALAMAN	JAWATAN KEAMANAN	DAU (DANA ALOKASI UMUM)	Koordinasi Ktb	Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	705.000.000	705.000.000	705.000.000	705.000.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	35	35	35	35	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Penanganan Dan Mitigasi Bencana Alam	50	50	50	50	10.475.000	3.407.300	11.000.000	11.000.000	KEMANTREN PAKUALAMAN	JAWATAN SOSIAL	DAU (DANA ALOKASI UMUM)	Pelatihan Mitra Keluarga	Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, DEMANGAN	KELURAHAN DEMANGAN	PAD	1. Rakor Kesi 2. Rakor Linmas	Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	111 Pokmas / Ormas	111 Pokmas / Ormas	111 Pokmas / Ormas	111 Pokmas / Ormas	10.276.000	11.924.000	11.924.000	11.924.000	KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, KOTABARU	KELURAHAN KOTABARU	PAD	1. Rakor Fkdm 2. Rakor Kesi 3. Rakor Ktb 4. Rakor Limas 5. Rakor Rws 6. Rakor Siaga 7. Rakor Bencana 7. Rakor Sigrak	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	180 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	3.330.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, KLITREN	KELURAHAN KLITREN	PAD	1. Rakor Jaga Warga 2. Rakor Kesi 3. Rakor Rws 3. Siaga	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	224 Pokmas / Ormas	224 Pokmas / Ormas	224 Pokmas / Ormas	224 Pokmas / Ormas	1.800.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, BACIRO	KELURAHAN BACIRO	PAD	1. Rakor Kesi	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	8.450.000				KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, TERBAN	KELURAHAN TERBAN	PAD	Pelatihan Kebencanaan	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.150.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, DEMANGAN	JAWATAN SOSIAL	PAD	1. Sosialisasi Penanganan Stunting 2. Monitoring Evaluasi Penanganan Stunting	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	180 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	9.600.000				KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, KLITREN	KELURAHAN KLITREN	PAD	1. Fgd Penanganan Stunting	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi	
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	9.400.000					KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, TERBAN	KELURAHAN TERBAN	PAD	Fgd Tentang Permasalahan Dan Solusi Masalah Kemiskinan	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
01.03.12	Program Penyelenggaraan Dan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan Dan Pembinaan Tata Ruang	88,67 %	89,19 %	89,66 %	90,13 %	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota	Jumlah Pemangku Kepentingan Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	750 Dokumen				1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					47.632.000					KOTA YOGYAKARTA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANNITI MANDALASARTASATASASANA)	APBD KOTA YOGYAKARTA	Telaah Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pencapaian Ripb Periode Ii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
							1.03.12.2.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Tata Ruang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	44.576.600	44.576.600	44.576.600		KOTA YOGYAKARTA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANNITI MANDALASARTASATASASANA)	APBD KOTA YOGYAKARTA	Telaah Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pencapaian Ripb Periode Ii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Dan Kemantren Kraton	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Operasi Ketertiban	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.370.000	11.370.000	11.370.000	11.370.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, SEMUA KELURAHAN	JAWATAN KEAMANAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penyuluhan Pkl = 2X Kegiatan (@30 Org) - Sosialisasi Pondokan = 2X Kegiatan (@30 Org)	Pencapaian Ripb Periode Ii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
01.03.12	Program Penyelenggaraan Dan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan Dan Pembinaan Tata Ruang	88,67 %	89,19 %	89,66 %	90,13 %	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Raperda Dan Raperwal Bidang Penataan Ruang Selain Rtrw Selesai	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Fisue	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada Selain Rtrw Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	234.004.000	197.402.000	197.402.000	197.402.000	KOTA YOGYAKARTA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANNITI MANDALASARTASATASASANA)	APBD KOTA YOGYAKARTA	Penyusunan Draft Perwal Rtbl	Pencapaian Ripb Periode Ii Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
05.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Pemerintah Dan Pembangunan Manusia					5.01.03.2.03	Koordinasi Hasil Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Rencana Dengan Rkpj/Rpjm Di Bidang Sda																BAPPEDA			Pencapaian Ripb Periode Ii Fokus Capaian 12. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi						
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026											
01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Tata Ruang	76%	76,56%	77,13%	77,69%	1.03.12.2.04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Selesai	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.03.12.2.04.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penertiban Dan Pengakuan Hukum Bidang Penataan Ruang	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penertiban Dan Pengakuan Hukum Bidang Penataan Ruang	3 Dokumen					108.576.000					KOTA YOGYAKARTA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANI MANDALASARTASASANA)	APBD KOTA YOGYAKARTA	Pengawasan Tata Ruang, Sebatas Pendataan Ruang, Untuk Terkait Kebencanaan Hanya Pada Pengawasan Di Sempadan Sungai.	Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta				
														1.03.12.2.04.011	Pengawasan Turbinak Dan Pengawasan Fungsi Dan Manfaat	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Selesai				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			109.982.400	109.982.400	109.982.400	KOTA YOGYAKARTA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANI MANDALASARTASASANA)	APBD KOTA YOGYAKARTA	Pengawasan Tata Ruang, Sebatas Pendataan Kesesuaian Ruang, Untuk Terkait Kebencanaan Hanya Pada Pengawasan Di Sempadan Sungai.	Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
														1.03.12.2.04.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian Insentif Dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian Insentif Dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen										38.580.000			KOTA YOGYAKARTA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANI MANDALASARTASASANA)	APBD KOTA YOGYAKARTA	Pelaksanaan Insentif Dan Disinsentif, Dilakukan Salah Satunya Dengan Melihat Ketersediaan Rth Privat Seluruh Sampel, Sehingga Berpengaruh Terhadap Ketersediaan Rth Di Kota Yogyakarta	Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
														1.03.12.2.04.015	Pemberian Insentif Dan/Atau Disinsentif Non Fiskal	Jumlah Berita Acara Pemberian Insentif Dan/Atau Disinsentif Non Fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara									38.580.000	38.580.000	38.580.000	KOTA YOGYAKARTA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANI MANDALASARTASASANA)	APBD KOTA YOGYAKARTA	Pelaksanaan Insentif Dan Disinsentif, Dilakukan Salah Satunya Dengan Melihat Ketersediaan Rth Privat Seluruh Sampel, Sehingga Berpengaruh Terhadap Ketersediaan Rth Di Kota Yogyakarta	Pencapaian Riph Periode li Fokus Capaian 8. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
Isue Strategis 2: Lemahnya perencanaan kedaruratan dan pemulihan																																			
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Informasi Industri Yag Ter-Update	100%	100%	100%	100%	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Iui, Iuki, Dan Iпки Kewenangan Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi Publikasi Data Informasi Dan Analisa Industri Kota Melalui Siinas	Data lkm Terupdate	1600 lkm	1600 lkm	1600 lkm	1600 lkm			49.811.250	50.000.000	55.000.000	60.000.000	KOTA YOGYAKARTA	DINAS PKU	APBD	Tumbuhnya Kepedulian Para Stakeholder Terkait Tentang Industri Yang Ramah Lingkungan	Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta				
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Wilayah Rawan Pangan Prioritas 2					2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Informasi Kerawanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen											106	117	128	141		DPP		Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 5. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta				

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kemanfaatan Analisis Data Dalam Perencanaan Pembangunan					5.01.02.2.02	Analisis Data Dan Informasi Pemerintah Dan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Pembangunan Daerah											131.526.000	131.526.000	131.526.000	131.526.000		BAPPEDA		Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	76.76%	82.06%	83.35%	84.64%	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Informasi Rawan Bencana	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.016.295.000	1.604.723.455	1.604.723.455	1.604.723.455	KOTA YOGYAKARTA	BIDANG PK DIKK / SEKSI DIKK	APBD	Operasional Pusedalops	Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 10. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	76.76%	82.06%	83.35%	84.64%	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi Dan Edukasi Sesuai Jenis Ancaman Bencana Yang Ada Di Kawasan Tempat Tinggalnya Selama 1 (Satu) Tahun	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	KOTA YOGYAKARTA	BPBD	APBD	Pertemuan Forum Prb Dan Perencanaan Dan Evaluasi Program Pb	Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 6. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	955.400.000	965.400.000	975.400.000	985.400.000	07.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Penanganan Dan Mitigasi Bencana Alam	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	7.01.03.2.06.0010	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	15.195.700	15.195.700	15.195.700	15.195.700	KEMANTREN WIROBRAJAN	KEMANTREN WIROBRAJAN	PAD	1. Pelatihan Kedaruratan Bencana Untuk Ktb	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus Capaian 10. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
																												2. Koordinasi Forum Ktb Kemantren Wirobrajan	Pencapaian Riph Periode I Fokus Capaian 10. Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	98,85 %	99,42 %	100 %		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Selesai	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen						3.697.500.164	5.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA			Pencapaian Riph Periode I Fokus 11 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		
02,09,03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	54,21%	69,46%	84,71%	100%	2.09.03.2.02	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	65,05 Ton	83,35 Ton	101,65 Ton	120 Ton	2,09,03,2,02,03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	18,3 Ton	18,3 Ton	18,3 Ton	18,35 Ton	202.150.000	203.150.000	204.250.000	205.460.000	KOTA YOGYAKARTA	BIDANG PANGAN (R. M. IMAM NURWAHID) SKKS KETAHANAN PANGAN (DRH. SUPRIYANTO)	PAD		Pencapaian Riph Periode I Fokus 5 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial	150	150	150	150	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Permakanaan 3X1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150	150	150	150	89.510.000	256.957.000	256.957.000	256.957.000	KOTA YOGYAKARTA	DINSOSNAKERTRANS	APBD KOTA YOGYAKARTA		Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	378 Pokmas/Ormas	378 Pokmas/Ormas	378 Pokmas/Ormas	378 Pokmas/Ormas	14.818.750	14.818.750	14.818.750	14.818.750	KELURAHAN GOWONGAN	KELURAHAN GOWONGAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Olah Makanan Kreasi Jajanan Pasar	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	149 Pokmas/Ormas	149 Pokmas/Ormas	149 Pokmas/Ormas	149 Pokmas/Ormas	6.879.875	6.879.875	6.879.875	6.879.875	KELURAHAN COKRODININGRATAN	KELURAHAN COKRODININGRATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Pembuatan Kue/Snack	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	KELURAHAN BUMIJO	KELURAHAN BUMIJO	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Kuliner	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
		Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	KELURAHAN BUMIJO	KELURAHAN BUMIJO	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Olahhan Singkong	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Gapoktan	30 Gapoktan	30 Gapoktan	30 Gapoktan	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	13.560.000	13.560.000	13.560.000	13.560.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, SEMUA KELURAHAN	JAWATAN KEMAKMURAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelatihan Hidroponik Dan Budidaya Sayuran = 1X Pelatihan (30 Org)	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	11.845.000	11.845.000	11.845.000	11.845.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PATEHAN	KELURAHAN PATEHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelatihan Pembuatan Lorong Sayur = 2Hari Kegiatan (20 Org)	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	108 Unit	108 Unit	108 Unit	108 Unit	15.032.400	15.032.400	15.032.400	15.032.400	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, KADIPATEN	KELURAHAN KADIPATEN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembuatan Lorong Sayur = 1 Unit	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PANEMBAHAN	KELURAHAN PANEMBAHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Fasilitasi Tim Aman Pangan = 4X Kegiatan (@25 Org)	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Gapoktan	30 Gapoktan	30 Gapoktan	30 Gapoktan	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	13.560.000	13.560.000	13.560.000	13.560.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, SEMUA KELURAHAN	JAWATAN KEMAKMURAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelatihan Hidroponik Dan Budidaya Sayuran = 1X Pelatihan (30 Org)	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 7 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	11.845.000	11.845.000	11.845.000	11.845.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PATEHAN	KELURAHAN PATEHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelatihan Lorong Sayur = 2Hari Kegiatan (20 Org)	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	108 Unit	108 Unit	108 Unit	108 Unit	15.032.400	15.032.400	15.032.400	15.032.400	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, KADIPATEN	KELURAHAN KADIPATEN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembuatan Lorong Sayur =1 Unit	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PANEMBAHAN	KELURAHAN PANEMBAHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Fasilitasi Tim Aman Pangan = 4X Kegiatan (@25 Org)	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	2611.90%	2616.90%	2621.90%	2626.90%	02.09.03.2.01	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Informasi Ketahanan Pangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	346.150.000	361.550.000	378.490.000	397.124.000	KOTA YOGYAKARTA	BIDANG PANGAN (IR. M. IMAM NURWAHID) SKKS KETAHANAN PANGAN (DRH. SUPRIYANTO)	PAD		Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Peningkatan Persentase Kawasan Yang Dikembangkan Menjadi Kawasan Pangan Lestari	28,88%	37,78%	46,67%	55,56%	02.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Jumlah Kawasan Yang Dikembangkan Menjadi Kawasan Pangan Lestari	13 Kawasan	17 Kawasan	21 Kawasan	25 Kawasan	2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	650.000.000	715.000.000	786.500.000	865.150.000	KOTA YOGYAKARTA	BIDANG PANGAN (IR. M. IMAM NURWAHID) SKKS KETAHANAN PANGAN (DRH. SUPRIYANTO)	PAD	Kegiatan Bimtek Pengembangan Kampung Pangan Lestari, Kampung Sayur, Dan Optimalisasi Rumah Bibit	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	3.885.000	3.885.000	3.885.000	3.885.000	KELURAHAN BUMIJO	KELURAHAN BUMIJO	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Bengana Banjir Di Wilayah	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 7 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Zoonosis Prioritas Yang Terkendali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	03.27.05.2.01	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis Pencegahan Dan Kie Bencana Non Alam Yang Bersifat Zoonosis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam Yang Bersifat Zoonosis	Tertanggulangnya Bencana Non Alam Yang Bersifat Zoonosis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	KOTA YOGYAKARTA	BIDANG PERIKAMAN DAN KEHEWANAN (DRH. SRI PANGGARTI SKKS KESWANM VET (DRH. DIAH UTAMI)	PAD		Pencapaian Riph Periode li Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	1.05.03.2.02.008	Meningkatkan Kemampuan Teknis Dan Manajerial Trc Tingkat Kota Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil Trc Yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dan Manajerialnya	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang							34.191.500	34.191.500	34.191.500	34.191.500		KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN KONSTRUKSI			Pencapaian Riph Periode li Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000	1.593.231.000	1.596.231.000	1.598.231.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Penanganan Dan Mitigasi Bencana Alam	26 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Tanggapan Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Tanggapan Bencana Alam	26 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	5.850.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000	KEMANTREN MERGANGSAN	JAWATAN KEAMANAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2023 : Pengisian Tabung Apar 26 Buah 2024 : - Apel Siaga Bencana 100 Orang Dan - Pelatihan Tanggapan Bencana Kebakaran 70 Orang	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.04	Program Koordinasi Ketentrangan Dan Keterlibatan Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	40 Pelanggaran	40 Pelanggaran	40 Pelanggaran	40 Pelanggaran	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	40 Pelanggaran	40 Pelanggaran	40 Pelanggaran	40 Pelanggaran	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.300.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	KEMANTREN MERGANGSAN	JAWATAN KEAMANAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2023 : Apel Siaga Bencana 100 Orang 2024 : Sambang Kampung 3 Kali X 30 Orang	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Penanganan Dan Mitigasi Bencana Alam	12 Keluarga	13 Keluarga	14 Keluarga	14 Keluarga	7.01.03.2.06.0010	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggapan Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggapan Bencana Alam	12 Keluarga	12 Keluarga	12 Keluarga	12 Keluarga	4.800.000	6.500.000			KEMANTREN GEDONGTENGEN	JAWATAN KEAMANAN	APBD	Pembinaan Ktb	Pencapaian Riph Periode li Fokus 10 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Penanganan Dan Mitigasi Bencana Alam	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggapan Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggapan Bencana Alam	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	19.585.000	19.585.000	19.585.000	19.585.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, SEMUA KELURAHAN	JAWATAN KEAMANAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Pengisian Tabung Apar = 53 Unit - Penyuluhan Mitigasi Bencana = 2X Kegiatan (@40 Org) - Forum Kampung Tangguh Bencana = 3X Kegiatan (@30 Org)	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Operasi Ketertiban	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, SEMUA KELURAHAN	JAWATAN KEAMANAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Penyuluhan Jaga Warga = 2X Kegiatan (@30 Org) - Penyuluhan Linmas = 1X Kegiatan (30 Org)	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok dan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	372 Orang	372 Orang	372 Orang	372 Orang	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Bersih Dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	5.451.000	5.451.000	5.451.000	5.451.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, SEMUA KELURAHAN	JAWATAN SOSIAL	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sosialisasi Dan Tanggah Bencana (Gksttb) = 1X Kegiatan (30 Org)	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	3.501.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PANEMBAHAN	KELURAHAN PANEMBAHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sosialisasi Dan Pembentukan Keluarga Sehat Tanggah Dan Tangguh Bencana = 1X Kegiatan (20 Org)	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	19 Poktan	19 Poktan	19 Poktan	19 Poktan		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, DEMANGAN	JAWATAN KEMAKMURAN	PAD	1. Pendampingan Kelompok Tani 2. Pelatihan Budidaya Cabe Jawa 3. Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	16.356.000				KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, DEMANGAN	KELURAHAN DEMANGAN	PAD	1. Pelatihan Membuat Olahan Makanan Dari Ikan 2. Pelatihan Pembibitan Sayur	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	111 Pokmas / Ormas	111 Pokmas / Ormas	111 Pokmas / Ormas	111 Pokmas / Ormas	8.846.000				KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, KOTABARU	KELURAHAN KOTABARU	PAD	Pelatihan Membuat Makanan Jajanan Pasar	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi	
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	29.620.000					KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, TERBAN	KELURAHAN TERBAN	PAD	1. Pelatihan Budidaya Tanaman Herbal Dan Sayur 2. Pelatihan Kampung Sayur	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Penanganan Dan Mitigasi Bencana Alam	55 Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	55 Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	19.950.000	19.950.000	19.950.000	19.950.000	KOTA YOGYAKARTA, KEMANTREN MANTRIJERON	JAWATAN KEAMANAN	DAU (DANA ALOKASI UMUM)	Sosialisasi Kampung Siaga Bencana Dan Kampung Tangguh Bencana	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.467.493.500	1.467.493.500	1.614.242.850	1.697.222.896	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan	24 Pokmas	24 Pokmas	24 Pokmas	24 Pokmas	37.850.000	37.850.000	37.850.000	37.850.000	KEMANTREN DANUREJAN	KEMANTREN DANUREJAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Pelatihan Tanggap Bencana Dan Siaga Kampung Tangguh Bencana - Fasilitasi Satlaker Kebencanaan / Ktb/ Katana / Fkpm	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.467.493.500	1.467.493.500	1.614.242.850	1.697.222.896	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Masyarakat Di Kelurahan	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	KEMANTREN DANUREJAN	KEMANTREN DANUREJAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Wisata Religi Dan Kampung Sayur	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.467.493.500	1.467.493.500	1.614.242.850	1.697.222.896	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Masyarakat Di Kelurahan	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	KEMANTREN DANUREJAN	KEMANTREN DANUREJAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Wisata Religi Dan Kampung Sayur	Pencapaian Riph Periode I Fokus 7 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan Dan Upaya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan Psc 119 Yes Yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (Spgdt)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.02.02.2.02.0003	Menyelenggarakan Pengelolaan Operasional Pelayanan Psc 119 Yes Yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu Secara Optimal	Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan Psc 119 Yes Yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (Spgdt)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	405.628.576	405.628.576	405.628.576	405.628.576	KOTA YOGYAKARTA	DINKES	APBD		Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	

Isue Strategis 3 ; Meningkatnya Risiko bencana seiring penurunan kualitas lingkungan

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi					
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026										
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Persentase Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan Yang Terbina Dan Terawasi					3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis Dan Zoonosis	21 Jenis	21 Jenis	21 Jenis	21 Jenis					150.000	170.000	195.000	225.000				DPP			Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurunan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta						
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkaitpemberdayaan Kelurahan	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan anmasyarakat Di Kelurahan	251 Pokmas /Ormas	273 Pokmas /Ormas	251 Pokmas /Ormas	251 Pokmas /Ormas	12.400.000						KEMANTREN GEDONGTENGEN , KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	DAU		Pelatihan Lorong Sayur	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurunan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		
																																Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurunan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
														7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan anmasyarakat Di Kelurahan	273 Pokmas / Ormas	211 Pokmas / Ormas	273 Pokmas / Ormas	273 Pokmas / Ormas							KEMANTREN GEDONGTENGEN , KELURAHAN SOSROMENDURAN	KELURAHAN SOSROMENDURAN	DAU		Pelatihan Lorong Sayur	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurunan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		
																					14.620.000	29.790.000									Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurunan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	955.400.000	965.400.000	975.400.000	985.400.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	390 Lembaga	390 Lembaga	390 Lembaga	390 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan an Masyarakat Di Kelurahan	88 Pokmas/Ormas	88 Pokmas/Ormas	88 Pokmas/Ormas	88 Pokmas/Ormas	26.440.000	26.440.000	26.440.000	26.440.000			KELURAHAN PAKUNCEN	KELURAHAN PAKUNCEN	PAD		1. Pelatihan Sampah Organik (Staterkit Ecoenzym Di Wilayah)	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurunan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
		Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	378 Pokmas/Ormas	378 Pokmas/Ormas	378 Pokmas/Ormas	378 Pokmas/Ormas	15.313.750	15.313.750	15.313.750	15.313.750	KELURAHAN GOWONGAN	KELURAHAN GOWONGAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Sampah Untuk Bank Sampah Kelurahan Gowongan	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	378 Pokmas/Ormas	378 Pokmas/Ormas	378 Pokmas/Ormas	378 Pokmas/Ormas	5.905.000	5.905.000	5.905.000	5.905.000	KELURAHAN GOWONGAN	KELURAHAN GOWONGAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Pembuatan Biopori Kelurahan	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Proklam Dan Kampung Hijau	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	65 Keluarga	65 Keluarga	65 Keluarga	65 Keluarga	19.970.000	19.970.000	19.970.000	19.970.000	KEMANTREN JETIS	JAWATAN KEMAKMURAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Rapat Koordinasi Bank Sampah (Rp 2.760.000) 2. Pelatihan Kaleng Bekas Menjadi Kerajinan (Rp 7.040.000) 3. Sosialisasi Kampung Wisata Ramah Lingkungan (Rp 5.300.000) 4. Fgd Bank Sampah (Rp 4.870.000)	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	9.190.000	9.190.000	9.190.000	9.190.000	KELURAHAN BUMIJO	KELURAHAN BUMIJO	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Komposter	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	5.740.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000	KELURAHAN BUMIJO	KELURAHAN BUMIJO	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Pembuatan Eco-Enzyme	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	143 Unit	143 Unit	143 Unit	143 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PATEHAN	KELURAHAN PATEHAN	DANA TRANSFER UMUM-DAK ALOKASI UMUM	Pembuatan Torent Air Sumur Warga Dan Wc Umum = 1 Unit	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomen-kiatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomen-kiatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomen-kiatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	157 Unit	157 Unit	157 Unit	157 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PANEMBAHAN	KELURAHAN PANEMBAHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum (Mek Dan Pos Ronda) = 2 Unit	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	19.170.000	19.170.000	19.170.000	19.170.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PANEMBAHAN	KELURAHAN PANEMBAHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Pelatihan Pengolahan Sampah Organik = 1X Kegiatan (50 Org) - Fasilitasi Forum Bank Sampah = 4X Kegiatan (@25 Org)	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	108 Unit	108 Unit	108 Unit	108 Unit	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, KADIPATEN	KELURAHAN KADIPATEN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Pengadaan Alat Pengolah Sampah Organik = 1 Unit - Pembuatan Gerobak Sampah = 5 Unit	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, KADIPATEN	KELURAHAN KADIPATEN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Fasilitasi Forum Bank Sampah = 4X Kegiatan (@30 Org)	Pencapaian Riph Periode I Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomen-klatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomen-klatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomen-klatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
			01.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Penuhan Drainase Ramah Lingkungan	87,66%				87,70%	87,73%	87,77%	1.03.06.2.01				Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Melaksanakan Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	1150 M	1200 M	1200 M	1200 M	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					

Nomen-klatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomen-klatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomen-klatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Muja Muju	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	54 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	686.655.000	686.655.000	686.655.000	686.655.000	KELURAHAN MUJA MUJU	KELURAHAN SEMAKI	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1. Pemeliharaan Pju 70 Titik 2. Pemeliharaan Sah 53 Meter 3. Cermin Cembung 6 Unit 4. Pemeliharaan Sarpras Gajah Wong 1 Lokasi 5. Peningkatan Kapasitas Jalan 3 Lokasi 6. Pembuatan Spah 37 Titik	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	2.728.767.000 R upiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 R upiah	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	98 Unit	73 Unit	98 Unit	98 Unit	67.520.000	90.000.000			KEMANTREN GEDONGTENGEN , KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	DAU	Peningkatan Sahuran Air Hujan (Sah)	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
									Persentase Sarana Prasana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	36 Unit	169 Unit	36 Unit	36 Unit	159.529.444	199.500.000			KEMANTREN GEDONGTENGEN , KELURAHAN SOSROMENDURAN	KELURAHAN SOSROMENDURAN	DAU	Peningkatan Sahuran Air Hujan (Sah)	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	630000000	630000000	630000000	630000000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan / Persentase Jumlah Lembaga Masy Terakses Program	100%	100%	100%	100%	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	44.947.000	44.947.000	44.947.000	44.947.000	KELURAHAN BUMIJO	KELURAHAN BUMIJO	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Spah (Sumur Peresapan Air Hujan)	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	157 Unit	157 Unit	157 Unit	157 Unit	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, PANEMBAHAN	KELURAHAN PANEMBAHAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembuatan Spah = 10 Titik	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026								
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	108 Unit	108 Unit	108 Unit	108 Unit	44.932.000	44.932.000	44.932.000	44.932.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, KADIPATEN	KELURAHAN KADIPATEN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Pelumpuran Spah = 7 Titik - Pembuatan Spah = 8 Titik	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
37.927	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Panjang Sungai Yang Tercapai Dalam Kegiatan Pembersihan Sungai	74,46%	74,46%	74,46%	74,46%	2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.11.03.2.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen					4 SUNGAI KOTA YOGYAKARTA, YAITU: - SUNGAI WINONGO - SUNGAI CODE - SUNGAI MANUNGAL - SUNGAI GAJAHWONG	-DLH 50 PETUGAS PEMBERSIHAN SUNGAI	APBD KOTA YOGYAKARTA		Pencapaian Ripb Periode II Fokus 11 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Presentase Usaha Yang Telah Memiliki Izin Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	16,58%	17,59%	18,57%	19,53%	2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Atau Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana Pplhd	215 Dokumen				2.11.06.2.01.04	Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana Pplh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana Pplhd	215 Dokumen								KOTA YOGYAKARTA	- DLH KOTA YOGYAKARTA - TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	APBD KOTA YOGYAKARTA		Pencapaian Ripb Periode II Fokus 11 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Indeks Kapasitas Ketahanan Dan Keselamatan Kebakaran	99,46	99,52	99,58	99,64	1.05.04.2.01	Pencegahan; Pengendalian; Pemadaman; Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Peningkatan Kemampuan Penanganan Kebakaran Dan Penyelamatan Sesuai Responstime (15 Menit Dalam Kota)	100%	100%	100%	100%	1.05.04.2.01.03	Terlaksananya Penyelamatan Atau Evakuasi Korban Non Kebakaran Dan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyelamatan Dan Evakuasi Non Kebakaran Dan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	360 Dokumen	360 Dokumen	360 Dokumen	360 Dokumen	8.955.496.000	8.955.496.000	8.955.496.000	8.955.496.000	KOTA YOGYAKARTA	DAMKAR			Pencapaian Ripb Periode II Fokus 11 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
07.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	955.400.000	965.400.000	975.400.000	985.400.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	2.13.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	116.186.400	116.186.400	116.186.400	116.186.400	KELURAHAN PAKUNCEN	KELURAHAN PAKUNCEN	PAD	1. Pemeliharaan Sah Di Kelurahan Pakuncen	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
																															2. Pembangunan Spah Di Kel. Pakuncen	Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026								
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Masyarakat Di Kelurahan	75 Unit					72.740.000					KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, DEMANGAN	KELURAHAN DEMANGAN	PAD	Spah	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Masyarakat Di Kelurahan	200 Unit					209.071.988					KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, BACIRO	KELURAHAN BACIRO	PAD	1. Spah 2. Sah	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Masyarakat Di Kelurahan	71 Unit					39.175.000					KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, TERBAN	KELURAHAN TERBAN	PAD	Spah	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	117 Pokmas/Ormas					920.000					KOTA YOGYAKARTA, KEMANTREN MANTRIJERON, KELURAHAN SURYODININGRATAN	KELURAHAN SURYODININGRATAN	DAU (DANA ALOKASI UMUM)	Fasilitasi Rapat Pbs Suryo Resik	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	117 Pokmas/Ormas					8.740.000					KOTA YOGYAKARTA, KEMANTREN MANTRIJERON, KELURAHAN SURYODININGRATAN	KELURAHAN SURYODININGRATAN	DAU (DANA ALOKASI UMUM)	Pembinaan Bank Sampah	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	117 Pokmas/Ormas					4.317.500					KOTA YOGYAKARTA, KEMANTREN MANTRIJERON, KELURAHAN SURYODININGRATAN	KELURAHAN SURYODININGRATAN	DAU (DANA ALOKASI UMUM)	Workshop Penanganan Sampah	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi					
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026										
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Pokmas/Ormas															Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Pokmas/Ormas															Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Pokmas/Ormas															Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Pokmas/Ormas																Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	1					7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	12 Unit																Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	1					7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	12 Unit																Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi					
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026										
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	1					7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	12 Unit																Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	1					7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	12 Unit															Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	1					7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	12 Unit															Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	1					7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	12 Unit															Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	1					7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	12 Unit															Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	1					7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	12 Unit															Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Meningkatkan Kemampuan Keluarga Yang Melaksanakan Proklamasi Dan Kampung Hijau	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	55 Keluarga																Pencapaian Ripb Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026								
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	129 Pokmas/Ormas					7.728.680					KOTA YOGYAKARTA, KEMANTREAN MANTRIJERON, KELURAHAN GEDONGKIWO	KELURAHAN GEDONGKIWO	DAU (DANA ALOKASI UMUM)	Pelatihan Budidaya Anggrek	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	129 Pokmas/Ormas					8.658.020					KOTA YOGYAKARTA, KEMANTREAN MANTRIJERON, KELURAHAN GEDONGKIWO	KELURAHAN GEDONGKIWO	DAU (DANA ALOKASI UMUM)	Pelatihan Pertanian	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	3 Lembaga					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	129 Pokmas/Ormas					7.778.680					KOTA YOGYAKARTA, KEMANTREAN MANTRIJERON, KELURAHAN GEDONGKIWO	KELURAHAN GEDONGKIWO	DAU (DANA ALOKASI UMUM)	Pelatihan Budidaya Anggur	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.467.493.500	1.467.493.500	1.614.242.850	1.697.222.896	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan Dan Bank Sampah Yang Meningkatkan Kapasitasnya	29 Kelompok	29 Kelompok	29 Kelompok	29 Kelompok	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestraian Lingkungan Hidup	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Proklamasi Dan Kampung Hijau	16 Kampung	16 Kampung	16 Kampung	16 Kampung	14.645.000	14.645.000	14.645.000	14.645.000					KEMANTREAN DANUREJAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Desiminasi Pengelolaan Sampah - Fasilitas Forum Bank Sampah - Pendampingan Program Kampung Iklim	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.467.493.500	1.467.493.500	1.614.242.850	1.697.222.896	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan	24 Pokmas	24 Pokmas	24 Pokmas	24 Pokmas	49.917.500	49.917.500	49.917.500	49.917.500					KEMANTREAN DANUREJAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pengelolaan Sampah Organik (Biopori, Losida, Eco Enzim)	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.467.493.500	1.467.493.500	1.614.242.850	1.697.222.896	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Yang Terbangun Dan/ Atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	7.01.03.2.02.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100.024.000	100.024.000	100.024.000	100.024.000					KEMANTREAN DANUREJAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- Perbaikan Sah	Pencapaian Riph Periode I Fokus 12 Dan Periode II Fokus 12 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Isue Strategis 4: Lemahnya kualitas partisipasi dan mandiri masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Indeks Kapasitas Ketahanan Dan Keselamatan Kebakaran	99,46	99,52	99,58	99,64	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pecegahan Kebakaran	Presentase Edukasi Proteksi Kebakaran	98,20%	98,40%	98,60%	99%	1.05.04.204.01	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi Informasi Dan Edukasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	219.553.750	219.553.750	219.553.750	219.553.750	KOTA YOGYAKARTA	DAMKAR			Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurukan Indeks Risiko Bencana Kota Yogykarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan N	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37,80 Skala 1-100	37,90 Skala 1-100	38,00 Skala 1-100	0 Skala 1-100	2.23.02.2.0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan							96.840.700	96.840.700	96.840.700	96.840.700		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurukan Indeks Risiko Bencana Kota Yogykarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	76.76%	82.06%	83.35%	84.64%	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kawasan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	21 Kawasan	23 Kawasan	15 Kawasan	15 Kawasan	1.05.03.2.0 2.06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	15 Kawasan	0	0	2.867.899.000				KOTA YOGYAKARTA	BIDANG PK DIKK / SEKSI PK	APBD	Pembentukan Ktb Rintisan Dan Review Ktb	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurukan Indeks Risiko Bencana Kota Yogykarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Wilayah Terselesaikan Sebagai Hasil Koordinasi	100%	100%	100%	100%	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi Terkait Bidang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	20	20	20	20	7.01.05.2.0 1.0002	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	KEMANTREN JETIS	JAWATAN KEAMANAN	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Rakordasi Fkdm	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurukan Indeks Risiko Bencana Kota Yogykarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Wilayah Terselesaikan Sebagai Hasil Koordinasi	100%	100%	100%	100%	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi Terkait Bidang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	20	20	20	20	7.01.05.2.0 1.0002	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	KEMANTREN JETIS	JAWATAN KEAMANAN	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Rakordasi Fkpt	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurukan Indeks Risiko Bencana Kota Yogykarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Wilayah Terselesaikan Sebagai Hasil Koordinasi	100%	100%	100%	100%	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi Terkait Bidang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	20	20	20	20	7.01.05.2.0 1.0002	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	KEMANTREN JETIS	JAWATAN KEAMANAN	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Rakordasi Linmas	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurukan Indeks Risiko Bencana Kota Yogykarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Nilai Spa (Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan) Pada Aspek Di Laboratorium Kesehatan	46%	51%	56%	61%	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1.02.03.2.02.0002	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	165.591.360	193.189.920	220.788.480	220.788.480	KOTA YOGYAKARTA	DINAS KESEHATAN	APBD	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Yang Aktif	78,89%	78,89%	83,00%	83,00%	2.08.02.2.01	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Umlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan Dan Komunikasi Informasi Edukasi (Kie) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen							506.280.081	506.280.081	506.280.081	506.280.081	KOTA YOGYAKARTA	DP3AP2KB		Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Sekolah Yang Menerima Kegiatan Tagana Masuk Sekolah (Tms)	7 Sekolah	14 Sekolah	14 Sekolah	14 Sekolah	11.653.750	23.307.500	23.307.500	23.307.500	KOTA YOGYAKARTA	DINSOSNAKERTRANS - TAGANA - SD/SMP	APBD KOTA YOGYAKARTA	Pencapaian Riph Periode Iii Fokus 8 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	76,76%	82,06%	83,35%	84,64%	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kawasan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	21 Kawasan	23 Kawasan	15 Kawasan	15 Kawasan	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Dan Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	500 Orang	425 Orang	600 Orang	600 Orang	300.712.500				KOTA YOGYAKARTA	BIDANG PK DIKK / SEKSI PK	APBD	Pembentukan Spab Tahun 2023 (8 Spab); Tahun 2024 (8 Spab); Tahun 2025 (15 Spab); Tahun 2026 (15 Spab)	Pencapaian Riph Periode Iii Fokus 8 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Presentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	74,65%	77,82%	80,99%	83,09%	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kawasan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana					1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kawasan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	23 Kawasan (15 Ktb + 8 Spab)	23 Kawasan (15 Ktb + 8 Spab)	20 Kawasan (20 Spab)	20 Kawasan (20 Spab)	1.604.723.455	1.604.723.455	1.604.723.455	1.604.723.455		KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		Pencapaian Riph Periode Iii Fokus 8 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	76,76%	82,06%	83,35%	84,64%	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Informasi Rawan Bencana	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.016.295.000	1.604.723.455	1.604.723.455	1.604.723.455	KOTA YOGYAKARTA	BIDANG PK DIKK / SEKSI DIKK	APBD	Pembangunan Ews (Water Level, Telemetri, Dll) Dan Pemeliharaan Ews	Pencapaian Riph Periode I Fokus 3 Dan Periode Ii Fokus 3 Menurunkan Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Penanganan Dan Mitigasi Bencana Alam	36 Keluarga	36 Keluarga	36 Keluarga	36 Keluarga	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	36 Keluarga	36 Keluarga	36 Keluarga	36 Keluarga	36.675.000	36.675.000	36.675.000	36.675.000	KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, DEMANGAN	JAWATAN KEAMANAN	PAD	1. Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2. Apel Siaga Kebencanaan 3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 4. Rapat Koordinasi Forum Relawan Gondokusuman	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	4.200.000				KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, DEMANGAN	KELURAHAN DEMANGAN	PAD	Workshop Simulasi Gempa Ktb	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	224 Pokmas / Ormas	224 Pokmas / Ormas	224 Pokmas / Ormas	224 Pokmas / Ormas	2.100.000				KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, BACIRO	KELURAHAN BACIRO	PAD	Sosialisasi Kewaspadaan Dini	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	4.200.000				KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, DEMANGAN	KELURAHAN DEMANGAN	PAD	Workshop Simulasi Gempa Ktb	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	111 Pokmas / Ormas	111 Pokmas / Ormas	111 Pokmas / Ormas	111 Pokmas / Ormas	3.350.000				KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, KOTABARU	KELURAHAN KOTABARU	PAD	Pelatihan Kesamaptaan Linmas	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	2.728.767.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	8.450.000				KOTA YOGYAKARTA, GONDOKUSUMAN, TERBAN	KELURAHAN TERBAN	PAD	Pelatihan Kebencanaan	Pencapaian Riph Periode li Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi		
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
Isue Strategis 5: Meningkatnya kerentanan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Pariwisata yang berisiko bencana																															
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Berkembang Usahanya	12 Unit	18 Unit	24 Unit	30 Unit	2.17.06.2.01	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota																						Pencapaian Riph Periode I Fokus 8 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Dan Kegiatan Organisasi Kepemudaan Atau Sosial Kemasyarakatan	58,17	61,07	64,12	67,32	2.19.02.2.01	Penyadaran Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Yang Memiliki Kapasitas Daya Saing Sebagai Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemuda Dan Pemudakader Kabupaten/Kota	19850 Orang	19900 Orang	19950 Orang	20000 Orang																	Pencapaian Riph Periode I Fokus 8 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penanganan Potensi Konflik Berbasis Ekonomi Sosial Dan Budaya	71%	72%	73%	74%	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya																						Pencapaian Riph Periode I Fokus 8 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
05.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tingkat Kemanfaatan Penelitian Dan Pengembangan					5.05.02.2.03	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan																							Pencapaian Riph Periode I Fokus 2 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	7.01.03.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Semaki	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	173.442.250	173.442.250	173.442.250	173.442.250	KELURAHAN SEMAKI	KELURAHAN SEMAKI	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Pembangunan Display Umkm 1 Unit 2. Pemeliharaan Pju Kampung Semaki 1 Laporan 3. Pembangunan Taman 1 Lokasi	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kelurahan	630000000	630000000	630000000	630000000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Umkm Yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	60	60	60	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6.325.000	6.325.000	6.325.000	6.325.000	JAWATAN KEMAKMURAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rapat Koordinasi Umkm	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			

Nomen-klatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomen-klatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomen-klatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total	630000000	630000000	630000000	630000000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Umkm Yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	60	60	60	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	27.573.000	27.573.000	27.573.000	27.573.000		JAWATAN KEMAKMURAN	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jetis Expo	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	2.203.136.000	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	140.682.000	140.682.000	140.682.000	140.682.000	KEMANTREN UMBULHARJO	JAWATAN KEMAKMURAN	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1. Gelar Potensi Umkm 1 Laporan 2. Pelatihan Budidaya Tanaman Hias 1 Laporan 3. Workshop Up2K 1 Laporan 4. Workshop Pokdarwis 1 Laporan 5. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1 Laporan	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Kelompok Yang Meningkatkan Kapasitasnya	30	30	30	30	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80 Keluarga	80 Keluarga	80 Keluarga	80 Keluarga	17.552.500	17.552.500	17.552.500	17.552.500	KEMANTREN JETIS	JAWATAN KEMAKMURAN	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1. Rapat Koordinasi Gapoktan (Rp 6.900.000) 2. Pelatihan Budidaya Anggrek Lanjutan (Rp 10.652.500)	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30	30	30	30	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	183 Pokmas/Ormas	11.389.000	11.389.000	11.389.000	11.389.000	KELURAHAN BUMIJO	KELURAHAN BUMIJO	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Kerajinan Batik	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Umkm Yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Umkm	10 Umkm	10 Umkm	10 Umkm	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.975.000	8.975.000	8.975.000	8.975.000	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, SEMUA KELURAHAN	JAWATAN KEMAKMURAN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Gelar Potensi Umkm Dan Gapoktan = 2Hari Kegiatan (@100 Org)	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Layanan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	23,33 %	26,66 %	30 %	0 %	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, Dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0 Laporan								300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	DINAS PARIWISATA			Pencapaian Riph Periode Iii Fokus 5Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	

Nomenklatur Program	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Target indikator program (tiap tahun)				Nomenklatur Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Target indikator kegiatan (tiap tahun)				Nomenklatur sub kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator sub-Kegiatan	Target indikator sub kegiatan (tiap tahun)				Prakiraan Pagu (tiap tahun)				Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Diskripsi indikator sub kegiatan (Jenis dan Jumlah)	Kontribusi	
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
		Persentase Usaha Jasa Pariwisata Yang Tersertifikasi	57,11 %	57,39 %	57,67 %	0 %		Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen					275.000.000	275.000.000	275.000.000	0							Pencapaian Riph Periode Iii Fokus 5Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
								Jumlah Dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen					897.770.000	897.770.000	897.770.000	0							Pencapaian Riph Periode Iii Fokus 5Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
								Jumlah Dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	0 Laporan					571.892.000	571.892.000	571.892.000	0							Pencapaian Riph Periode Iii Fokus 5Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta			
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemandirian Kraton	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terkait Pemberdayaan Kelurahan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	12.512.500	12.512.500	12.512.500	12.512.500	KOTA YOGYAKARTA, KRATON, KADIPATEN	KEKURAHAN KADIPATEN	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelatihan Pemandu Wisata Dan Story Telling = 3Hari Kegiatan (@30 Org)	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Berstandar Layanan Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata (Dtw) Yang Berstandar Layanan Prima	61.77 %	64.7 %	67.65 %	0 %	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata/ Kota		4 Dtw	5 Dtw	5 Dtw	0 Dtw								2.187.825.200	2.406.607.720	2.647.268.492	0				Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		
2.22.08	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peran Aktif Masyarakat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan	55,17%	70,45%	85,22%	100,00%	2.22.08.5.07	Adat Tradisi, Lembaga Budaya Dan Seni	Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya Dan Seni	82%	87%	93%	100%	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan Dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya Dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa Dan Kantong Budaya	5	4	5	5	2.130.360.000	2.130.360.000	4.514.383.000	4.514.383.000	KOTA YOGYAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN	DANA KEISTIMEWAAN	Kampung Menari (1 Kegiatan), Gelar Potensi Rkb (1 Kegiatan), Pembuatan Video Profil Rkb (4 Rkb)	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta	
													2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	9	6	6	6	4.945.000.000	5.545.000.000	6.850.000.000	6.850.000.000	KOTA YOGYAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN	DANA KEISTIMEWAAN	Jogja Cross Culture (1 Event), Festival Jogja Kota (1 Event), Kotabaru Heritage Film Festival (1 Kegiatan), Festival Seni Tk. Kota (4 Event), Pengiriman Festival Tk Diy (5 Event) Lomba Lukis Diy Kyoto (1 Event)	Pencapaian Riph Periode Ii Fokus 6 Menurun Kan Indeks Bencana Kota Yogyakarta Dan Pencapaian Target Rpd Kota Yogyakarta		

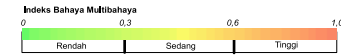


YK
KOTA
YOGYAKARTA

PETA REKOMENDASI RENCANA AKSI DAERAH KOTA YOGYAKARTA



0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 Kilometers

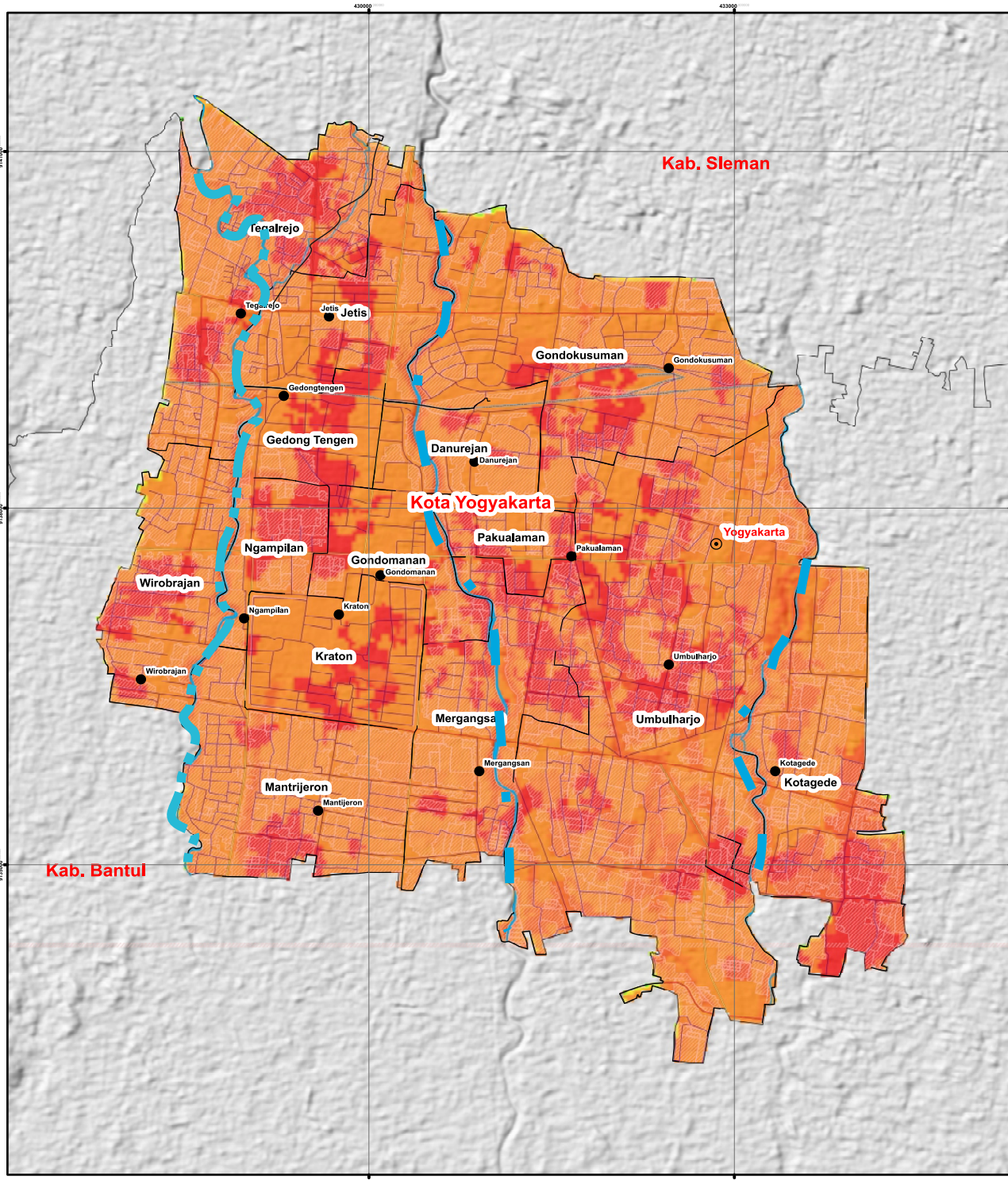


LEGENDA

- Ibu Kota Kabupaten/Kecamatan
- Ibu kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Lainnya
- Pemukiman
- Tidak Ada Potensi
- Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- ~ Perairan
- ~ Sungai

Rekomendasi Program Kegiatan Prioritas

No	Kegiatan	Pengampu Kegiatan
1	Penguatan organisasi relawan untuk penanggulangan bencana	Kesbangpol, BPBD, Dinsos
2	Penguatan KTB dan Forum KTB dalam penanggulangan bencana	BPBD
3	Penguatan literasi kebencanaan kepada Masyarakat dikawasan rawan bencana	BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas
4	Pengelolaan risiko bencana berbasis gender dan inklusi sosial	DP3AP2KB, Dinas Sosial dan BPBD
5	Pengurangan risiko bencana berbasis kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan BPBD
6	Edukasi Masyarakat pada adaptasi perubahan iklim	DLH dan BPBD
7	Pembuatan model UMKM dan pasar tangguh bencana	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM dan BPBD
8	Pengembangan pariwisata Tangguh	Dinas Pariwisata dan BPBD
9	Penguatan ekonomi masyarakat daerah rawan bencana	Bappeda,
10	Integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang dan wilayah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan BPBD
11	Penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Dinas Pendidikan dan BPBD
12	Pengembangan rumah sakit aman bencana	Dinas Kesehatan dan BPBD
13	Pengembangan riset kebencanaan terutama dampak bencana terhadap perekonomian prioritas di kota Yogyakarta	Bappeda, BPBD
14	Penguatan Mitigasi struktural banjir genangan, banjir Sungai dan longsor tebing Sungai	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
15	Penguatan system mekanisme tanggap darurat bencana	BPBD
16	Monitoring dan Evaluasi kelompok masyarakat penanggulangan bencana (KTB, KALTANA, TAGANA)	BPBD, Dinas Sosial dan Pemadam kebakaran
17	Penguatan kelompok masyarakat terkait Bencana/Katahanan pangan/adaptasi perubahan iklim	Dinas Pertanian dan Pangan, DLH dan BPBD
18	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis pengurangan risiko bencana	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
19	Pengembangan sistem perlindungan sosial darurat bencana	Dinas sosial dan DP3AP2KB
20	Penguatan mekanisme buffer stok penanganan darurat bencana	Dinas Pertanian dan Pangan dan BPBD
21	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	BPBD dan Diskominfo
22	Kolaborasi Multik stekholder penanggulangan bencana	BPBD dan OPD Kota Yogyakarta
23	Pengembangan sistem penangan darurat dan pemulihan terhadap bencana	BPBD, Dinsos, dan Dinas Kesehatan
24	Pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLH
25	Pengembangan sistem mekanisme pemulihan infrastruktur kritis pasca bencana	BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
26	Pengembangan mekanisme penilaian ganti rugi akibat bencana	BPBD, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Bappeda
27	Pengembangan sistem cadangan pangan dalam kondisi darurat bencana	BPBD, Dinsos dan Dinas Pertanian dan Pangan



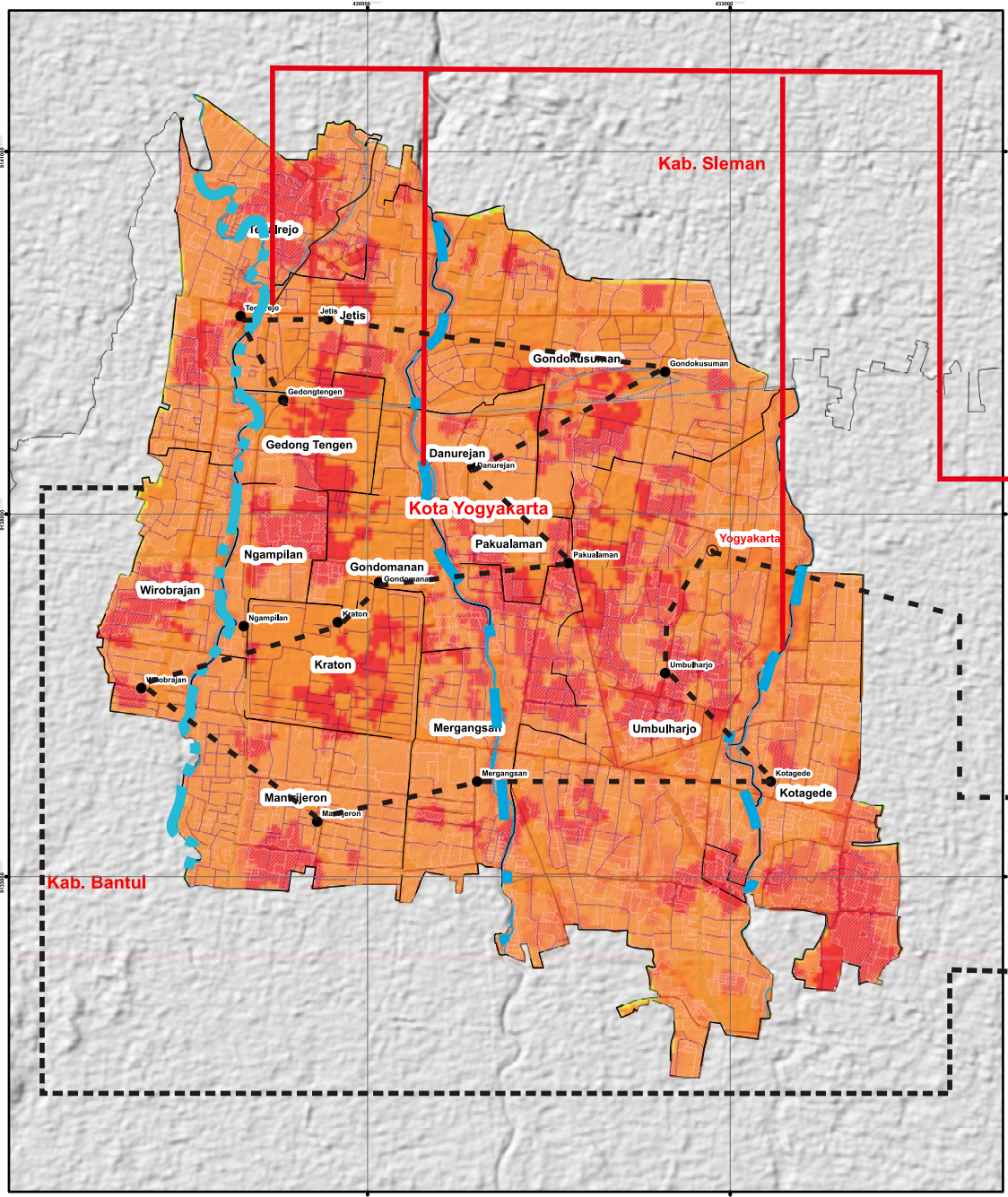
PETA RENCANA AKSI DAERAH KOTA YOGYAKARTA



0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 Kilometers

LEGENDA

- Ibu Kota Kabupaten/Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Lainnya
- ▨ Pemukiman
- Tidak Ada Potensi
- Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Perairan
- Sungai



Mitigasi Bencana Banjir
Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan Sistem Drainase
Pembutan EWS Banjir
Pengelolaan RTRW

Pengampu
DLH
DPUPKP
BPBD
Dinas Tata ruang
Kemantren

Lokasi Kegiatan:
Sungai Winongo
Sungai Gajahwong
Sungai Code
Kali belik
Kali buntung

Peningkatan Kapasitas
Kegiatan:

1. KTB
2. Lorong Sayur
3. Bank Sampah
4. Penguatan UMKM
5. Penguatan Pariwisata
6. SPAB
7. Proklim

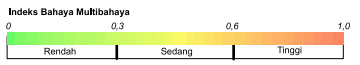
Pengampu:
BPBD
DPP
DLH
Dinas Pariwisata
DPK
Dinas Pendidikan

Lokasi Kegiatan:
Kem. Danurejan
Kem. Gedongtengen
Kem. Gondokusuman
Kem. Gondomanan
Kem. Jetis
Kem. Kotagede
Kem. Kraton
Kem. Mantrijeron
Kem. Mergangsang
Kem. Ngampilan
Kem. Pakualaman
Kem. Tegalrejo
Kem. Umbulharjo

Mitigasi Cuaca Ekstrem
Pengelolaan RTH
Pembentukan RTH

Pengampu
Dinas Tata ruang
Dinas Lingkungan Hidup

Lokasi
Bantaran Sungai
Ruang terbuka Kota Yogyakarta





Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165